

**BUMI** UNTUK  
INDONESIA

**ANTARA**  
KANTOR BERITA INDONESIA

TRAILIN

antara  
news

# RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN 2023

Transformasi Korporasi untuk Antara Masa Depan

P.T. BANK INTERNASIONAL INDONESIA

PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA  
NASIONAL (LKBN) ANTARA  
Jl. Antara, Pasar Baru  
Jakarta, Indonesia



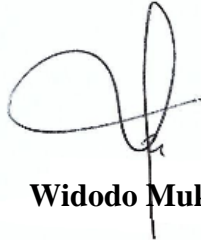
**PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS  
ATAS PENYAJIAN  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN  
PERUM LKBN ANTARA 2023**

Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perum LKBN ANTARA tahun 2023 yang disajikan Direksi dan disusun berdasarkan hasil keputusan rapat Direksi dengan Dewan Pengawas pada 25 November 2022 sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002.

Jakarta, 25 November 2022

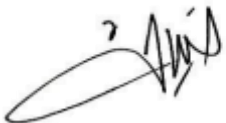
Dewan Pengawas

Ketua



**Widodo Muktiyo**

Anggota



**Widiarsi Agustina**

Anggota



**Mayong Suryo Laksono**

Anggota



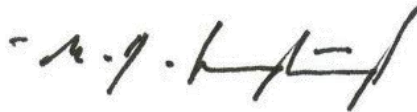
**Monang Sinaga**

**PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN  
PERUM LKBN ANTARA TAHUN 2023**

Direksi Perum LKBN ANTARA:

1. Menyatakan bertanggung jawab atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum LKBN ANTARA tahun 2023.
2. Pada prinsipnya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum LKBN ANTARA tahun 2023 telah diupayakan untuk disusun dan disajikan sesuai Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002
3. Bertanggung jawab atas system pengendalian intern dalam perusahaan.

Jakarta, 25 November 2022  
Direktur Utama



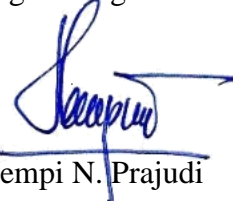
Meidyatama Suryodiningrat

Direktur Pemberitaan



Akhmad Munir

Direktur Komersil dan  
Pengembangan Bisnis



Hempi N. Prajudi

Direktur Keuangan, MSDM  
dan Manajemen Risiko



Nina Kurnia Dewi

## Daftar Isi

BAB I .....	5
PENDAHULUAN.....	5
1.    Gambaran Umum Perusahaan.....	5
2.    Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan .....	5
3.    Maksud dan Tujuan Perusahaan.....	6
4.    Struktur Organisasi Perusahaan.....	7
5.    Susunan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan.....	9
6.    Profil Sumber Daya Manusia.....	9
7.    Struktur Kepemilikan Grup Perusahaan dan Anak Perusahaan .....	10
BAB II.....	11
KINERJA DAN PROGNOSA RKAP 2022.....	11
1.    Situasi Sosial-Ekonomi dan Pengaruhnya pada Kinerja Perusahaan.....	11
2.    Perbandingan RKAP dan Pencapaian Kinerja Perusahaan.....	11
2.1.    Kinerja Pendapatan Dibandingkan dengan RKAP .....	12
2.2.    Kinerja Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	13
2.3.    Kinerja Pemenuhan Berita Penugasan Negara (PSO) .....	13
BAB III .....	16
RENCANA KERJA PERUSAHAAN TAHUN 2023 .....	16
1.    Kondisi Perekonomian yang Mempengaruhi Pencapaian RKAP .....	16
2.    Asumsi Penyusunan RKAP .....	16
3.    Kebijakan, Sasaran Usaha, dan Strategi Perusahaan.....	17
3.1.    Kebijakan .....	17
3.2.    Sasaran Usaha.....	17
3.3.    Strategi Perusahaan .....	18
3.3.1. Revitalisasi Aset Pasca Aksi Korporasi.....	18
3.3.2. Membangun Literasi Politik Untuk Meningkatkan Kesadaran Pemilih Jelang Pemilu 2024 .....	21
3.3.3. Membentuk Talenta Digital dan inklusivitas untuk menciptakan ekosistem kerja yang dinamis dan agile .....	22
3.3.4. Meningkatkan tata kelola perusahaan melalui pemutakhiran dan penguatan sistem.....	23
3.3.5. Melakukan diversifikasi model bisnis melalui inovasi berkelanjutan .....	24
3.3.6. Redefinisi Masa Depan Kantor Berita Antara.....	25
3.4.    Program Kerja.....	25
4.    Penugasan Pemerintah bidang Pers.....	27
4.1.    Sasaran.....	27



4.2.	Ruang Lingkup Pemberitaan PSO .....	28
4.3.	Produk dan Saluran Distribusi Berita PSO.....	29
4.4.	Hak dan Kewajiban .....	29
4.5.	Nilai Perjanjian .....	29
4.6.	Rencana Pemenuhan Produksi PSO 2023.....	31
4.7.	Jangka Waktu .....	32
4.8.	Anggaran, Pendapatan, dan Biaya .....	32
4.9.	Gambaran PSO 2022 .....	33
4.10.	Gambaran PSO 2023 .....	35
4.11.	Penambahan Beban Pajak.....	35
4.12.	Evaluasi Mandiri atas Tata Kelola Penugasan Kewajiban PSO Tahun 2021.....	35
BAB IV.....		41
ANGGARAN PERUSAHAAN.....		41
1.	Gambaran Umum Laba/Rugi Usaha.....	41
2.	Anggaran Pendapatan Usaha .....	42
3.	Anggaran Biaya Usaha .....	43
4.	Anggaran Pendapatan dan Biaya Lainnya .....	45
5.	Anggaran Investasi dan Pengembangan .....	46
6.	Anggaran Sumber Daya Manusia.....	47
7.	Anggaran Teknologi Informasi.....	47
8.	Anggaran Penelitian dan Pengembangan .....	48
9.	Rencana Pemenuhan TKDN.....	48
BAB V .....		51
PROYEKSI KEUANGAN PERUSAHAAN .....		51
1.	Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan.....	51
1.1.	Proyeksi Neraca .....	51
1.2.	Proyeksi Laba/Rugi .....	52
1.3.	Arus Kas.....	53
1.4.	Proyeksi Sumber dan Penggunaan Dana.....	55
BAB V .....		61
LAPORAN KEUANGAN ANAK PERUSAHAAN.....		61
1.	Proyeksi Pokok Keuangan PT IMQ .....	61
1.1.	Proyeksi Neraca .....	61
1.2.	Proyeksi Laba Rugi .....	62
1.3.	Proyeksi Arus Kas .....	63
2.	Proyeksi Pokok Keuangan ETP .....	64

2.1.	Proyeksi Neraca .....	64
2.2.	Proyeksi Laba/Rugi .....	66
2.3.	Proyeksi Arus Kas .....	66
BAB VI.....		68
PROFIL MANAJEMEN RISIKO .....		68
1.	Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko 2022 .....	68
2.	Kebijakan Umum Manajemen Risiko 2023 .....	68
3.	Selera Risiko.....	69
4.	Kapasitas Risiko.....	71
5.	Batas Toleransi Risiko.....	71
6.	Kriteria Risiko.....	72
7.	Profil Risiko dan Peta Risiko Utama.....	76
8.	Target Penurunan Risiko .....	85
9.	Rincian target penurunan risiko per triwulan.....	86
10.	Situasi dan Klasifikasi Risiko Perum LKBN Antara Berdasarkan Permen-5.....	88
BAB VII.....		92
ASPIRASI PEMEGANG SAHAM .....		92
1.	Aspirasi Pemegang Saham Dalam Fungsi Keuangan, Manajemen Risiko, SDM, Teknologi Informasi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.....	92
1.1.	Fungsi Keuangan .....	92
1.2.	Fungsi Manajemen Risiko .....	92
1.3.	Fungsi Sumber Daya Manusia .....	93
1.4.	Fungsi Teknologi dan Teknologi Informasi.....	94
1.5.	Fungsi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.....	94
1.6.	Fungsi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan .....	95
2.	Key Performance Indicators (Indikator Kinerja Utama) .....	96
3.	Target Rasio-Rasio Perusahaan .....	104
4.	Target Tingkat Kesehatan Perusahaan .....	104
5.	Matrix Kesesuaian RKAP dengan APS.....	105
BAB VIII .....		115
RENCANA KERJA DEWAN PENGAWAS .....		115
1.	Pendahuluan .....	115
1.1.	Latar Belakang.....	115
1.2.	Dasar Hukum.....	115
1.3.	Maksud dan Tujuan .....	116
1.4.	Susunan Dewan Pengawas dan Komite-Komite.....	116

1.5.	Pembagian Tugas Dewan Pengawas .....	116
2.	Tanggung Jawab, Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Pengawas .....	117
2.1.	Tanggung Jawab Dewan Pengawas.....	117
2.2.	Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas.....	117
2.3.	Wewenang Dewan Pengawas.....	118
3.	Rencana Kerja Dewan Pengawas.....	119
3.1.	Aspek Pengawasan dan Pengarahan .....	119
3.2.	Aspek Pelaporan .....	120
3.3.	Aspek Dinamis .....	120
3.4.	Jadwal Kegiatan Dewan Pengawas.....	121
4.	Key Performance Indicator Dewan Pengawas.....	121
5.	Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas .....	122
6.	Penutup .....	123
BAB IX.....		124
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN.....		124
1.	Pendahuluan .....	124
2.	Prognosa TJSL Tahun 2022.....	126
3.	Rencana Kerja Dan Anggaran TJSL Tahun 2023 .....	130
4.	KPI Program TJSL Tahun 2023.....	133
BAB X .....		134
LAIN-LAIN .....		134
1.	Kesimpulan.....	134
2.	Hal-hal yang memerlukan persetujuan; .....	134

# BAB I PENDAHULUAN

## 1. Gambaran Umum Perusahaan

Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara adalah Kantor Berita Negara yang bergerak di bidang media, memproduksi dan mendistribusikan berita multimedia.

Kantor Berita Antara didirikan oleh Adam Malik, Soemanang, A.M. Sipahoetar dan Pandoe Kartawigoena pada 13 Desember 1937. Seiring dengan perkembangan organisasi, LKBN Antara resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian BUMN dengan status badan hukum perusahaan umum (Perum) melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 2007. Nama LKBN Antara kemudian menjadi Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA (Perum LKBN ANTARA) sejak 18 Juli 2007 dan mulai merambah berbagai lini bisnis berbasis konten, komunikasi, pengelolaan data dan pendidikan.

Kantor Pusat LKBN Antara terletak di Wisma Antara, Jalan Medan Merdeka Selatan No 17, Jakarta Pusat dan di Gedung Graha Bakti Antara, Jalan Pasar Baru No 59 Jakarta. Perusahaan juga memiliki 32 kantor biro perwakilan di dalam negeri dan beberapa di luar negeri.

Sementara itu, lini usaha Kantor Berita Antara dapat diringkas sebagai berikut:

Lini Usaha	Uraian
<b>Pemberitaan</b>	Berita teks, foto, video, infografis, dan podcast merupakan produk utama perusahaan yang tersebar ke pelanggan (surat kabar maupun media online) di seluruh daerah Indonesia dan puluhan negara sahabat.
<b>Layanan Data Finansial</b>	Kantor Berita Antara – bekerja sama dengan Bloomber dan Reuters – merupakan salah satu pemain utama dalam penyediaan layanan data finansial dengan pelanggan meliputi lembaga-lembaga negara (Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan) serta lembaga finansial lainnya seperti bank.
<b>Layanan Komunikasi Strategis</b>	Layanan komunikasi terpadu merupakan salah satu produk unggulan Antara yang menyediakan kebutuhan komunikasi mulai dari <i>PR consulting</i> , pendidikan kehumasan, MICE, distribusi berita, dll.
<b>Media Luar Ruang</b>	Layanan data dan informasi kepada masyarakat melalui layar LED yang tersebar di ratusan kantor lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ruang-ruang publik lainnya.
<b>Penugasan Pemerintah</b>	Setelah menjadi Perum pada 2007, pada 2008 mendapat penugasan dalam bidang pers oleh pemerintah dengan sasaran penyebaran berita-berita yang transformatif ke seluruh pelosok Indonesia.

Tabel 1 Lini Usaha Kantor Berita Antara

## 2. Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan

Visi Perum LKBN Antara adalah;

---

***Menjadi kantor berita yang berkelas dunia melalui penyediaan jasa berbagai produk multimedia.***

---

Sementara itu misi perusahaan adalah;

- Memperkuat marwah LKBN Antara sebagai sebuah kantor berita serta perusahaan multimedia yang modern.
- Mengembangkan jurnalisme Indonesia yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Menyediakan produk serta jasa informasi dan komunikasi yang akurat, terpercaya serta menguntungkan di bidang multimedia.
- Mengembangkan perusahaan yang modern dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada para *stakeholders*-nya.

Adapun nilai-nilai yang dikembangkan dalam perusahaan saat ini adalah AKHLAK yang bisa dijelaskan dalam tabel berikut:

Nilai	Definisi	Panduan perilaku
<b>Amanah</b>	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi janji dan komitmen.</li> <li>• Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.</li> <li>• Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.</li> </ul>
<b>Kompeten</b>	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.</li> <li>• Membantu orang lain belajar.</li> <li>• Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.</li> </ul>
<b>Harmonis</b>	Saling peduli dan menghargai perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.</li> <li>• Suka menolong orang lain.</li> <li>• Membangun lingkungan kerja yang kondusif.</li> </ul>
<b>Loyal</b>	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara.</li> <li>• Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.</li> <li>• Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.</li> </ul>
<b>Adaptif</b>	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.</li> <li>• Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.</li> <li>• Bertindak proaktif.</li> </ul>
<b>Kolaboratif</b>	Membangun kerja sama yang sinergis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.</li> <li>• Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.</li> <li>• Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.</li> </ul>

Tabel 2 Nilai dan Budaya Perusahaan LKBN Antara

### 3. Maksud dan Tujuan Perusahaan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang tersebut dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2007 khususnya pasal 6, maksud dan tujuan Perum LKBN Antara adalah sebagai berikut;



*Layanan:* menyelenggarakan usaha pemberitaan independen guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

*Komersial:* menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang berkualitas, berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, maka perusahaan dapat menyelenggarakan kegiatan sebagaimana sebagai berikut:

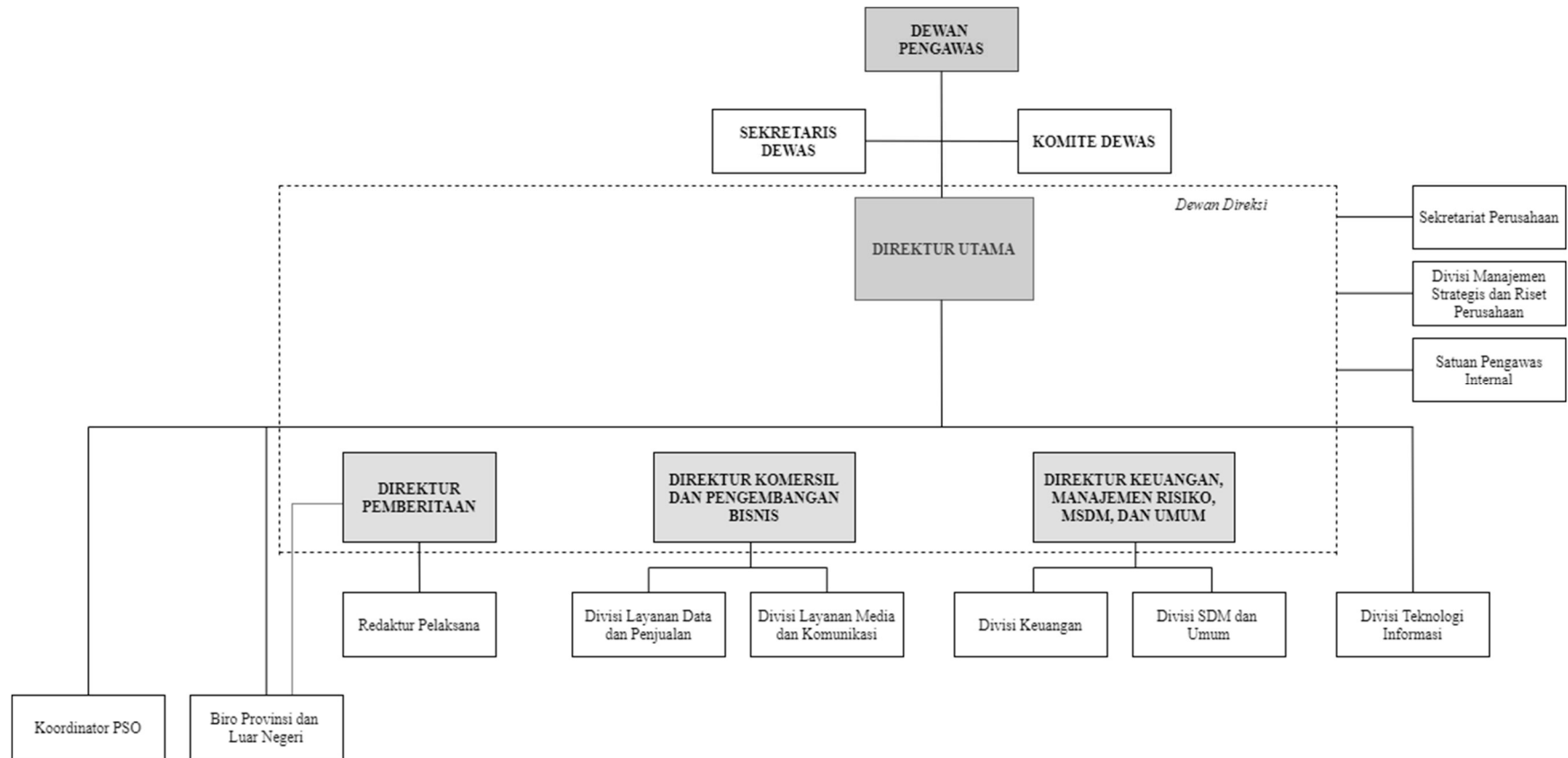
- Peliputan dan/atau penyebarluasan informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat nasional, daerah, maupun internasional,
- Penyediaan jasa berita, foto jurnalistik, grafik, data seketika, audio visual, teknologi informasi, dan multimedia lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan,
- Penyediaan jasa apresiasi dan pendidikan jurnalistik, serta pendidikan multimedia,
- Penyelenggaraan media elektronik, dan percetakan, dan
- Kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

#### **4. Struktur Organisasi Perusahaan**

Perum LKBN Antara saat ini dipimpin oleh satu orang direktur utama yang membawahi empat direktorat. Secara umum, struktur organisasi perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut;

*Berlanjut ke halaman berikutnya..*

Struktur induk Perum LKBN Antara



Gambar 1 Struktur Induk Kantor Berita Antara

### 5. Susunan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan

Susunan Dewan Pengawas Perum LKBN Antara adalah sebagai berikut;

Jabatan	Nama
Ketua Dewan Pengawas	Widodo Muktiyo
Anggota Dewan Pengawas	Widiarsi Agustina
Anggota Dewan Pengawas	Mayong Suryo Laksono
Anggota Dewan Pengawas	Monang Sinaga

Tabel 3 Susunan Dewan Pengawas LKBN Antara

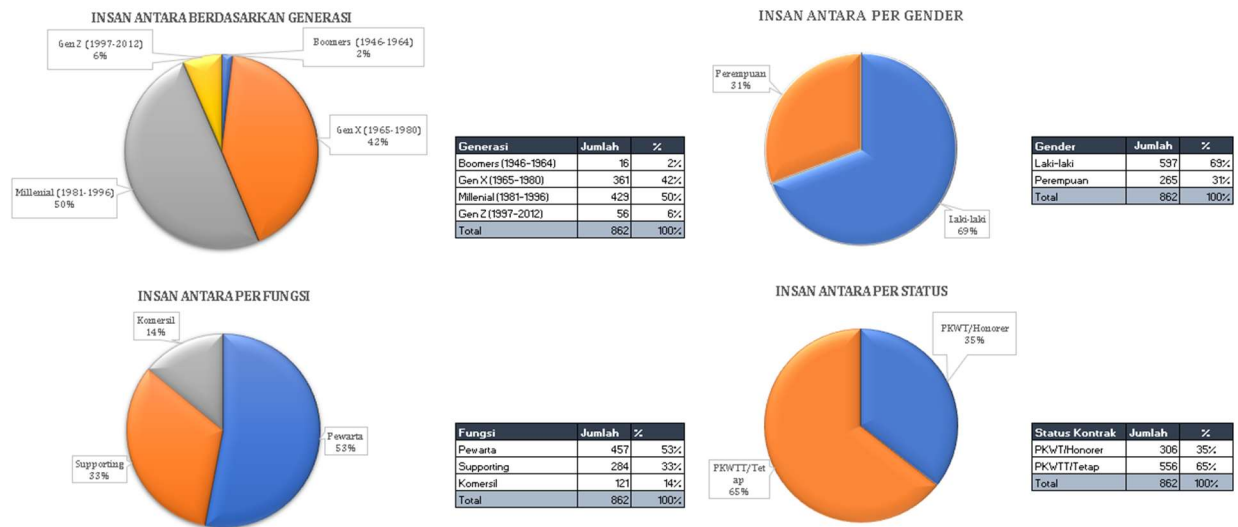
Sementara itu susunan direksi perusahaan adalah sebagai berikut;

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Meidyatama Suryodiningrat
Direktur Pemberitaan	Akhmad Munir
Direktur Komersil dan Pengembangan Bisnis	Hempi N. Prajudi
Direktur Keuangan, MSDM dan Manajemen Risiko	Nina Kurnia Dewi

Tabel 4 Susunan Dewan Direksi Kantor Berita Antara

### 6. Profil Sumber Daya Manusia

Komposisi SDM Perum LKBN Antara pada bulan Oktober 2022 berjumlah 862 karyawan. Dimana dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



## **7. Struktur Kepemilikan Grup Perusahaan dan Anak Perusahaan**

Perum LKBN Antara adalah badan usaha milik negara yang kepemilikannya sepenuhnya berada di tangan negara. Sementara itu, Kantor Berita Antara juga memiliki satu anak perusahaan aktif yaitu, PT. Antara ETP.

## BAB II KINERJA DAN PROGNOSA RKAP 2022

### 1. Situasi Sosial-Ekonomi dan Pengaruhnya pada Kinerja Perusahaan

Kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menunjukkan tren positif meskipun risiko terkait ketidakpastian global masih terus mengejar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tergolong impresif hingga akhir tahun 2022 dan tercatat lebih baik dibandingkan negara lain yang mengalami perlambatan ekonomi hingga Q3-2022 seperti Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Spanyol, Korea Selatan dan Cina. Pertumbuhan ekonomi ini disokong dari peningkatan kinerja di berbagai sektor seperti dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh solid, sektor transportasi dan akomodasi serta sektor makanan-minuman yang terus bertumbuh seiring pulihnya mobilitas masyarakat. Keberhasilan vaksinasi COVID-19 membawa dampak positif terhadap pengendalian efek pandemi.

Pemulihan ekonomi dan keberhasilan vaksinasi tersebut tersebut berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Kinerja komersil perusahaan hingga triwulan ketiga tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari capaian realisasi pendapatan hingga triwulan tiga sebesar 70% dari target tahunan atau sebesar Rp. 269,98M. Sementara itu, keberhasilan vaksinasi dan membaiknya mobilisasi masyarakat telah membuat pewarta-pewarta Antara semakin produktif menghasilkan berita karena tidak lagi terkekang oleh pembatasan sosial. Akibatnya, produksi PSO telah mencapai 71% dari target tahunan pada kuartal ketiga.

Di sisi lain, pada tahun 2022 Antara memulai aksi korporasi besar akibat penjualan Wisma Antara yang selama ini menjadi ruang kerja perusahaan. Penjualan gedung ini berdampak signifikan terhadap realisasi pendapatan diatas. Selain itu, Antara juga dituntut untuk mencari ruang kerja serta sumber-sumber pendapatan baru mengingat selama ini Wisma Antara merupakan aset yang menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup signifikan dari hasil penyewaan Adhiyana dan perolehan deviden dari PT Anpa. Dalam rangka mencari ruang kerja dan sumber pendapatan baru tersebut, manajemen perusahaan telah merencanakan pembelian gedung baru, renovasi kompleks Pasar Baru, dan mengakuisisi sejumlah aset PNRI. Aset-aset tersebut diharapkan dapat menjadi alat kerja yang produktif untuk menunjang kinerja perusahaan pada tahun-tahun mendatang.

### 2. Perbandingan RKAP dan Pencapaian Kinerja Perusahaan

Hampir semua parameter kinerja perusahaan pada 2022 menunjukkan bahwa LKBN Antara telah melampaui target-target penting dan inisiatif strategis yang tertuang dalam RKAP.

Pencapaian inisiatif strategis pada tahun 2022 bisa digambarkan dalam tabel berikut:

No	Inisiatif strategis 2022	Sept 2022	Program kerja yang belum terselesaikan
1	Meningkatkan keterbacaan dan kualitas berita melalui integrasi platform National Newsroom	100%	
2	Ekspansi bisnis melalui electronic trading platform dan Antara Eyes	83%	1. Perpindahan bisnis anak usaha ex-IMQ ke Induk Perusahaan masih dalam proses.



No	Inisiatif strategis 2022	Sept 2022	Program kerja yang belum terselesaikan
			2. 60 hari diberikan BI sejak ijin usaha dikeluarkan untuk memberikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai penyedia ETP.
3	Mengintegrasikan bisnis perusahaan melalui reorganisasi anak usaha dan kerjasama tingkat kluster	90%	Menunggu kesiapan Antara Eye dilakukan soft-trial, sedangkan untuk kerjasama bisnis dengan sesama anggota kluster sudah dilakukan
4	Meningkatkan performa perusahaan dengan inovasi yang berkelanjutan	90%	e-Library yang menjadi salah satu program kerja masih dalam tahapan penyediaan data-data
5	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia untuk menunjang sasaran perusahaan	100%	
6	Memantapkan peran strategis dan komersial biro melalui re-classing	50%	Klasifikasi biro baru sampai pada tahap pembahasan tim ad hoc dan akan diteruskan pada 2023

Tabel 5 Capaian Inisiatif Strategis 2022

Sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, hampir seluruh inisiatif strategis yang tertuang dalam RKAP 2022 telah berhasil dilaksanakan pada kuartal ketiga tahun ini, bahkan dua program inisiatif strategis telah terlaksana secara penuh. Perijinan bisnis usaha ETP berjalan lancar, sehingga kegiatan bisnis sudah bisa mulai beroperasi pada awal 2023.

### 2.1. Kinerja Pendapatan Dibandingkan dengan RKAP

Sementara itu prognosa pencapaian kinerja pendapatan pendapatan PSO dan komersial pada tahun 2021 dibandingkan dengan RKAP dan laporan yang telah diaudit pada tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

(dalam juta rupiah)

Pendapatan	2021 (audited)	RKAP 2022	Prognosa 2022
<b>Penugasan pemerintah (PSO)</b>	166,152	158,200	150,933
<b>Komersial</b>	245,238	229,728	249,604
Divisi Layanan Data	154,669	143,695	159,574
Divisi Layanan Media Dan Komunikasi	68,909	63,734	65,270
Biro Daerah	17,042	17,518	19,025
Anak Perusahaan IMQ	4,618	4,781	5,735
Anak Perusahaan ETP			
<b>Total</b>	<b>411,390</b>	<b>387,928</b>	<b>400,538</b>

Tabel 6 Prognosa Komposisi Pendapatan Komersial Antara

Dari sisi pendapatan, kinerja perusahaan pada tahun 2022 diperkirakan pada akhir tahun telah mencapai target RKAP. Pendapatan PSO pada tahun 2022 mengalami penurunan karena pemberlakuan pajak PPN untuk distribusi berita-berita PSO. Menjelang akhir 2022, unit usaha *Electronic Trading Platform* (ETP) sudah mendapatkan perijinan dari Bank Indonesia dan diperkirakan dapat beroperasi pada awal tahun 2023. Ekspansi bisnis pada layanan data ini diharapkan dapat menunjang pertumbuhan laba Antara kedepannya. Kenaikan laba yang signifikan pada tahun 2022 didominasi oleh penjualan gedung Wisma Antara.

Beberapa aspek keuangan penting yang dapat menjadi indikator kinerja perusahaan pada tahun 2022 bisa digambarkan dalam tabel berikut:

(dalam juta rupiah)

Aspek	2021	RKAP 2022	2022 (prognosa)
Pendapatan usaha	411,390	387,928	400,538
Beban pokok usaha	289,170	271,547	279,975
Beban umum	102,441	94,860	100,530
Laba bersih	16,794	15,009	126,428
Arus kas operasi	17,063	24,696	4,523
Arus kas	98,491	106,862	134,022
EBITDA	34,162	41,442	188,600

Tabel 7 Perbandingan Capaian Keuangan 2021 dan 2022

## 2.2. Kinerja Pengembangan Sumber Daya Manusia

Realisasi pelatihan untuk karyawan Perum LKBN Antara hingga bulan Oktober 2022 mencakup 152 In House training dengan jumlah peserta sebesar 5.091, dan 56 pelatihan publik yang diikuti 255 peserta serta 12 pelatihan sertifikasi yang diikuti 26 peserta. Pada tahun 2023, Perum LKBN Antara akan berpartisipasi pada Program Digital Talent BUMN sebanyak 7% dari total karyawan atau 60 orang. Selain itu perusahaan juga akan melakukan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan baik untuk Dewan Pengawas, Direksi, dan insan Antara.

Kategori Pelatihan	Jumlah Pelatihan	Target Pelatihan	Jumlah Peserta
In house	152	125	5,091
Public	68	100	281

## 2.3. Kinerja Pemenuhan Berita Penugasan Negara (PSO)

Hingga saat ini, perusahaan diperkirakan akan memenuhi semua target terkait pemenuhan berita PSO sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

PRODUK	KUOTA	%	PERIODE												JUMLAH
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
<b>TEKS</b>															
TEMA1	45,009	31%	3,399	3,297	4,013	4,722	3,883	3,874	4,023	4,045	4,203	4,000	4,000	1,550	45,009
TEMA2	36,298	25%	2,703	2,573	3,020	3,135	2,949	3,192	2,870	3,224	3,383	3,800	3,800	1,649	36,298
TEMA3	63,883	44%	6,118	5,681	5,407	5,027	4,909	5,355	5,080	4,661	5,741	6,400	6,400	3,104	63,883
<b>JUMLAH</b>	<b>145,190</b>		<b>12,220</b>	<b>11,551</b>	<b>12,440</b>	<b>12,884</b>	<b>11,741</b>	<b>12,421</b>	<b>11,973</b>	<b>11,930</b>	<b>13,327</b>	<b>14,200</b>	<b>14,200</b>	<b>6,303</b>	<b>145,190</b>
<b>ARTIKEL</b>															
TEMA1	450	30%	12	26	28	23	20	30	58	46	59	60	60	30	452
TEMA2	375	25%	19	24	24	16	22	19	34	25	29	66	65	33	376
TEMA3	675	45%	30	40	64	75	53	71	80	79	50	55	55	28	680
<b>JUMLAH</b>	<b>1,500</b>		<b>61</b>	<b>90</b>	<b>116</b>	<b>114</b>	<b>95</b>	<b>120</b>	<b>172</b>	<b>150</b>	<b>138</b>	<b>181</b>	<b>180</b>	<b>90</b>	<b>1,507</b>
<b>FOTO</b>															
TEMA1	5,940	33%	349	448	571	709	489	537	543	413	590	539	520	232	5,940
TEMA2	4,500	25%	241	269	274	237	250	335	369	508	506	605	605	301	4,500
TEMA3	7,560	42%	479	567	590	622	704	594	643	780	592	800	800	389	7,560
<b>JUMLAH</b>	<b>18,000</b>		<b>1,069</b>	<b>1,284</b>	<b>1,435</b>	<b>1,568</b>	<b>1,443</b>	<b>1,466</b>	<b>1,555</b>	<b>1,701</b>	<b>1,688</b>	<b>1,944</b>	<b>1,925</b>	<b>922</b>	<b>18,000</b>
<b>PHOTOSTORY</b>															
TEMA1	14	35%	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	14
TEMA2	10	25%	-	-	1	1	1	1	1	-	2	1	1	1	10
TEMA3	16	40%	1	2	1	1	2	2	1	2	2	1	1		16
<b>JUMLAH</b>	<b>40</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>40</b>
<b>INFOGRAFIS</b>															
TEMA1	45		6	6	4	5	5	5	3	3	4	2	1	1	45
TEMA2	38		5	2	4	5	4	2	4	3	4	2	2	1	38
TEMA3	67		6	4	7	4	6	8	6	6	6	6	6	2	67
<b>JUMLAH</b>	<b>150</b>		<b>17</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>14</b>				<b>150</b>
<b>TV HARDNEWS</b>															
TEMA1	2,250		298	285	336	218	209	201	205	150	118	100	100	30	2,250

PRODUK	KUOTA	%	PERIODE												JUMLAH
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
TEMA2	1,875		232	175	205	192	193	189	191	141	118	105	100	34	1,875
TEMA3	3,375		371	324	338	332	313	323	318	285	245	220	220	86	3,375
JUMLAH	7,500		901	784	879	742	715	713	714	576	481	425	420	150	7,500
<b>FEATURES</b>															
TEMA1	14	30%	3	-	-	1	1	3	1	2	1	1	1		14
TEMA2	11	25%	-	3	-	-	-	1	-	2	3	2	1		12
TEMA3	20	45%	2	-	2	1	2	-	1	1	4	4	3	-	20
JUMLAH	45		5	3	2	2	3	4	2	5	8	7	5	-	46
<b>PODCAST</b>															
TEMA1	5		-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	5
TEMA2	4		-	-	-	-	1	1	-	-	1	1			4
TEMA3	6		-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	6
JUMLAH	15		-	-	1	4	1	2	3	2	1	1			15

Tabel 5 Pemenuhan kewajiban berita penugasan pada 2022 –

## BAB III

### RENCANA KERJA PERUSAHAAN TAHUN 2023

#### 1. Kondisi Perekonomian yang Mempengaruhi Pencapaian RKAP

Kondisi perekonomian nasional saat ini telah mencapai precovid level dengan pertumbuhan yang berhasil menguat di tahun 2022, namun kita tetap harus waspada dan hati-hati dalam capaian di tahun 2023, dirupsi global yang sangat besar dan penyebabnya karena kondisi geopolitik yang tidak selesai dalam waktu dekat. Menurut proyeksi Kementerian Keuangan pada tahun 2023 pemulihan ekonomi yang terus dijaga akan semakin membaik, sehingga proyeksi pertumbuhan diperkirakan dapat mencapai 5,3%. Upaya Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi memberikan kontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

Pemulihan ekonomi pada tahun 2023 ini merupakan kunci keberhasilan sasaran strategis LKBN Antara pada tahun yang sama. Kinerja komersial akan kembali ke situasi normal dengan dorongan peningkatan daya beli lembaga negara dan swasta terhadap layanan komunikasi.

Dalam waktu pemulihan ekonomi nasional ini juga menjadi waktu yang tepat bagi perusahaan untuk melanjutkan ekspansi bisnis dengan menjadi penyedia layanan *electronic trading platform*. Dimana pada Oktober 2022, Bank Indonesia mengeluarkan persetujuan izin usaha sebagai penyedia layanan ETP ini sudah dapat dipergunakan. Dalam jangka panjang, layanan sistem elektronik untuk pasar uang dan valuta asing ini diperkirakan akan menyumbang pendapatan perusahaan sebesar hampir 10 persen pada 2024.

#### 2. Asumsi Penyusunan RKAP

Indikator	Referensi APBN 2023	Asumsi RKAP 2023
Pertumbuhan ekonomi (% <i>,yoy</i> )	5,3	5,3
Inflasi (% <i>,yoy</i> )	3,6	3,6
Nilai tukar rupiah ( <i>Rp/USD</i> )	14.800	14.800
Suku bunga (%)	7,9	7,9
Harga minyak mentah Indonesia ( <i>USD/barrel</i> )	90	90

Tabel 6 Asumsi Penyusunan RKAP 2022 (Sumber: Aspirasi Pemegang Saham)

Dari asumsi ekonomi makro di atas, yang paling mempengaruhi kondisi laporan keuangan Perum LKBN Antara adalah nilai tukar Rupiah terhadap Dollar US karena beberapa sumber pendapatan diperoleh dalam bentuk Dollar US meskipun pengeluaran pembiayaan operasional misalnya profit sharing kepada mitra asing, pembayaran biaya operasional biro luar negeri dan pembiayaan liputan luar negeri akan membebani kondisi keuangan dalam jumlah yang cukup signifikan. Tingkat inflasi akan berpengaruh terhadap kenaikan biaya-biaya operasional.

Pemulihan pasca pandemi Covid-19 belum sepenuhnya normal, terlebih lagi kondisi juga diperparah dengan perang antara Rusia dan Ukraina. Namun begitu, kondisi tersebut diharapkan tidak mempengaruhi bisnis yang diselenggarakan oleh LKBN ANTARA secara langsung.



### 3. Kebijakan, Sasaran Usaha, dan Strategi Perusahaan

#### 3.1. Kebijakan

Kebijakan penganggaran dalam RKAP tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Kenaikan pendapatan minimum (moderat) adalah 8,74% dari dari prognosa tahun 2022
- b. Gross Profit Margin harus mencapai 30%
- c. Rencana Pendapatan dalam RKAP 2023 sebesar Rp435,54 Miliar adalah:
  - Porsi pendapatan PSO 37% atau Rp155,74 Miliar
  - Porsi pendapatan komersil 63% atau Rp267,91 Miliar
- d. Mengalokasikan anggaran lima persen (5%) dari total biaya human capital, untuk Porgram Peningkatan kualitas SDM perusahaan berbasis kompetensi.
- e. Mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 Juta sebagai kegiatan program TJSJ tahun 2023 diprioritaskan pada Pilar Sosial dan Pilar Lingkungan menyesuaikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
- f. Arus Kas bersih operasional perusahaan tahun 2023 adalah Rp52,59 Miliar
- g. Tingkat pencapaian EBITDA Anggaran tahun 2023 sebesar Rp47,77 Miliar
- h. Tingkat pencapaian laba di tahun 2023 Rp22,50 Miliar
- i. Target atas *cash flow* akhir tahun 2023 Rp110,2 Miliar

Pembiayaan program dan kegiatan yang terkait dengan Arah Kebijakan Strategis Perusahaan 2023 adalah tetap menjadi fokus prioritas.

Untuk mempermudah pembuatan program kerja yang sesuai dengan arah strategi dan kebijakan perusahaan, maka dibuatkan KPI yang bisa menjadi dasar pembuatan program kerja dan kegiatan agar menjadi terukur dan terarah.

#### 3.2. Sasaran Usaha

Sejumlah sasaran kunci yang ingin dicapai perusahaan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Aspek	Sasaran 2023	Perbandingan 2022 (prognosa)
Pendapatan	Rp 435,54 miliar	Rp 400,54 miliar
Laba bersih	Rp 22,50 miliar	Rp 126,43 miliar
Pemberitaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Turut menciptakan iklim demokrasi yang sehat menjelang pemilu dengan produksi berita anti-hoax, berita berimbang dan berkeadilan</li> <li>b. Diseminasi berita-berita pemilu ke 32 provinsi</li> </ol>	Pemenuhan jumlah dan kualitas produksi berita penugasan pemerintah
Ekspansi bisnis	Operasionalisasi ETP	Perolehan izin prinsip ETP dari BI

Tabel 7 Sasaran Usaha Kantor Berita Antara tahun 2023

Secara umum, sasaran utama Perum LKBN Antara pada tahun 2023 adalah menaikkan pendapatan komersial dan anak perusahaan sebesar 7,3% menjadi Rp 267,91 miliar – dengan tambahan pendapatan PSO yang diasumsikan konstan pada angka Rp 155,74 miliar.

### 3.3. Strategi Perusahaan

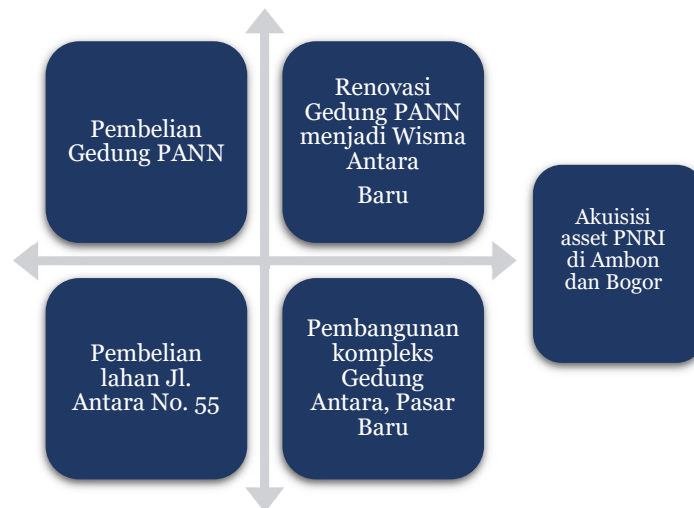
Berdasarkan sasaran-sasaran usaha di atas, Perum LKBN Antara menetapkan strategi perusahaan sebagai berikut;



Gambar 3 Strategi Perum LKBN Antara tahun 2023

#### 3.3.1. Revitalisasi Aset Pasca Aksi Korporasi

Awal tahun 2022 Perum LKBN Antara mendapatkan surat terkait ketertarikan PT. BSI untuk melakukan pembelian Wisma Antara. Akta jual beli Wisma Antara ditandatangani pada September 2022. Sebagai akibat penjualan Wisma Antara tersebut, Perusahaan kemudian menetapkan aksi korporasi bertema Panca Daya Eka Karsa yang akan berfungsi untuk mengganti ruang kerja dan pendapatan yang hilang. Rencana Panca Daya Eka Karsa tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4 Rencana Aksi Korporasi

Atas pembelian dan pembangunan Kompleks Antara dan akuisisi aset PNRI tersebut, mengakibatkan asset Antara naik menjadi hampir 2 (dua) kali lipat. Kenaikan asset tersebut membuat Antara harus melakukan revitalisasi agar asset itu menjadi alat produksi yang menghasilkan pendapatan bagi Perusahaan. Di bawah ini adalah daftar asset yang akan direvitalisasi pada akhir tahun 2023. Perum LKBN Antara merencanakan aksi korporasi, dimana di dalamnya terdapat rencana berupa:

1. Kompleks Antara Pasar Baru akan menjadi pusat jurnalistik modern
2. Wisma Antara-B (ex-PANN) akan menjadi pusat bisnis komersil Antara
3. Asset di Cisarua (ex-PNRI) akan menjadi pusat pendidikan, pelatihan, ruang pertemuan baik untuk internal maupun eksternal
4. Aset di Ambon (ex-PNRI) direncanakan akan menjadi gudang untuk penyimpanan barang-barang ekspor dari Maluku
5. Menyiapkan Kantor Biro yang berdekatan dengan Ibukota Negara Baru di Provinsi Kalimantan Utara
6. Pengadaan alat-alat pendukung kerja berbasis teknologi yang sesuai dengan perkembangan jaman
7. Revitalisasi bangunan dan prasarana biro agar dapat menunjang kinerja pemberitaan dan komersil
8. Mendukung program pemerintah untuk akselerasi penggunaan kendaraan bermotor listrik

Revitalisasi aset di atas diharapkan dapat menambah pendapatan dari sisi komersil selain juga memberikan branding gambaran Kantor Berita Nasional saat ini.

Adapun dalam pelaksanaannya, jumlah dana yang dibutuhkan perusahaan dalam melakukan revitalisasi aset adalah sebagai berikut:

No	Kebutuhan	Nilai (Rp)	Sumber
<b>2022</b>			
1.	Pengadaan Tanah dan Gedung Jl. Cikini (ex PANN)	57.500.000	Hasil Penjualan WA
2.	Pengadaan Tanah Jl. Antara No. 55 Pasar Baru	22.000.000	Hasil Penjualan WA
3.	Pengadaan Tanah dan Bangunan Bogor dan Ambon (ex PNRI)	8.000.000	Hasil Penjualan WA
4.	Renovasi Wisma Antara Baru (ex PANN dan PNRI)	20.000.000	Hasil Penjualan WA
<b>Total</b>		<b>107.500.000</b>	
<b>2023</b>			
5.	Renovasi Antara Riverside Tahap I	30.000.000	Hasil Penjualan WA
6.	Renovasi Antara Riverside Tahap II	45.000.000	Kredit Investasi
<b>Total</b>		<b>75.000.000</b>	

Dalam perencanaan revitalisasi aset untuk renovasi Antara Riverside Tahap II di tahun 2023, Perum LKBN Antara akan bekerjasama bank HIMBARA sebagai penyedia dana melalui fasilitas Kredit Investasi dengan mengagguatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang di miliki Perum LKBN Antara sebagai pemenuhan persyaratan dalam persetujuan pemberian fasilitas kredit dan pencairan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank HIMBARA. History dan proyeksi dalam pemanfaatan fasilitas kredit oleh perusahaan adalah sebagai berikut

No	Jenis Pinjaman	Nilai Pinjaman (Rp)	Periode	Agunan
1	Term Loan/Kredit Investasi (KI)	7.100.000.000	Feb 19 – Jun 22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piutang Dagang Rp 45 M</li> <li>• Tanah dan Bangunan No 57-59 senilai Rp 25,9 M</li> </ul>
2	Kredit Modal Kerja (KMK)	25.000.000.000	Mei 20 – Sept 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah dan Bangunan No 61 senilai Rp 5,3 M</li> </ul>
3	Kredit Modal Kerja (KMK)	25.000.000.000	Jun 21 – Nov 21	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piutang Dagang Rp 70 M</li> <li>• Tanah dan Bangunan No 57-59 senilai Rp 25,9 M</li> </ul>
4	Kredit Modal Kerja (KMK)	25.000.000.000	Mei 22 – Sept 22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah dan Bangunan No 61 senilai Rp 5,3 M</li> </ul>
5	Term Loan/Kredit Investasi (KI)	5.500.000.000	Nov 22 – Okt 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piutang Dagang Rp 90 M</li> <li>• Tanah dan Bangunan No 57-59 senilai Rp 25,9 M</li> </ul>
6	Term Loan/Kredit Investasi (KI)	9.500.000.000	Jan 23 – Des 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah dan Bangunan No 61 senilai Rp 5,3 M</li> </ul>
7	Kredit Modal Kerja (KMK)	30.000.000.000	Apr 23 – Sep 23	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah dan Bangunan No 61 senilai Rp 5,3 M</li> </ul>
8	*Term Loan/Kredit Investasi (KI)*	*45.000.000.000	*Agt 23 – Jul 28	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Opsi Penambahan Agunan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah dan Bangunan No. 53</li> <li>• Tanah dan Bangunan No. 55</li> <li>• Tanah dan Bangunan Jl. Cikini IV No. 11 dan 11 A</li> </ul> </li> </ul>

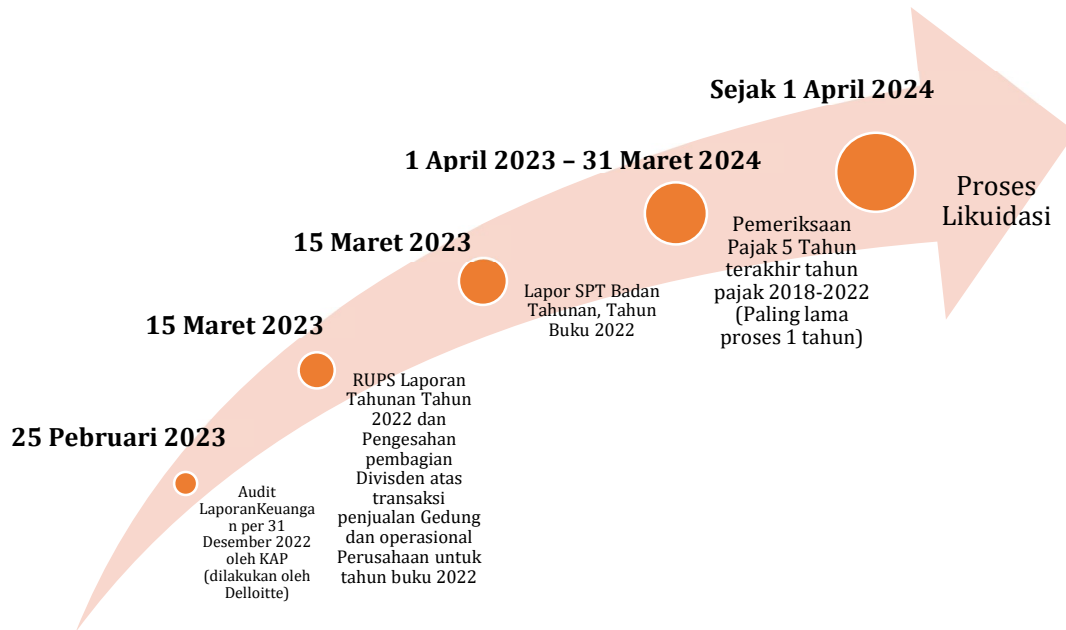
*\*merupakan proyeksi*

Selain itu dampak lain dari penjualan Wisma Antara adalah dibubarkannya entitas asosiasi, PT. Anpa Internasional, dimana Perusahaan mempunyai saham sebesar 20%. Wisma Antara merupakan salah satunya asset yang dimiliki oleh PT. Anpa Internasional. Dengan lepasnya wisma Antara, PT. Anpa Internasional tidak lagi mempunyai sumber pendapatan. Oleh karena itu sesuai dengan RUPS tanggal 18 Agustus 2022 PT. ANPA diputuskan akan dibubarkan.

Sebagai konsekuensi atas ketetapan pembubaran atau likuidasi perusahaan PT. Anpa Internasional, maka penyelesaian kewajiban-kewajiban perusahaan kepada para pemangku kepentingan utama yaitu pegawai perusahaan dan para vendor/supplier menjadi hal utama yang harus diantisipasi dan diselesaikan untuk tidak menimbulkan risiko lebih lanjut.

Menindaklanjuti hal tersebut, dari sisi Perusahaan sesuai dengan PP 40/2007 adalah hal pelepasan asset diharuskan untuk melaksanakan beberapa tahapan, yaitu meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Pengawas terkait likuidasi PT. Anpa Internasional hingga meminta persetujuan dari Menteri BUMN untuk melepaskan seluruh penyertaan Perusahaan pada PT. Anpa Internasional dan melakukan pembubaran anak perusahaan tersebut (likuidasi PT. Anpa Internasional).

Dalam rangkaian proses likuidasi tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 5 Timeline Pelaksanaan Likuidasi PT. Anpa Internasional

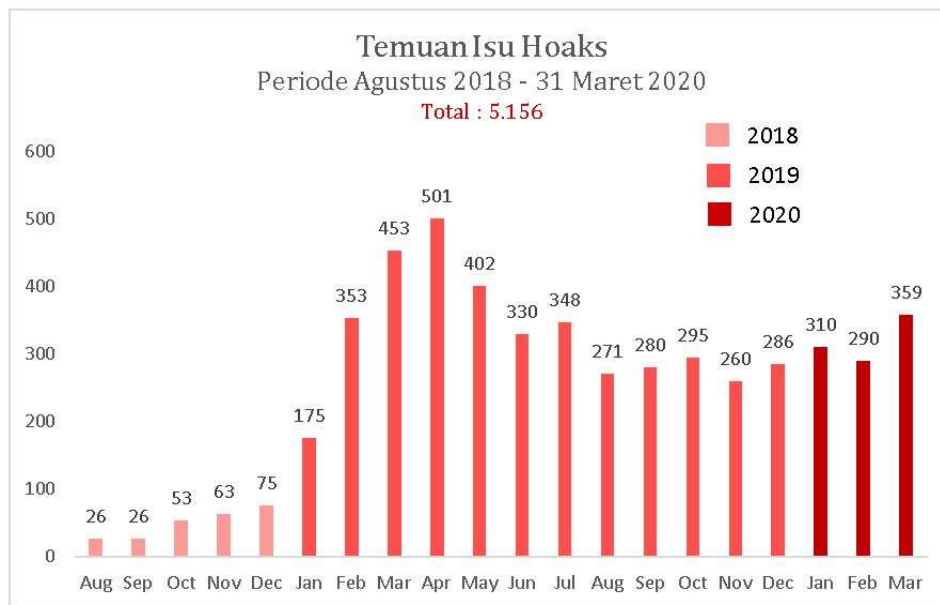
### 3.3.2. Membangun Literasi Politik Untuk Meningkatkan Kesadaran Pemilih Jelang Pemilu 2024

Tahun 2023 merupakan tahun dimana Indonesia menyiapkan pesta demokrasi. Antara sebagai kantor berita Negara harus turut menyukseskan agenda besar tersebut. Salah satu peran yang dapat diambil Antara untuk perhelatan 5 tahunan ini adalah meningkatkan literasi kesadaran politik agar masyarakat Indonesia dapat berperan secara aktif dalam menentukan masa depan Negara dan pemerintahan periode selanjutnya. Di bawah ini terlihat masih ada 40% masyarakat yang belum mengetahui pelaksanaan pemilu pada tahun 2024.



Gambar 6 Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terkait Pelaksanaan Pemilu (Sumber: Charta Politika)

Peran penting lain yang dapat diambil oleh Antara adalah menjadi penjaga gawang terakhir kebenaran, objektivitas, dan keberimbangan informasi yang beredar di masyarakat terkait pemilu. Dalam hal ini, salah satu program unggulan perusahaan adalah memproduksi berita-berita yang mengklarifikasi berita bohong (hoax). Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa berita bohong mulai naik 1 tahun menjelang Pemilu dan akan mencapai puncaknya pada bulan-bulan di sekitar pemungutan suara. Oleh karena itu peran Antara sangat penting untuk meluruskan berita-berita bohong.



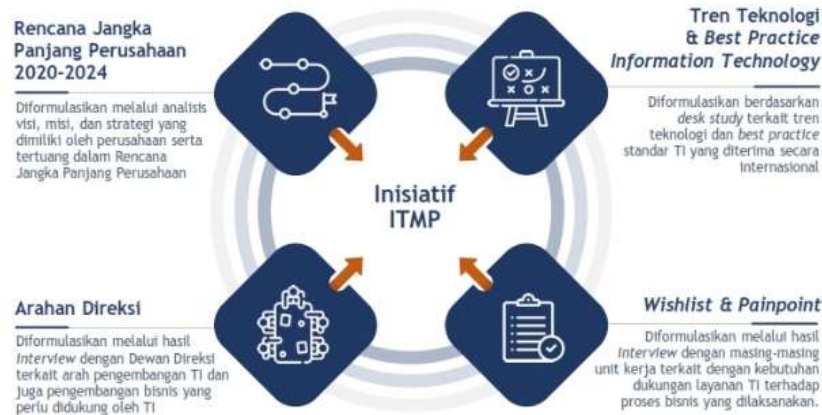
Gambar 7 Tren Berita Palsu Menjelang dan Pasca Pemilihan Umum

### 3.3.3. Membentuk Talenta Digital dan inklusivitas untuk menciptakan ekosistem kerja yang dinamis dan agile

Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, Perum LKBN Antara harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap memiliki budaya AKHLAK, dan menjaga jati diri budaya bangsa. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan yang fokus pada pengembangan talenta digital, memberikan kesempatan kepada perempuan dan top talent muda (millennial) untuk menjadi talenta BOD-2 dan BOD-3 serta hal-hal yang terkait dengan perkembangan teknologi terbaru.

Untuk menyiapkan perusahaan terhadap tantangan terhadap perkembangan teknologi dan target di atas, maka perusahaan perlu menyiapkan talenta-talenta digital yang melek teknologi. Untuk keperluan tersebut perusahaan telah menyiapkan master plan teknologi dan informasi, bukan saja untuk fungsi IT tetapi fungsi-fungsi lainnya dalam manajemen. Dikarenakan saat ini talenta Antara belum mumpuni untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang sudah lebih banyak dilaksanakan secara berdasarkan digital.

Sebagai dasar penyusunan *IT Master Plan*, terdapat beberapa sumber informasi yang digunakan untuk memformulasikan inisiatif ITMP...



Gambar 8 Master Plan IT

Selain menyiapkan talenta digital perusahaan juga menyiapkan sumber daya manusia yang inklusif untuk menciptakan ekosistem kerja yang dinamis dan agile. Dalam hal ini perusahaan telah mempunyai kebijakan berperilaku saling menghargai di tempat kerja (*respectful Workplace Policy/WRP*) di lingkungan Perum LKBN Antara sesuai dengan SKEP Nomor: Per-008/DIR01.ANT/VIII/2022. Dalam peraturan ini, dijelaskan terkait menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan setara, menghargai keberagaman, bebas dari ujaran kebencian, diskriminasi, kekerasan dan pelecehan dapat memberikan efek positif bagi para insan Antara. Perum LKBN Antara mendesain dan menjalankan program-program yang mendukung perkembangan talenta, ketersediaan peraturan dan kebijakan yang mengatur terciptanya ekosistem kerja yang dinamis dan agile.

#### 3.3.4. Meningkatkan tata kelola perusahaan melalui pematkhiran dan penguatan sistem

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan landasan bagi terbentuknya sistem, struktur dan budaya perusahaan yang fleksibel serta adaptif atas perubahan lingkungan bisnis yang kompetitif serta mampu membangun sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal serta menyempurnakan struktur organisasi.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik juga diyakini mampu memperkuat posisi daya saing Perusahaan secara berkesinambungan dengan mengelola sumber daya, melaksanakan audit, melaksanakan pengukuran kematangan IT (*IT Maturity*), mengisi GAP Skor INDI untuk menghadapi Industri 4.0 di Indonesia, guna mendapatkan *improvement* berkelanjutan, menangani dampak risiko secara lebih efisien dan efektif yang dapat meningkatkan corporate value guna menambah kepercayaan terhadap pelanggan.

Sementara untuk meningkatkan tata kelola perusahaan akan dilakukan melalui asesmen GCG yang menargetkan skor untuk asesmen ini lebih baik dari tahun sebelumnya.

Dukungan terkait terciptanya inovasi dalam manajemen telah diatur dalam SKEP Nomor: 010/MO/DIR01.ANT/IX/2022 tentang Pedoman Tata Cara Penyampaian Inovasi (Manajemen Inovasi)



dimana di dalam pedoman tersebut terdapat tatacara dan penyampaian agar Insan Antara dapat turut serta membangun Perum LKBN Antara menjadi lebih maju.

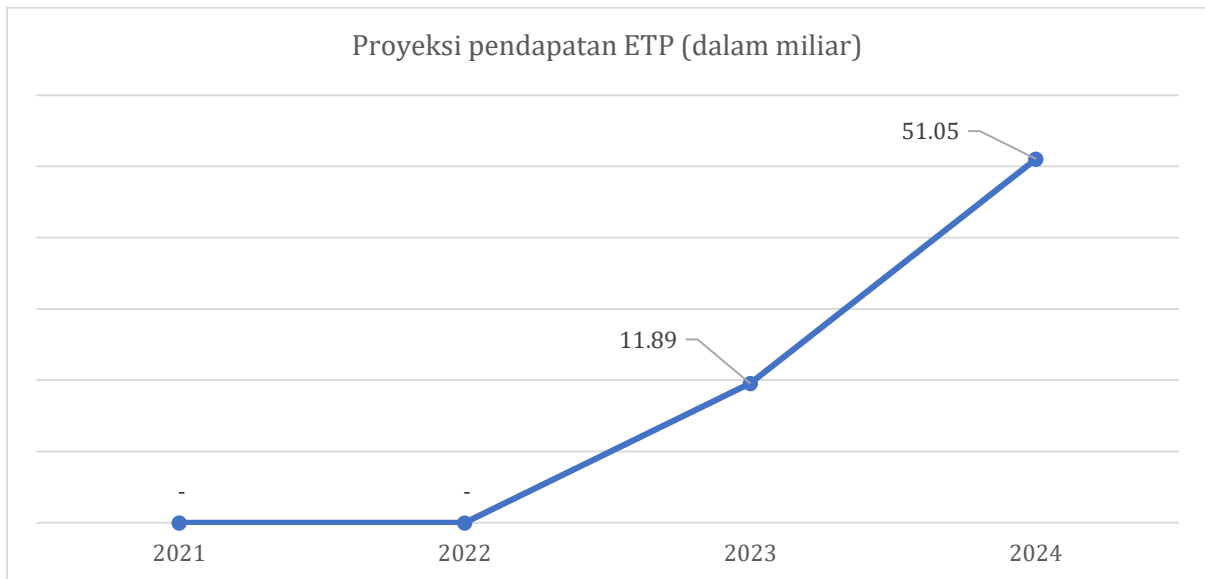
### 3.3.5. Melakukan diversifikasi model bisnis melalui inovasi berkelanjutan

Untuk dapat menjaga pertumbuhan pendapatan pada tahun 2023, Perum LKBN Antara melakukan diversifikasi terhadap model bisnisnya dengan melakukan beberapa inovasi berkelanjutan agar dapat terus bersaing di masyarakat dan menghadapi perubahan perekonomian/bisnis di dunia. Perluasan segmen pasar dilakukan Perum LKBN Antara melalui bisnis barunya Electronic Trading Platform (ETP) yang di tahun 2022 sudah mendapatkan ijin usaha dan ijin operasional dari Bank Indonesia dan Antara Eye – sebuah repositori berita foto, teks, dan video sejak berdirinya Antara pada 1938 yang bisa dibeli oleh khalayak umum. Bisnis baru ini diharapkan sudah membukukan pendapatan pada 2023.

ETP sendiri adalah sistem elektronik yang digunakan oleh pelaku pasar sebagai sarana untuk melakukan transaksi pasar keuangan. Pasar tersebut meliputi pasar uang (seperti Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Sertifikat Deposito, interbank call money, dll) dan pasar valas (seperti spot, forward, futures, swap, opsi). ETP akan menjadi platform bagi para pelaku pasar yang disebut di atas meliputi perbankan, sekuritas, money broker, dll.

Dua bisnis baru ini diharapkan dalam sasaran jangka panjang kritical Perum LKBN Antara adalah untuk merealisasikan ketercapaian kemandirian keuangan yang kemudian diterjemahkan sebagai semakin mengecilnya kontribusi PSO dalam profil pendapatan perusahaan. Kantor Berita Antara menargetkan bahwa pada tahun 2024, kontribusi pendapatan komersial dan anak perusahaan sebesar 62 persen, sementara PSO hanya menyumbang 38 persen. (Prognosa 2022)

Proyeksi pendapatan yang diperoleh perusahaan dari layanan ETP ini bisa digambarkan sebagai berikut:



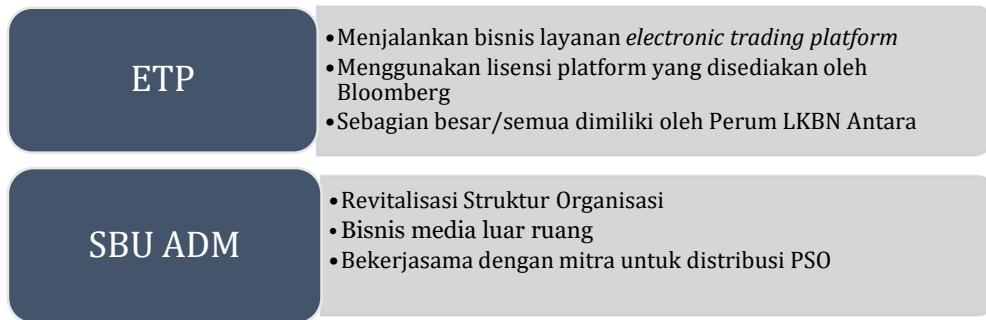
Gambar 9 Proyeksi Pendapatan ETP Hingga 2024

Dalam bisnisnya, strategi repositioning anak usaha berkaitan erat dengan inisiatif penyediaan platform ETP karena perusahaan akan menjalankan bisnis tersebut melalui anak perusahaan PT Antara ETP. Sedangkan kegiatan bisnis PT IMQ Multimedia Utama – yang dalam beberapa tahun



terakhir menjalankan bisnis media luar ruang akan dikembalikan ke induk Perusahaan untuk menjadi strategic bisnis unit (SBU).

Secara umum, skema penataan ulang anak usaha tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



### 3.3.6. Redefinisi Masa Depan Kantor Berita Antara

Melihat perkembangan dunia saat ini, Perum LKBN Antara harus dapat mengikuti perkembangan media agar tidak tertinggal dan ditinggalkan oleh pelanggan, menciptakan dan mencirikan keunikan yang dapat meninggalkan kesan di hati pelanggan tanpa meninggalkan marwah Kantor Berita Nasional.

Dalam pemberitaannya Perum LKBN Antara akan menetapkan editorial standpoint untuk menegaskan kedudukannya sebagai kantor berita nasional dan menjadi acuan bagi media lain.

### 3.4. Program Kerja

Inisiatif strategis di atas akan diwujudkan dalam program kerja sebagai berikut:

Strategi	Program Kerja	PIC
Revitalisasi Aset Pasca Aksi Korporasi	Pembangunan Kompleks Antara Pasar Baru	1. Direktorat Utama 2. Direktorat Komersil dan Pengembangan Bisnis 3. Direktorat Keuangan, MSDM dan Manajemen Risiko
	Kerjasama/Sinergi BUMN dalam pembangunan Kompleks Pasar Baru dan memanfaatkan fasilitas <i>Modified Turn Key</i> PT Nindya Karya	
	Pengajuan Kredit Investasi kepada Bank Mandiri untuk Pembangunan Kompleks Antara Pasar Baru dengan plafond kredit Rp 55 Miliar	
	Mengagunkan aset tetap (Gedung Pasar Baru, Gedung baru ex PANN dan aset lainnya) sebagai pemenuhan syarat pegajuan Kredit Investasi pembangunan Kompleks Pasar Baru minimal senilai plafond kredit.	
	Renovasi Wisma Antara-B (ex-PANN)	
	Pembelian Gedung PANN (telah diajukan pada November 2022)	
	Penghapusan aset furniture dan alat kerja Wisma Antara sebanyak 1.925 item aset (pengajuan persetujuan threshold pada November 2022)	
	Melakukan penyempurnaan SOP Internal terkait Pelepasan dan/Penghapusan Aktiva Tetap Bergerak	
	Renovasi aset Cisarua (ex-PNRI)	
	Renovasi aset Ambon (ex-PNRI)	
	Pembangunan Kantor Biro Kaltara	
	Pengadaan Meubelair di Wisma Antara-B	
	Monetasi aset Cisarua (ex PNRI), aset gedung Antara Baru (ex PANN), aset Pasar Baru, dll	

Strategi	Program Kerja	PIC
	Renovasi Bangunan & Prasarana Biro Lainnya	
	Pengadaan Peralatan Kantor	
	Menyediakan alokasi dana untuk percepatan program pembelian kendaraan bermotor listrik	
	Melaksanakan seluruh proses Likuidasi PT. Anpa Internasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
Membangun Literasi Politik Untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Jelang Pemilu 2024	1. Produksi berita yang netral, objective, dan berkeadilan terkait pemilihan umum 2. Memproduksi berita anti hoax terkait pemilihan umum 3. Kerjasama dengan KPU untuk mendiseminasikan berita-berita tentang pemilihan umum 4. Bekerjasama dengan RRI, TVRI dalam rangka national newsroom untuk menyelaraskan agenda setting pemberitaan tentang pemilihan umum	Direktur Utama dan Direktur Pemberitaan,
Membentuk Talenta Digital dan inklusivitas untuk menciptakan ekosistem kerja yang dinamis dan agile	Ketercapaian Roadmap SDM yaitu: (1) Winning Concept, (2) Winning System, (3) Winning People Rekrutmen SDM sesuai pemetaan dan kebutuhan perusahaan Pendefinisian, pemetaan dan pengembangan <i>Digital Talent</i> Rekrutmen SDM Evaluasi <i>manning</i> pada SBU ADM dengan Job Analysis dan Workload Analysis Pelaksanaan Job Anlysis dan Workload Analysis pada unit kerja Perusahaan Talenta Mapping, career path, & Job Grading HC Kajian tentang rencana implementasi talent manajemen, yang menyangkut talent development, career path, job grading Melaporkan adanya sumber daya termasuk Kebijakan, sistem Human Capital, Anggaran dan implementasi Talent Mobility (Surat KBUMN Nomor: S-580/MBU/09/2022) tentang Aspirasi perputaran talenta BUMN (talent mobility) Pelaporan data, kualitas dan kuantitas talenta BUMN dan anak Perusahaan Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan Fasilitas Kesehatan swakelola (reimbursement biaya kesehatan pegawai) Penyampaian progress implementasi program yang termuat dalam MPTI dalam laporan Manajemen Tahunan Membuat rencana pemenuhan GAP skor IT Maturity level dan progress pemenuhan secara berkala Ketercapaian Roadmap Tahap 1 dari Master Plan IT Mengikuti program digital talent BUMN Program Pemutakhiran PKB Pembuatan Kajian evaluasi Pengelolaan Dana Pensiun Mematuhi undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 53 terkait kewajiban BUMN untuk mempekerjakan karyawan disabilitas sebanyak 2% dari total tenaga kerja.	1. Direktorat Utama 2. Direktorat Keuangan, MSDM dan Manajemen Risiko
Meningkatkan tata kelola perusahaan melalui pemutakhiran dan penguatan sistem	Pengembangan Struktur Organisasi Pelaksanaan hasil Audit internal yang memuat paling sedikit ; 1. Laporan hasil audit internal 2. Laporan Tindak lanjut auditor internal, eksternal dan otoritas pengawas lainnya 3. Laporan khusus mengenai temuan audit internal yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BUMN 4. Laporan hasil kaji ulang pihak eksternal Independen	1. Direktorat Utama 2. Direktorat Pemberitaan 3. Direktorat Komersil dan Pengembangan Bisnis 4. Direktorat Keuangan, MSDM dan Manajemen Risiko

Strategi	Program Kerja	PIC
	5. Laporan hasil audit upon procedur Pembuatan Laporan tata kelola terintegrasi memuat: 1. Struktur tata kelola terintegrasi 2. Proses tata kelola terintegrasi 3. Hasil tata kelola terintegrasi 4. Tindaklanjut rekomendasi hasil assesment GCG tahun sebelumnya Melakukan penilaian risk maturity index Menyusun roadmap perbaikan risiko berkelanjutan atas pelaksanaan manajemen risiko tahun 2023-2027 berdasarkan GAP analysis hasil penilaian RMI Memberikan laporan hasil penilaian RMI dan Roadmap perbaikan manajemen risiko berkelanjutan Assesment dan Target untuk pelaksanaan Audit: a. GCG b. KAP c. SMAP 37001:2016 d. ISO 9001:2015 e. INDI 4.0 f. IT Maturity g. Risk Maturity Index (RMI) h. TJSL i. Sertifikasi Wajib Pajak patuh Pembuatan Roadmap Tingkat Komponen Dalam Negeri Maturitas IT Pendampingan Kasus hukum dengan mengedepankan proses mediasi	
Melakukan Diversifikasi Model Bisnis Melalui Inovasi Berkelanjutan	Pemutakhiran perwajahan situs Antaranews.com desktop dan mobile apps Pelaksanaan Bisnis baru ETP Perencanaan monetasi property baru Operasionalisasi SBU ADM termasuk evaluasi SDM dan revitalisasi Kolaborasi Kantor Biro Antara bersama Divisi LMK untuk mencari proyek bersama Sinergi Bisnis bersama antar Kluster	1. Direktorat Utama 2. Direktorat Pemberitaan 3. Direktorat Komersil dan Pengembangan Bisnis 4. Direktorat Keuangan, MSDM dan Manajemen Risiko
Redefinisi Masa Depan Kantor Berita Antara	1. Pembuatan konsep Antara baru 2. Merencanakan identitas produk yang mudah dikenali 3. Menetapkan editorial stand point 4. Melaksanakan studi banding ke perusahaan/instansi terkait di luar negeri oleh Direksi dan Tim kerja Antara Baru 5. Rebranding Antara 6. Membangun Antara di IKN (Ibukota Negara Nusantara)	1. Direktorat Utama 2. Direktorat Pemberitaan 3. Direktorat Komersil dan Pengembangan Bisnis 4. Direktorat Keuangan, MSDM dan Manajemen Risiko

Tabel 8 Strategi dan Program Kerja Antara 2023

#### 4. Penugasan Pemerintah bidang Pers

##### 4.1. Sasaran

Dalam rangka mengembangkan pendapat publik yang sehat, mendidik, mencerahkan, memberdayakan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta membantu Pemerintah dalam meningkatkan citra positif Indonesia, Perum LKBN Antara mendapat penugasan Pemerintah c.q Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO) untuk Informasi Publik Bidang Pers tahun Anggaran 2023.

PSO Untuk Informasi Publik Bidang Pers merupakan penugasan khusus Pemerintah kepada Perum LKBN Antara berupa penyampaian pelayanan informasi jenis tertentu melalui perencanaan,

pembuatan, penyampaian, distribusi, dan atau penyebarluasan informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat Nasional, Daerah, maupun Internasional sesuai dengan konstruksi program bidang/tema dan kisi-kisi pemberitaan, serta agenda setting yang telah disepakati bersama dengan Kementerian Komunikads dan Informatika.

Produk PSO bidang pers merupakan semua jenis produk berita pers yang memenuhi kaidah jurnalistik dan mengandung unsur pendidikan, pencerahan, pemberdayaan, serta memperkuat rasa nasionalisme. Ruang lingkup penugasan PSO bidang pers ini mencakup: kuota produk, saluran distribusi, hak dan kewajiban, nilai perjanjian, cara pembayaran, pajak, sanksi, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pengawasan internal, keadaan memaksa, penyelesaian perselisihan, perubahan dan adendum, dan jangka waktu.

Berdasarkan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya, sasaran dan kuota produksi pemberitaan untuk penugasan pemerintah (berita PSO) adalah sebagai berikut;

Tahun Produk	Teks Hardnews	Teks Artikel	Berita Foto	Photo Story	TV Features	TV Hardnews	Infografis	Podcast
2023 (Rencana)	145.550	1.700	18.000	45	40	7.500	150	15
2022 (Prognosa)	145.190	1.500	18.000	40	45	7.500	150	15
2021	146.000	1.700	17.000	50	40	7.500	100	
2020	143.466	1.396	14.247	45	34	6.175	100	
2019	144.860	1.700	16.596	50	30	6.750	100	
2018	143.614	1.544	15.244	47	25	5.826	50	

Tabel 9 Perkiraan Kuota Produksi Berita Penugasan Pemerintah Bidang Pers Tahun 2023

Selain itu, LKBN Antara juga akan melengkapi berita PSO dengan format baru yang terdiri dari;

- Anti Hoax* yang bertujuan untuk memerangi disinformasi dalam masyarakat. Produk ini akan masuk dalam kategori *text hardnews*.
- Fokus Berita* yang merupakan produk pemberitaan mendalam dan investigatif yang akan masuk dalam kategori *teks artikel*.
- Podcast* yang merupakan web based talkshow atau program TV yang menyerupai siaran radio, produksi ini akan dimasukkan ke dalam TV Features. Pada 2022, podcast merupakan produk yang didistribusikan melalui siaran radio.

## 4.2. Ruang Lingkup Pemberitaan PSO

Tema pemberitaan untuk penugasan pemerintah akan menyesuaikan dengan Program Prioritas Nasional 2023 yang terdiri dari;

- Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
- Peningkatan kualitas SDM dalam kesehatan dan pendidikan
- Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job
- Mendorong pemulihan dunia usaha
- Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas
- Ekonomi hijau
- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi

### 4.3. Produk dan Saluran Distribusi Berita PSO

Perum LKBN Antara akan mendistribusikan berita-berita PSO melalui saluran-saluran yang bisa digambarkan dalam tabel berikut;

Produk	Saluran Distribusi
a. Teks <i>hardnews</i> , b. teks artikel, c. <i>anti hoax</i> , fokus berita / pempunan / spektrum, dan infografis	a. Portal <i>antaranews.com</i> b. Media sosial (IG,FB,Line) c. RRI d. Radio daerah e. Koran daerah f. Radio Komunitas g. Media luar ruang ( <i>imedia/videotron</i> )
a. <i>TV features</i> b. <i>TV hardnews</i>	a. Media sosial (IG,FB) b. TVRI nasional c. TVRI daerah d. TV swasta daerah
a. Berita foto b. <i>Photo story</i>	a. Portal <i>antaranews.com</i> b. Media sosial (ig,fb) c. Media luar ruang ( <i>imedia/videotron</i> ) d. Pameran Hybrid
Podcast/ <i>Talkshow</i>	a. Portal <i>antaranews.com</i> b. Youtube c. Spotify d. Radio Lokal e. Radio Grup Kompas f. Radio RRI Perbatasan

Tabel 10 Produk dan Saluran Distribusi Berita Penugasan Pemerintah

### 4.4. Hak dan Kewajiban

Pihak Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) berhak menetapkan konstruksi program, mengusulkan agenda setting, memperoleh produk PSO, memberikan tugas kepada LKBN Antara untuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan distribusi produk PSO, serta memberikan teguran jika terjadi penyimpangan.

Sementara itu, kewajiban Kominfo adalah merencanakan pelaksanaan PSO, memberikan kompensasi, melaksanakan verifikasi, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi. Perum LKBN Antara berhak untuk menerima kompensasi atas pelaksanaan PSO berdasarkan hasil verifikasi. Selain itu, perusahaan juga berkewajiban untuk melaksanakan PSO bidang pers sesuai kesepakatan dan konstruksi program, melaksanakan agenda setting, melakukan kerja sama untuk distribusi, melakukan pendampingan saat verifikasi, membukukan anggaran PSO secara terpisah, membuat laporan pertanggung jawaban, mengembalikan kelebihan pembayaran kepada kas negara.

### 4.5. Nilai Perjanjian

Berdasarkan data tahun sebelumnya, nilai perjanjian penugasan PSO bidang pers untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut;

Tahun	Nilai kontrak	Realisasi
2023 (rencana)	172.87	172.87 (di luar PPN)*
2022 (prognosa)	167.43	167.43 (di luar PPN)**
2021	166.16	166.16

Tahun	Nilai kontrak	Realisasi
2020	158.38	151.85
2019	159.07	156.13
2018	160.06	155.93

\*Rp155,7 miliar setelah PPN

\*\*Rp150,9 miliar setelah PPN

#### 4.6. Rencana Pemenuhan Produksi PSO 2023

Berikut adalah rencana pemenuhan produksi berita PSO untuk tahun 2023, per produk yang akan diajukan:

PRODUK	KUOTA	TARGET											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Text hardnews</i>	145,550	14,486	15,116	16,495	17,558	16,242	17,389	17,023	16,872	16,862	19,283	18,367	10,150
Artikel	1,700	96	148	173	187	152	161	229	209	195	301	268	255
<i>Photo hardnews</i>	18,000	903	1,217	1,435	1,385	1,423	1,350	1,322	1,825	2,223	1,943	1,563	1,343
<i>Photo story</i>	45	87	8	7	7	8	9	9	12	10	7	6	0
<i>Video hardnews</i>	7,500	1,074	1,071	1,175	1,125	1,149	1,032	1,193	1,240	1,073	1,080	1,194	1,015
<i>Video features</i>	40	2	2	3	3	4	3	5	4	4	4	4	2
Infografis	150	53	52	60	60	59	54	56	62	83	68	57	54
Podcast	15	35	4	4	3	2	3	6	8	8	8	2	3

#### 4.7. Jangka Waktu

Jangka waktu perjanjian PSO bidang pers akan diperbaharui setiap satu tahun sekali.

#### 4.8. Anggaran, Pendapatan, dan Biaya

Tabel berikut menjabarkan pendapatan dan biaya penugasan pemerintah untuk LKBN Antara;

URAIAN	Prognosa 2022 PSO	RKAP 2023 PSO
<b>PENDAPATAN</b>		
Pendapatan PSO	150,933	155,743
Total Pendapatan	150,933	155,743
<b>BEBAN POKOK</b>		
Beban Pokok PSO	37,709	44,979
Gaji	27,062	28,265
Incentif	3,584	3,563
Tunjangan Tetap	26,870	28,474
Lembur	40	25
Outbound	415	258
Outsource	1,968	1,640
Internet	931	953
Konsultan	1,090	721
Total Beban Pokok	99,670	108,877
<b>Gross Margin</b>	<b>51,263</b>	<b>46,866</b>
<b>BEBAN PEMASARAN</b>		
Beban Pemasaran	--	--
Total Beban Pemasaran	--	--
<b>BEBAN UMUM ADMINISTERASI</b>		
Tunjangan Tidak Tetap	7,716	7,842
Bonus	6,991	6,933
Thr	4,496	4,576
Asuransi	2,805	2,270
Cop	--	--
Komisi	--	--
Pensiun	4,609	3,755
Penghargaan Karyawan	416	305
Pesangon	30	230
Pelatihan	1,249	955
Ibo	105	151
Rekrutasi	49	58
Promosi	124	36
Atk	185	187
Listrik	978	931
Telepon	59	56
Sewa Gedung	1,799	660

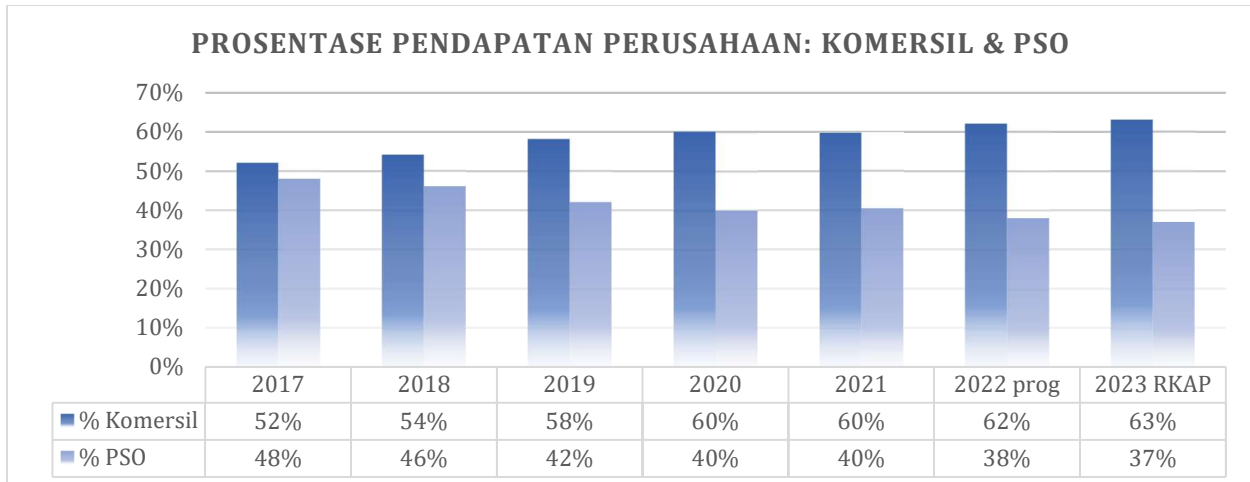


Sewa Alat Kerja	405	416
Perawatan Alat Kerja	1,106	1,073
Air	42	43
Rtk	767	671
Keanggotaan	81	68
Rapat	946	888
Kontribusi Lingkungan	413	374
Buku	75	73
Perijinan	--	--
Materai	14	13
Sppd Non Project	1,848	1,079
Transport	1,239	1,038
Biaya Lainnya	781	646
Biaya Contingency & Lain-lain	--	--
Beban Penyusutan	2,625	1,655
Beban Penyisihan Piutang	--	--
Total Beban Um & Adm	41,952	36,984
Pendapatan (Beban) Lain	--	--
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>9,311</b>	<b>9,882</b>
<b>PAJAK</b>		
Pajak Badan	--	--
<b>LABA SETELAH PAJAK</b>	<b>9,311</b>	<b>9,882</b>

Tabel 11 Anggaran Pendapatan dan Biaya Penugasan Pemerintah (PSO) Kepada Antara 2023

#### 4.9. Gambaran PSO 2022

Sejak tahun 2016, prosentase pendapatan melalui penugasan pemerintah selalu berada di bawah pendapatan melalui usaha komersial. Penurunan ini selaras dengan tujuan perusahaan yang ingin meningkatkan kemandirian keuangan tanpa bergantung kepada pemerintah. Berikut adalah komposisi pendapatan Komersil dan Pendapatan PSO:



Gambar 10 Komposisi Pendapatan PSO dan Komersil

Selain keberhasilan menurunkan prosentasi pendapatan dari penugasan pemerintah, Perum LKBN Antara masih harus menjawab beberapa tantangan terkait pelaksanaan PSO bidang Pers.

Tantangan yang pertama adalah pelaksanaan tanggung jawab pembayaran biaya produksi berita yang selalu terlambat dari jadwal mengingat proses penandatanganan keputusan Menkominfo atas penugasan PSO kepada LKBN Antara maupun perjanjian kerja sama atas pelaksanaan PSO tidak ditandatangani tepat waktu di awal tahun, tetapi lebih sering di atas triwulan satu. Hal ini mengakibatkan sulitnya perusahaan untuk menjaga arus kas agar tetap positif.

Terkait tantangan ini, manajemen Antara telah menetapkan dua strategi utama yaitu, melibatkan Kementerian BUMN untuk melakukan negosiasi perjanjian kerja sama dengan kementerian teknis (Kemenkominfo) dan mengambil *standby loan* kepada bank BUMN. Keterlibatan Kementerian BUMN diharapkan dapat meningkatkan daya tawar perusahaan dalam memastikan ketepatan waktu pembayaran biaya produksi berita PSO, sementara *standby loan* berfungsi untuk menjaga arus kas demi keberlangsungan operasional perusahaan.

Di sisi lain, Perum LKBN Antara juga tengah mengusulkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menyepakati perjanjian dengan jangka waktu lebih dari tahun. Perjanjian *multi-years* akan mengurangi risiko keuangan di LKBN Antara dan secara psikologis menyediakan rasa aman bagi para karyawan. Dengan model ini, perusahaan akan lebih fokus dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang pers – dan memenuhi semua syarat *service level agreement* – tanpa harus disibukkan oleh negosiasi berkepanjangan dengan kementerian teknis.

Sementara itu, tantangan yang kedua adalah risiko fundamental dialihkannya penugasan PSO bidang Pers kepada institusi media non-BUMN. Berbeda dengan penugasan pemerintah untuk beberapa sektor lain, tidak ada kewajiban dalam undang-undang yang mensyaratkan bahwa produksi berita PSO harus dijalankan oleh BUMN. Pihak manajemen sudah mensiasati risiko hilangnya pendapatan PSO ini dengan terus melakukan inovasi produk yang dapat meningkatkan pendapatan komersial – di antaranya adalah penyediaan layanan komunikasi strategis (IMCS dan layanan data keuangan).

Tantangan yang terakhir adalah pemenuhan target produksi berita PSO di masa pandemi Covid-19. Pandemi telah membuat pelaksanaan produksi dan distribusi produk PSO pada tahun 2021 tidak berjalan maksimal mengingat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar membuat ruang gerak wartawan menjadi terbatas dalam melakukan peliputan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Perum LKBN Antara telah mengajukan usulan penyesuaian jumlah kuota sesuai dengan kemampuan maksimal para jurnalis dalam melakukan peliputan. Usulan penyesuaian ini telah diajukan kepada kementerian teknis dengan dibantu oleh Kementerian BUMN.

#### 4.10. Gambaran PSO 2023

Tahun 2023, Tema yang menjadi dasar untuk membuat berita PSO adalah ***Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi*** yang inklusif dan berkelanjutan.

#### 4.11. Penambahan Beban Pajak

Pemerintah pada Tahun 2022 menerapkan Peraturan Pemerintah terkait Pajak yang dapat mempengaruhi pendapatan PSO dikarenakan adanya pajak yang harus dibayarkan oleh Perum LKBN Antara. Peraturan dan Undang-undang dimaksud adalah dari Kementerian Keuangan dengan nomor: 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan UU Nomor: 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

#### 4.12. Evaluasi Mandiri atas Tata Kelola Penugasan Kewajiban PSO Tahun 2021

Pada tahun 2021, Perum LKBN Antara melakukan pelaksanaan evaluasi secara mandiri atau self assessment atas penerapan tata kelola penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) Bidang Pers untuk Tahun Anggaran 2021. Dimana ruang lingkup evaluasi secara mandiri meliputi aspek-aspek dalam rangkaian proses bisnis pelaksanaan PSO Bidang Pers oleh Perum LKBN Antara, mulai dari legalitas hingga monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Tujuan evaluasi secara mandiri atas penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers adalah:

1. Mengukur kualitas penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers oleh Perum LKBN Antara melalui penilaian atau evaluasi berdasar kriteria pemenuhan target atas setiap komponen proses bisnis PSO Bidang Pers, dengan dengan pemberian skor atau nilai.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers oleh Perum LKBN Antara, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan.
3. Memonitor konsistensi penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers oleh Perum LKBN Antara, dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers.

Evaluasi secara mandiri dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari. Pelaksanaan evaluasi secara mandiri dilakukan sebagai penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers ini yang merupakan bagian dari proses implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dan berkelanjutan di Perum LKBN Antara, sehingga hasil evaluasi secara mandiri ini sekaligus merupakan penilaian atas kemajuan pelaksanaan GCG perusahaan sampai saat ini.

Aspek pengujian dalam evaluasi secara mandiri atas penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers, meliputi:

1. Legal
2. Pemenuhan Produk
3. Pemenuhan Distribusi mencakup : (a) Kuantitas, (b) Ketepatan waktu pelaksanaan
4. Pelaporan
5. Keuangan dan Perpajakan
6. Pengawasan Internal

Berdasarkan hasil evaluasi secara mandiri (self assessment) atas penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers oleh Perum LKBN Antara Tahun 2021, mencapai skor 88,75%, dengan pemberian bobot pada masing-masing indikator seperti tertera pada Tabel 2. Angka tersebut menunjukkan

bahwa penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers oleh Perum LKBN Antara Tahun 2021, mencapai kualifikasi **SANGAT BAIK**.

Hasil evaluasi secara mandiri atas penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers oleh Perum LKBN Antara Tahun 2021 dapat dikhtisarkan sebagai berikut:

No	Indikator	Bobot	Capaian	Skor (%)
1	Legal	15	0.97	14.58
2	Pemenuhan Produksi PSO	20	1.01	20.18
3	Pemenuhan Distribusi PSO	20	0.96	19.23
4	Pelaporan	15	0.75	11.22
5	Keuangan dan Perpajakan	15	0.99	14.92
6	Pengawasan Internal	15	0.58	8.63
Total		100		88.75
Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG		Sangat Baik		

Gambar 9 Hasil Evaluasi Mandiri Penerapan Tata Kelola PSO

Hasil evaluasi secara mandiri yang diuraikan untuk setiap aspek pengujian sebagai berikut:

### 1. Aspek Legal

Berdasar hasil evaluasi secara mandiri yang telah dilakukan pada aspek legal terhadap penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers, skor yang dicapai adalah 0,97 dari bobot sebesar 15 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 97%. Angka tersebut berarti secara umum penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers, mencapai kualifikasi SANGAT BAIK.

Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa praktik yang telah berjalan baik, yaitu:

- Penerbitan Buku Panduan PSO 2021
- Sosialisasi Produksi PSO di dewan redaksi pusat dan daerah
- Ketepatan Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (PKS) pelaksanaan PSO 2021

Sedangkan untuk Ketersediaan Landasan Hukum untuk Pelaksanaan PSO yakni Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, masih memerlukan perhatian dan komitmen bersama antarpemangku kepentingan yakni Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Perum LKBN Antara, agar Kepmen dapat diterbitkan di awal tahun atau maksimal pada bulan Maret tahun berjalan. Dengan begitu, seluruh kegiatan penugasan PSO Bidang Pers dapat berjalan optimal dan serapan anggaran menjadi maksimal.

### 2. Aspek Pemenuhan Produk PSO

Berdasar hasil evaluasi secara mandiri yang telah dilakukan pada aspek pemenuhan produk PSO 2021 terhadap penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers, skor yang dicapai adalah 1,01 dari bobot sebesar 20 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 100%. Angka tersebut berarti secara umum penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers, mencapai kualifikasi SANGAT BAIK.

Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa praktik yang telah berjalan baik, yaitu:

- Produksi telah berjalan sejak awal tahun
- Tingkat ketidakkelolosan produk dalam proses verifikasi sekitar 5 (lima) persen
- Kualitas produk semakin baik, ditandai dengan tingkat kelolosan dalam proses verifikasi yang rata-rata mencapai 95-100 persen.

Meski demikian, ketersediaan payung hukum/legalitas menjelang pertengahan tahun, membuat tim produksi Perum LKBN Antara harus beberapa kali mengajukan penyesuaian jumlah kuota produk yang dihasilkan per bulan.

### 3. Aspek Pemenuhan Distribusi PSO

Berdasar hasil evaluasi secara mandiri yang telah dilakukan pada aspek pemenuhan distribusi PSO terhadap penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers 2021, skor yang dicapai adalah 0,96 dari bobot sebesar 20 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 96%. Angka tersebut berarti secara umum penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers, mencapai kualifikasi SANGAT BAIK.

Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa praktik yang telah berjalan baik, yaitu:

- a. Jumlah produk yang didistribusikan atau diseminasi sesuai target
- b. Jumlah kanal distribusi yang digunakan, sesuai target

Meski demikian ada 2 (dua) hal yang perlu mendapat perhatian, yakni:

1. Kanal distribusi yang tidak sesuai target yakni stasiun TV swasta daerah untuk distribusi video hardnews, dari target 50, hanya tercapai 49 stasiun TV swasta.
2. Beberapa stasiun TV swasta tidak sesuai awal waktu kerja sama yang disepakati, yakni per bulan Juli pada tahun berjalan. Kondisi itu dikarenakan beberapa stasiun TV swasta yang mati suri atau tidak operasional, dan putus ditengah jalan akibat pandemi COVID-19.

### 4. Aspek Pelaporan

Berdasar hasil evaluasi secara mandiri yang telah dilakukan pada aspek pemenuhan distribusi PSO terhadap penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers 2021, skor yang dicapai adalah 0,75 dari bobot sebesar 11 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 75%. Angka tersebut berarti secara umum penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers, mencapai kualifikasi CUKUP BAIK.

Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa praktik yang berjalan kurang baik, yaitu:

- a. Pelaporan Triwulan yang tidak sesuai/terlambat dari kerangka waktu yang ditetapkan
- b. Tidak ada kegiatan monitoring dan evaluasi baik secara on desk maupun on site

Meski demikian ada beberapa hal yang telah dijalankan dengan baik yakni Laporan Tahunan dan ketepatan proses pencairan.

### 5. Aspek Keuangan dan Perpajakan

Berdasar hasil evaluasi secara mandiri yang telah dilakukan pada aspek pemenuhan distribusi PSO terhadap penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers 2021, skor yang dicapai adalah 0,99 dari bobot sebesar 15 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 99%. Angka tersebut berarti secara umum penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers, mencapai kualifikasi SANGAT BAIK.

Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa praktik yang berjalan baik, yaitu:

- a. Proses penagihan atas pencairan PSO yang sesuai kerangka waktu
- b. Ketersediaan bukti potong PPh 23

### 6. Aspek Pengawasan Internal

Berdasar hasil evaluasi secara mandiri yang telah dilakukan pada aspek pengawasan internal terhadap penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers 2021, skor yang dicapai adalah 0,58 dari bobot sebesar 15 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 58%. Angka tersebut berarti secara umum penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers, mencapai kualifikasi KURANG BAIK.

Hal tersebut dikarenakan selama pelaksanaan PSO 2021 tidak dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Dari hasil self asesmen di atas dapat disampaikan sebagai berikut:

## 1. Legalitas Penugasan PSO Bidang Pers

Perlu kajian bersama oleh seluruh pemangku kepentingan yakni Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Kominfo dan Perum LKBN ANTARA, untuk memberikan kesepahaman bersama tentang apa itu PSO Bidang Pers dan mengapa PSO Bidang Pers diberikan kepada Perum LKBN ANTARA. Kesamaan paham terhadap legalitas penugasan PSO Bidang Pers mendorong proses bisnis pelaksanaan PSO Bidang Pers yang lebih efektif dan efisien, mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Sehingga kegiatan penugasan PSO Bidang Pers kepada Perum LKBN ANTARA dapat dilaksanakan paling lambat Maret setiap tahunnya.

## 2. Produksi

Kegiatan produksi yang telah dilakukan sejak awal tahun, dapat didukung optimal dengan Keputusan Menteri Kominfo yang lebih awal diterbitkan, beserta tim Agenda Setting yang ditetapkan di awal tahun, sehingga penyesuaian kuota per tema dan bidang tidak menumpuk di pertengahan tahun. Definisi kerangka waktu dan syarat yang jelas, kapan dan bagaimana suatu produk baru dapat diajukan sebagai bagian dari produk PSO. Sehingga produk baru yang diajukan tetap relevan dengan tren media massa, ketika disetujui.

## 3. Distribusi

Definisi yang jelas tentang masing-masing kanal distribusi yang digunakan. Semisal, definisi stasiun TV lokal untuk distribusi PSO Bidang Pers. Apakah TV swasta lokal konvensional, atau dapat digantikan dengan TV kabel, TV online, mengingat tidak semua provinsi memiliki TV swasta lokal konvensional. Dan banyak pula TV swasta lokal konvensional, yang tidak lagi beroperasi pasca 2 (tahun) pandemi. Sehingga perlu dipertimbangkan memasukkan TV kabel/TV online sebagai alternatif bagi distribusi produk video hardnews dan video feature dalam penugasan PSO mendatang.

## 4. Monitoring dan Evaluasi

- a. Tahap perencanaan penyusunan kajian yang didukung kajian dari pihak eksternal/konsultan independen.
- b. Melaksanakan audit internal.
- c. Perlu indikator yang jelas tentang capaian produksi dan distribusi PSO, sehingga memiliki standar/ukuran yang sama, untuk digunakan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PSO Bidang Pers
- d. Bukti tayang, baik media cetak maupun media elektronik dapat disampaikan dalam bentuk digital, melalui 1 (satu) sistem pusat data yang dapat diakses setiap saat oleh tim Kementerian Kominfo dan Perum LKBN ANTARA, sehingga lebih efektif dan efisien.

## 5. Mekanisme Tindak Lanjut

Mekanisme yang dirancang bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Kominfo, dan Perum LKBN ANTARA untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Inspektorat Kominfo, terkait pelaksanaan penugasan PSO Bidang Pers kepada Perum LKBN ANTARA

## 6. Payung Hukum Penugasan PSO Bidang Pers

- a. Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) kepada Perum LKBN Antara Tahun Anggaran 2021, masih menghadapi tantangan berupa penetapan payung hukum bagi penugasan tersebut kepada Perum LKBN Antara.
- b. Penugasan PSO untuk informasi publik bidang pers kepada Antara selalu dimulai pada pertengahan tahun, karena dasar penugasaan yang memayungi penugasan itu yakni Keputusan Menteri Kominfo, baru diterbitkan pada Mei setiap tahun berjalan.

- c. Dalam rapat yang dihadiri seluruh perwakilan pemangku kepentingan, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kementerian BUMN dan BUMN operator yakni Perum LKBN Antara, sempat disampaikan agar dasar hukum penugasan PSO untuk informasi publik bidang pers kepada Perum LKBN Antara berupa Peraturan Presiden (Perpres) untuk menyederhanakan birokrasi dalam mekanisme penugasan PSO. Kementerian Kominfo dalam pembahasan internal menyampaikan wacana Keputusan Menteri Kominfo yang bersifat multiyears, sehingga siapa pun yang memangku jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, penugasan dapat otomatis langsung berjalan di awal tahun berjalan. Namun, hingga kini Kementerian Kominfo masih berpegang pada Keputusan Menteri Kominfo yang bersifat tahunan.
- d. Keputusan Menteri Kominfo yang baru terbit pada setiap pertengahan tahun mengakibatkan produksi dan diseminasi produk PSO menjadi berat. Produksi dan distribusi PSO yang idealnya dilakukan dari awal tahun, baru dapat dilaksanakan pertengahan tahun, dengan serapan optimal layaknya kegiatan dimulai sejak awal tahun (berlaku surut). Akibatnya, produksi harus melakukan penyesuaian kuota setiap bulan, dan diseminasi dilakukan dengan agak “terburu” mengejar target serapan optimal dalam 6 (enam) bulan.
- e. Akibat kegiatan yang baru dilakukan pada pertengahan tahun, alokasi sumber daya manusia juga disesuaikan untuk mencapai target produksi dan distribusi yang optimal.

## 7. Skema Produksi

- a. Produksi PSO 2021 telah dilaksanakan sejak Januari 2021 dengan dasar Rencana Kerja Pemerintah 2021 yang dijabarkan dalam tema dan kisi-kisi dalam Buku Panduan PSO 2021. Namun, karena dasar hukum penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) 2021 yakni Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI baru terbit pada Mei 2021 dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang PSO baru ditandatangani pada Juni 2021, maka komposisi tema dan bidang dalam produk PSO 2021 baru dilakukan di pertengahan tahun. Akibatnya, tim produksi harus menyesuaikan kembali kuota yang harus dipenuhi sesuai PKS PSO 2021 sejak pertengahan tahun.
- b. Penyesuaian kuota produksi tersebut terjadi 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali, baik penyesuaian kuota produksi untuk tim redaksi di pusat maupun biro daerah. Target kuota yang harus dipenuhi akhirnya menumpuk di pertengahan Juni hingga pekan ketiga Desember 2021, dan menjadi beban bagi tim produksi, mengingat kuota yang idealnya dipenuhi sejak awal tahun, menumpuk dan harus dipenuhi mulai pertengahan tahun.
- c. Beban kinerja produksi yang menumpuk pada pertengahan tahun, baik menyangkut kuota secara keseluruhan maupun kuota per tema, berdampak bagi alokasi sumber daya manusia, baik di pusat dan daerah.
- d. Terkait legalitas penugasan PSO yang baru terbit di pertengahan tahun, produk video feature yang telah diproduksi sejak awal tahun, akan menjadi tidak relevan/aktual jika didistribusikan mulai pertengahan tahun.

## 8. Skema Distribusi

- a. Pandemi yang telah terjadi selama 2 (dua) tahun, mengakibatkan beberapa media di daerah, baik media cetak maupun media televisi, tidak mampu beroperasi. Akibatnya ada mitra distribusi yang mulai bergabung pada Agustus 2021 atau jika sudah menjalankan kewajiban sebagai mitra distribusi PSO Bidang Pers Perum LKBN Antara, mitra berhenti di tengah perjanjian. Ini tentu berdampak pada pencapaian jumlah mitra distribusi yang ditetapkan dalam konstruksi program, dan serapan anggaran distribusi PSO 2021.
- b. Tidak semua provinsi memiliki stasiun TV konvensional. Beberapa TV konvensional tidak beroperasi akibat pandemi. Aceh dan Papua adalah 2 (dua) dari beberapa provinsi yang tidak



memiliki stasiun TV konvensional. Sulawesi Selatan adalah salah satu dari provinsi yang beberapa stasiun TV konvensionalnya mati suri, atau sama sekali tidak beroperasi. Kondisi tersebut mengakibatkan hanya 49 stasiun TV swasta lokal untuk distribusi video hardnews, dari target 50 stasiun TV swasta daerah dengan tambahan memasukkan TV kabel.

## **9. Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) atas pelaksanaan PSO Bidang Pers Tahun Anggaran 2021, tidak dilakukan secara fisik mengingat kepadatan kegiatan di Kementerian Koinfo terkait agenda nasional seperti PON XX Papua, Peparnas, persiapan Presidensi G20, dan keterbatasan ruang gerak akibat pandemi. Monev dilakukan melalui data dukung terkait produksi dan distribusi yang dilaksanakan dalam PSO 2021.



## BAB IV ANGGARAN PERUSAHAAN

### 1. Gambaran Umum Laba/Rugi Usaha

*Dalam juta rupiah*

No	ITEM	Audited	2022 (Prognosa)		2023 RKAP	
		2021	Nilai	Growth	Nilai	Growth
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN USAHA</b>	<b>411,390</b>	<b>400,538</b>	<b>-2.64%</b>	<b>435,540</b>	<b>8.74%</b>
2	Pendapatan PSO	166,152	150,934	-9.16%	155,743	3.19%
3	Pendapatan Komersial	238,460	243,869	2.27%	267,912	9.86%
4	Pendapatan IMQ	6,778	5,735	-15.38%	-	-100%
5	Pendapatan Antara-ETP	-	-		11,885	100%
<b>6</b>	<b>BEBAN POKOK USAHA</b>	<b>(289,170)</b>	<b>(279,975)</b>	<b>3.18%</b>	<b>(304,067)</b>	<b>-8.61%</b>
<b>11</b>	<b>LABA BRUTO</b>	<b>122,220</b>	<b>120,563</b>	<b>-1,36%</b>	<b>131,473</b>	<b>9.05%</b>
12	Beban Penjualan	(492)	(907)	-84.50%	(628)	30.74%
13	Beban Administrasi dan Umum	(101,949)	(98,689)	2.28%	(95,232)	-4.41%
14	Penghasilan (Beban) Lain-lain Bersih	5,685	142,054	2398.70%	(6,769)	-104.76%
<b>15</b>	<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>25,464</b>	<b>162,087</b>	<b>536.54%</b>	<b>28,845</b>	<b>-82.20%</b>
16	Beban Pajak Penghasilan	(8,670)	(35,659)	-311.30%	(6,346)	-82.20%
<b>17</b>	<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>16,794</b>	<b>126,428</b>	<b>652.81%</b>	<b>22,499</b>	<b>-82.20%</b>

#### Catatan

- a. Growth Pendapatan PSO di tahun 2022 menurun dibandingkan Audited 2021 akibat perubahan peraturan perpajakan (UU HPP)
- b. Growth Pendapatan IMQ di tahun 2022 negative akibat rencana perubahan menjadi Antara-ETP, Operasional IMQ tercatat hanya sampai bulan September 2022 sehingga tidak bisa membuat kesepakatan bisnis baru sampai bulan Desember 2022
- c. Growth Beban Pajak Penghasilan tahun 2022 menurun akibat perubahan tarif pajak dan pajak atas penjualan dan pembelian gedung
- d. Penghasilan lain-lain meningkat di tahun 2022 akibat diterimanya hasil Penjualan Gedung Wisma Antara
- e. Pendapatan Usaha (Prognosa Tahun 2022) diluar Hasil Penjualan Gedung Wisma Antara adalah sebesar Rp17 Miliar
- f. GPM RKAP 2023 secara Keseluruhan adalah 30%, dengan rincian GPM PSO 31%, GPM Komersial 29% dan GPM A-ETP sebesar 41%
- g. Pertumbuhan beban pokok komersil lebih tinggi dibanding pertumbuhan pendapatan komersil untuk mengantisipasi turunnya nilai rupiah pada tahun 2023 akibat resesi – mengingat sebagian besar beban Divisi Layanan Data dan Penjualan harus dibeli melalui dolar Amerika Serikat.

## 2. Anggaran Pendapatan Usaha

(dalam juta rupiah)

No	Nama Akun	Audited 2021	2022 (Prognosa)	RKAP 2023	%
1	Pendapatan Pso	166,152	150,933	155,743	3.19%
2	Pendapatan Komersil	238,460	243,869	267,912	9.86%
3	Pendapatan Imq	6,778	5,735	--	-100%
4	Pendapatan ETP	--	--	11,885	100%
	<b>Total</b>	<b>411,390</b>	<b>400,538</b>	<b>435,540</b>	<b>8,74%</b>

Tabel 12 Anggaran pendapatan 2023

No	Nama Unit	Audited 2021	2022 (Prognosa)	RKAP 2023	%
1	Dept. Kerjasama Operasi Reuters	13,879	12,760	14,459	13.31%
2	Dept. Kejasama Operasi Bloomberg	138,443	144,801	152,765	5.50%
3	Dept. Data Dan Informasi Finansial	2,348	2,013	2,416	20.00%
4	Dept. Kerjasama Dan Konten	30,082	30,722	29,661	-3.45%
5	Dept. Layanan Media Dan Distribusi	15,113	15,880	18,747	18.05%
6	Dept. Layanan Komunikasi	15,507	16,926	17,416	2.90%
7	Dept. Lembaga Pendidikan Antara	1,336	1,224	1,530	25.00%
8	Dept. Auditorium Adhiyana	392	518	--	-100.00%
9	Divisi Antara Digital Media		--	10,943	
10	Biro Maluku	258	292	307	5.00%
11	Biro Nangroe Aceh Darusalam	695	755	793	5.00%
12	Biro Lampung	481	532	559	5.00%
13	Biro Jawa Barat	677	712	748	5.00%
14	Biro Bangka Belitung	632	680	714	5.00%
15	Biro Kalimantan Selatan	1,793	1,891	1,985	5.00%
16	Biro Kepulauan Riau	163	174	183	5.01%
17	Biro Bengkulu	142	166	175	5.00%
18	Biro Bali	467	503	529	5.00%
19	Biro Gorontalo	364	417	438	5.00%
20	Biro Jambi	289	361	379	5.00%
21	Biro Papua	291	313	328	5.00%
22	Biro Sulawesi Tenggara	189	211	222	5.01%
23	Biro Nusa Tenggara Timur	128	138	145	5.00%
24	Biro Sulawesi Selatan	427	481	505	5.00%
25	Biro Sulawesi Utara	111	127	133	5.00%
26	Biro Nusa Tenggara Barat	56	518	544	5.00%
27	Biro Sumatera Utara	690	782	821	5.00%
28	Biro Sumatera Barat	556	603	633	5.00%
29	Biro Kalimantan Tengah	2,451	2,615	2,746	5.00%
30	Biro Sumatera Selatan	285	422	444	5.00%
31	Biro Sulawesi Tengah	414	467	491	5.00%
32	Biro Riau	609	635	667	5.00%

No	Nama Unit	Audited 2021	2022 (Prognosa)	RKAP 2023	%
33	Biro Kalimantan Barat	354	388	408	5.00%
34	Biro Kalimantan Timur	475	524	551	5.00%
35	Biro Jawa Tengah	639	667	701	5.00%
36	Biro Jawa Timur	1,540	1,620	1,701	5.00%
37	Biro Maluku Utara	2	2	2	5.15%
38	Biro Yogyakarta	70	78	82	5.01%
39	Biro Penyangga Jakarta	1,078	1,129	1,185	5.00%
40	Biro Banten	345	381	400	5.00%
41	Biro Kalimantan Utara	249	291	305	5.00%
42	Biro Papua Barat	123	147	154	5.00%
43	Koordinator Pso	172,632	150,933	155,743	3.19%
44	Pt Imq	4,618	5,735	--	-100.00%
45	Ad Hoc Pre-Opening Electronic Trading Process (Etp)	--	--	11,885	
	<b>TOTAL</b>	<b>411,390</b>	<b>400,538</b>	<b>435,540</b>	<b>8,74%</b>

Tabel 13 Rincian Anggaran Pendapatan 2023

### 3. Anggaran Biaya Usaha

(dalam juta rupiah)

No	Nama Unit	Audited 2021	2022 (Prognosa)	RKAP 2023	%
1	Divisi Layanan Data	349	670	761	13.71%
2	Dept. Kerjasama Operasi Reuters	7,907	8,204	8,778	7.00%
3	Dept. Kejasama Operasi Bloomberg	101,710	102,911	108,629	5.56%
4	Dept. Data Dan Informasi Finansial	1,683	1,658	1,803	8.78%
5	Divisi Layanan Media Dan Komunikasi	816	1,466	1,733	18.14%
6	Dept. Kerjasama Dan Konten	8,756	9,894	8,317	-15.94%
7	Dept. Layanan Media Dan Distribusi	5,721	4,898	5,199	6.13%
8	Dept. Layanan Komunikasi	5,999	5,703	8,333	46.10%
9	Dept. Auditorium Adhiyana	1,570	1,544	1,053	-31.80%
10	Dept. Lembaga Pendidikan Antara	2,181	1,383	1,441	4.23%
11	Divisi Antara Digital Media	--	--	10,937	100%
12	Dewan Pengawas	2,378	3,170	3,578	12.86%
13	Komite Audit	417	468	559	19.55%
14	Direksi	9,258	9,090	9,340	2.75%
15	Divisi Manajemen Strategis & Riset Perusahaan	649	642	707	10.07%
16	Dept. Perencanaan Strategis Dan Manajemen Kinerja	624	436	514	18.08%
17	Dept. Riset Dan Pengembangan Data Informasi Perusahaan	933	1,060	1,161	9.49%
18	Satuan Pengawasan Internal	293	351	396	12.75%
19	Inspektorat Utama Pusat	347	341	375	10.09%
20	Inspektorat Utama Kewilayahan Dan Gcg	663	656	718	9.47%
21	Sekretariat Perusahaan	1,398	771	861	11.58%

No	Nama Unit	Audited 2021	2022 (Prognosa)	RKAP 2023	%
22	Dept. Hukum Dan Administrasi Perusahaan	946	967	1,085	12.23%
23	Dept. Humas Dan Kermitraan	1,234	1,545	1,396	-9.61%
24	Divisi Teknologi Informasi	445	1,076	665	-38.23%
25	Dept. Sistem Informasi	952	853	1,038	21.73%
26	Dept. Teknik Umum	4,261	4,507	4,975	10.39%
27	Dept. Jaringan Dan Infrastruktur	2,940	3,320	4,083	22.97%
28	Dept. Program Dan Kemitraan	100	522	691	32.36%
29	Koordinator Pso	2,296	2,786	2,957	6.12%
30	Direktorat Pemberitaan	130,473	91,814	78,055	-14.98%
31	Divisi Manajemen Sdm Dan Umum	1,873	1,659	1,785	7.55%
32	Dept. Manajemen Sdm	33,733	29,129	33,743	15.84%
33	Dept. Pengadaan Dan Umum	16,537	17,132	13,395	-21.81%
34	Dept. Pengembangan Sdm	75	3,536	4,210	19.07%
35	Divisi Keuangan	708	732	790	7.84%
36	Dept. Anggaran, Akuntansi Dan Aset	4,400	19,606	14,256	-27.28%
37	Dept. Treasury, Perpajakan Dan Piutang	4,578	1,409	1,613	14.49%
38	Biro Maluku	614	753	779	3.45%
39	Biro Nangroe Aceh Darusalam	1,046	1,297	1,407	8.52%
40	Biro Lampung	1,207	1,292	1,337	3.46%
41	Biro Jawa Barat	1,456	1,896	2,016	6.34%
42	Biro Bangka Belitung	872	1,046	1,151	10.04%
43	Biro Kalimantan Selatan	1,805	1,803	1,933	7.21%
44	Biro Kepulauan Riau	666	705	747	5.93%
45	Biro Bengkulu	457	523	569	8.66%
46	Biro Bali	1,046	1,298	1,436	10.59%
47	Biro Gorontalo	661	704	727	3.21%
48	Biro Jambi	725	1,010	1,083	7.29%
49	Biro Papua	986	1,011	1,088	7.61%
50	Biro Sulawesi Tenggara	634	730	789	8.12%
51	Biro Nusa Tenggara Timur	573	778	866	11.36%
52	Biro Sulawesi Selatan	1,291	1,578	1,765	11.86%
53	Biro Sulawesi Utara	548	699	745	6.53%
54	Biro Nusa Tenggara Barat	592	990	1,108	12.00%
55	Biro Sumatera Utara	1,457	1,437	1,562	8.67%
56	Biro Sumatera Barat	1,280	1,799	1,926	7.08%
57	Biro Kalimantan Tengah	2,107	1,951	2,149	10.17%
58	Biro Sumatera Selatan	839	1,062	1,150	8.28%
59	Biro Sulawesi Tengah	681	735	780	6.20%
60	Biro Riau	922	1,019	1,128	10.69%
61	Biro Kalimantan Barat	906	1,185	1,292	9.08%
62	Biro Kalimantan Timur	711	904	960	6.23%
63	Biro Jawa Tengah	2,605	3,206	3,459	7.89%

No	Nama Unit	Audited 2021	2022 (Prognosa)	RKAP 2023	%
64	Biro Jawa Timur	3,426	3,960	4,130	4.29%
65	Biro Maluku Utara	94	190	205	7.99%
66	Biro Yogyakarta	1,166	1,398	1,440	2.96%
67	Biro Penyangga Jakarta	1,332	1,547	1,735	12.11%
68	Biro Banten	787	1,167	1,277	9.44%
69	Biro Kalimantan Utara	593	587	645	9.97%
70	Biro Papua Barat	399	439	532	21.30%
71	Biro Luar Negeri	1,713	1,721	1,711	-0.57%
72	Treasury	--	350	--	-100%
73	Ad Hoc Rakor Direktorat Utama	267	--	--	
74	Ad Hoc Kurator	26	68	72	5.03%
75	Ad Hoc Koordinator Biro Provinsi (Korbi)	--	4	4	5.26%
76	Ad Hoc Pre-Opening Electronic Trading Process (Etp)	156	2,828	--	-100%
77	Ad Hoc Fkap	16	62	66	5.01%
78	Ad Hoc Panhut Antara	403	1,253	1,000	-20.19%
79	Ad Hoc Hari Pers Nasional (Hpn)	--	--	--	
80	Ad Hoc Gugus Tugas Covid-19	167	552	580	5.00%
81	Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan	155	187	500	166.78%
82	Ad Hoc Hari Kartini	97	--	--	
83	Ad Hoc Pekan Olahraga Nasional (Pon)	5,196	--	--	
84	Direktorat Komersial Dan Pengembangan Bisnis	396	574	757	31.84%
85	Ad Hoc Penjualan dan Pembelian Gedung	--	--	--	
86	PT IMQ	25,851	25,665	--	-100%
87	Pt Aetp	--	--	8,885	
88	Eliminasi	(31,140)	(31,890)	--	-100%
	<b>Total</b>	<b>389,757</b>	<b>279,974</b>	<b>304,067</b>	<b>8,61%</b>

Tabel 14 Anggaran biaya usaha 2022

#### 4. Anggaran Pendapatan dan Biaya Lainnya

(dalam juta rupiah)

No	Nama Akun	Audited 2021	2022 (Prognosa)	RKAP 2023	%
1	Pendapatan Bunga Bank	984	607	618	2%
2	Pendapatan Lainnya	4,020	150,389	963	-99%
3	Bagian Laba (Rugi) Bersih Anak Perusahaan	3,455	357	375	5%
4	Pendapatan Cadangan Pemulihan Piutang	1,993	78	88	12%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,451</b>	<b>151,431</b>	<b>2,044</b>	<b>-99%</b>

Tabel 15 Anggaran Pendapatan Lainnya 2023

No	Nama Akun	Audited 2021	2022 (Prognosa)	RKAP 2023	%
1	Administrasi Bank	532	439	451	2,63%
2	Bunga Pinjaman	1,322	1,516	6,395	321,76%
3	Beban Lainnya	2,912	7,422	1,967	-73,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>4,766</b>	<b>9,377</b>	<b>8,812</b>	<b>-6,02%</b>

Tabel 16 Anggaran Biaya Lainnya 2023

## 5. Anggaran Investasi dan Pengembangan

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	Prognosa 2022
1	Peralatan Kantor	1,433
2	Aplikasi	938
3	Pembelian Server	3,500
4	Renovasi Biro Daerah	2,000
5	Pembelian Lahan Pasar Baru No. 55	22,000
6	Pembelian Gedung PANN	57,529
	<b>TOTAL</b>	<b>87,400</b>

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	RKAP 2023
1	Pembangunan komplek ANTARA Pasar Baru	75,000
2	Renovasi Wisma ANTARA-B (Ex-Gedung PANN)	24,000
3	Renovasi Aset (ex-Gedung PNRI)	4,000
4	Pembangunan kantor Biro Kaltara	1,000
5	Pengadaan Meubelair di Wisma ANTARA-B	1,000
6	Renovasi Bangunan & Prasarana Biro lainnya	1,000
7	Peralatan kantor	3,000
8	Kendaraan	2,500
9	Pembelian Tanah dan Bangunan PNRI	16,000
	<b>TOTAL</b>	<b>127,500</b>

Tabel 17 Anggaran Investasi dan Pengembangan 2023

Sesuai Surat Menteri BUMN No. S-792/MBU/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 atas usulan investasi diluar RKAP 2022, terdapat *carry-over* Capex yang belum terealisasi sebesar Rp 25,9 Miliar atas Renovasi sebesar Rp 9 Miliar (masuk ke dalam poin 2 dan 3) serta Pengadaan Tanah dan Bangunan PNRI (poin 9).

## 6. Anggaran Sumber Daya Manusia

(dalam juta rupiah)

No	Nama Akun	Audited 2021	2022 (Prognosa)	RKAP 2023	%
1	Gaji	31,913	44,137	51,464	15,60%
2	Incentif	4,344	5,674	5,533	-2,48%
3	Bonus	5,698	10,973	11,110	1,24%
4	Thr	6,917	6,918	6,914	-0,05%
5	Tunjangan Tetap	28,222	38,191	41,069	7,53%
6	Asuransi	5,639	8,260	8,446	2,26%
7	Lembur	91	117	99	-15,93%
8	Pensiun	12,616	14,486	14,577	0,62%
9	Penghargaan Karyawan	272	1,272	1,184	-6,93
10	Pesangon	91	91	894	878,44%
11	Pelatihan	2,482	3,466	3,707	6,97%
12	Outbound	259	1,259	1,000	-20,57%
13	IBO	316	320	586	83,08%
14	Rekrutasi	152	152	225	47,69%
15	Promosi	348	381	139	-63,44%
16	Tunjangan Tidak Tetap	8,446	12,231	12,978	6,11%
	<b>TOTAL</b>	<b>107,808</b>	<b>147,929</b>	<b>159,925</b>	<b>8,11%</b>

Tabel 18 Anggaran Sumber Daya Manusia 2022

Anggaran tantiem dan jasa produksi masuk di dalam akun bonus (poin 3), dimana tantiem pada 2023 dianggarkan sebesar Rp 1,83 M atau meningkat 5% dari tahun 2022 (tantiem tahun 2022 sebesar Rp 1,74 M berdasarkan surat Menteri BUMN No. SR-105/Wk2.MBU.C/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Tahun 2022)

Adapun anggaran jasa produksi tahun 2023 adalah sebesar Rp 9,28 M (dengan pembagian adalah Induk Rp 8,95 M dan Anak Usaha Rp 317,75 M) meningkat 5% dari tahun 2022 (Jasa Produksi 2022 sebesar Rp 8,81 M)

## 7. Anggaran Teknologi Informasi

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	RKAP 2023
1	Peralatan kantor	3,000
2		

<b>TOTAL</b>	<b>3,000</b>
--------------	--------------

Tabel 19 Anggaran Teknologi Informasi 2022

## 8. Anggaran Penelitian dan Pengembangan

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	Audited 2021	2022 (Prognosa)	RKAP 2023	%
1	18 komponen Biaya SDM	107,808	147,929	159,925	8,11%
2	18 komponen Biaya SDM dikurangi Pelatihan, Outbound dan IBO	104,751	142,884	154,631	8,22%
3	Biaya RnD	3,057	5,045	5,293	4,93%
4	% Biaya RnD	3%	4%	3%	-1%
5	Rincian Biaya RnD				
	a. Biaya Pelatihan	2,482	3,466	3,707	6,97%
	b. Biaya Outbound	259	1,259	1000	-20,57%
	c. Biaya IBO	316	320	586	83,08%
	Jumlah Biaya RnD	3,057	5,045	5,293	4,93%

Tabel 20 Anggaran Penelitian dan Pengembangan 2022

## 9. Rencana Pemenuhan TKDN

Uraian	RKAP 2023		
	TKDN	Non TKDN	Jumlah
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan PSO	--	155,742,600,000	155,742,600,000
Pendapatan Komersil	--	267,912,525,000	267,912,525,000
Pendapatan ETP	--	11,885,064,000	11,885,064,000
<b>Total Pendapatan</b>	--	435,540,189,000	435,540,189,000
<b>BEBAN POKOK</b>			
Beban Pokok PSO	26,988,192,000	17,992,128,000	44,980,320,000
Beban Pokok Komersil		145,467,240,000	145,467,240,000
Beban Pokok ETP		--	--
Gaji		51,463,578,000	51,463,578,000
Incentif		5,532,983,000	5,532,983,000
Tunjangan Tetap		41,068,812,000	41,068,812,000
Lembur		99,384,000	99,384,000
Outsource	5,047,228,800	1,261,807,200	6,309,036,000
Internet		3,345,414,000	3,345,414,000
Konsultan	3,839,966,400	959,991,600	4,799,958,000
<b>Total Beban Pokok</b>	35,875,387,200	267,191,337,800	303,066,725,000



Uraian	RKAP 2023		
	TKDN	Non TKDN	Jumlah
<b>Gross Margin</b>	(35,875,387,200)	168,348,851,200	132,473,464,000
<b>BEBAN PEMASARAN</b>			
Buku		128,082,000	128,082,000
Jamuan		--	--
Pameran		500,004,000	500,004,000
Jamuan Penagihan		--	--
Transport Penagihan		--	--
Komisi Penagihan		--	--
<b>Total Beban Pemasarn</b>	--	628,086,000	628,086,000
<b>BEBAN UMUM ADMINISTERASI</b>			
Tunjangan Tidak Tetap		12,978,132,000	12,978,132,000
Bonus		11,109,642,000	11,109,642,000
Thr		6,913,938,000	6,913,938,000
Asuransi		8,446,452,000	8,446,452,000
Cop		--	--
Komisi		--	--
Pensiun		14,576,880,000	14,576,880,000
Penghargaan Karyawan		1,184,040,000	1,184,040,000
Pesangon		893,760,000	893,760,000
Pelatihan		3,707,112,000	3,707,112,000
Ibo		586,224,000	586,224,000
Rekrutasi		224,532,000	224,532,000
Promosi		139,212,000	139,212,000
Outbound		1,000,002,000	1,000,002,000
Atk	479,884,800	119,971,200	599,856,000
Listrik		2,533,488,000	2,533,488,000
Telepon		130,296,000	130,296,000
Sewa Gedung	1,741,658,400	435,414,600	2,177,073,000
Sewa Alat Kerja	1,360,824,000	340,206,000	1,701,030,000
Perawatan Alat Kerja		2,260,206,000	2,260,206,000
Air		53,214,000	53,214,000
Rtk		2,154,834,000	2,154,834,000
Keanggotaan		249,828,000	249,828,000
Rapat		2,085,168,000	2,085,168,000
Kontribusi Lingkungan		1,153,230,000	1,153,230,000
Perijinan		--	--
Materai		33,474,000	33,474,000
Sppd Non Project		2,168,805,000	2,168,805,000
Transport		2,383,045,000	2,383,045,000

Uraian	RKAP 2023		
	TKDN	Non TKDN	Jumlah
Biaya Lainnya		2,627,052,000	2,627,052,000
Biaya Contingency & Lain-lain		--	--
Beban Penyusutan		6,667,641,000	6,667,641,000
Beban Penyisihan Piutang		5,493,597,000	5,493,597,000
<b>Total Beban Um&amp;Adm</b>	3,582,367,200	92,649,395,800	96,231,763,000
<b>PENDAPATAN/ BEBAN LAINNYA</b>			
Pendapatan Lain		2,043,576,000	2,043,576,000
Biaya Lain		8,812,434,000	8,812,434,000
Total Pendapatan/Beban Lainnya	--	(6,768,858,000)	(6,768,858,000)
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	(39,457,754,400)	68,302,511,400	28,844,757,000
<b>PAJAK</b>			
Pajak Badan		6,345,835,000	6,345,835,000
<b>LABA SETELAH PAJAK</b>	(39,457,754,400)	61,956,676,400	22,498,922,000

## BAB V PROYEKSI KEUANGAN PERUSAHAAN

### 1. Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan

#### 1.1. Proyeksi Neraca

*(dalam juta Rupiah)*

Uraian	2021 Audited	30-Sep-2022 Realisasi	2022 (Prognosa)	2023 RKAP
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan Setara Kas	98,491	192,227	134,022	110,216
Piutang Usaha	85,983	119,673	75,127	88,230
Piutang Lain-lain	558	981	433	603
Persediaan	0	0	0	0
Pajak Dibayar di Muka	2,323	16,649	1,803	2,710
Beban Dibayar di Muka	2,373	2,751	1,842	2,765
Uang Muka Kerja	4,392	5,490	3,409	3,524
Jumlah Aset Lancar	194,121	337,771	216,636	208,050
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Aset Pajak Tangguhan	28,957	28,957	31,853	21,401
Investasi pada Entitas Asosiasi	14,617	14,617	33,000	30,000
Aset Hak Guna - Bersih	2,712	2,197	3,983	2,853
Aset Tetap	34,055	29,136	135,828	217,519
Uang Jaminan	151	2,309	508	493
Aset Tidak Lancar Lainnya	1,528	3,270	1,650	1,782
Jumlah Aset Tidak Lancar	82,021	80,486	205,823	274,049
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>276,142</b>	<b>418,257</b>	<b>422,458</b>	<b>482,100</b>
<b>LIABILITAS</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang usaha	10,246	14,342	20,361	14,250
Utang lain-lain	5,203	4,821	5,619	7,879
Utang pajak	6,658	37,142	7,191	8,766
Utang dana pensiun	746	2,246	806	870
Beban yang masih harus dibayar	28,154	7,812	30,407	18,822
Bagian Jangka Pendek dari Utang Jangka Panjang	0	0	0	16,000
Pinjaman Bank	1,521	0	0	0
Utang Sewa Pembiayaan	0	0	0	0

Uraian	2021	30-Sep-2022	2022	2023
	Audited	Realisasi	(Prognosa)	RKAP
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	52,529	66,363	64,384	66,589
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Liabilitas Pajak Tangguhan				
Utang Jangka Panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek				
Pinjaman Bank			5,347	38,750
Utang Sewa Pembiayaan				
Liabilitas Sewa	2,189	1,628	131,477	0
Liabilitas Imbalan Pascakerja	126,642	126,642	123,471	133,011
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	128,831	128,270	136,824	171,760
Jumlah Liabilitas	181,359	194,634	201,208	238,350
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk				
Modal Disetor	9,116	9,116	9,116	9,116
Tambahan Modal Disetor	15,572	15,572	15,572	15,572
Tambahan Modal Disetor Lainnya	32,033	32,033	32,033	32,033
Saldo Laba	0	0		
Ditentukan Penggunaannya	11,783	11,783	11,783	11,783
Belum Ditentukan Penggunaannya	25,914	154,456	152,343	174,841
Jumlah	94,419	222,960	220,847	243,346
Keperluan Nonpengendali	363	663	404	403
JUMLAH EKUITAS	94,782	223,623	221,251	243,749
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	276,142	418,257	422,458	482,100

Tabel 21 Proyeksi neraca 2022

## 1.2. Proyeksi Laba/Rugi

(dalam juta Rupiah)

Uraian	Audited	Realisasi	2022	RKAP
	2021	30-Sep-2022	(Prognosa)	2023
<b>PENDAPATAN USAHA</b>	<b>411,389</b>	<b>269,984</b>	<b>400,538</b>	<b>435,540</b>
<b>BEBAN POKOK USAHA</b>	<b>(289,170)</b>	<b>(188,834)</b>	<b>(279,95)</b>	<b>(304,066)</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>122,219</b>	<b>81,149</b>	<b>120,563</b>	<b>131,473</b>

Uraian	Audited 2021	Realisasi 30-Sep-2022	2022 (Prognosa)	RKAP 2023
Beban Penjualan	(491)	(305)	(907)	(628)
Beban Administrasi dan Umum	(101,949)	(70,557)	(99,623)	(95,231)
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	5,685	150,389	142,054	(6,768)
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>25,463</b>	<b>160,676</b>	<b>162,087</b>	<b>28,844</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(8,669)</b>	<b>(32,135)</b>	<b>(35,659)</b>	<b>(6,345)</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>16,794</b>	<b>128,541</b>	<b>126,428</b>	<b>22,498</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				
Pos-pos yang Tidak dapat Direklasifikasi ke Laba Rugi				
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	3,259	-	-	-
Pajak Terkait	(716)	-	-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Bersih	2,542	-	-	-
<b>LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>19,336</b>	<b>128,541</b>	<b>126,428</b>	<b>22,498</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik Entitas Induk	16,755	128,541	126,428	22,498
Kepentingan Nonpengendali	38	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>16,794</b>	<b>128,541</b>	<b>126,428</b>	<b>22,498</b>
<b>LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik Entitas Induk	19,317	128,541	126,428	22,498
Kepentingan Nonpengendali	19	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>19,336</b>	<b>128,541</b>	<b>126,428</b>	<b>22,498</b>

Tabel 22 Proyeksi Laba/Rugi 2022

### 1.3. Arus Kas

(dalam juta Rupiah)

Uraian	Audited 2021	2022 (Prognosa)	RKAP 2023
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan Kas dari Pelanggan	244,230	224,585	273,111

Uraian	Audited 2021	2022 (Prognosa)	RKAP 2023
Penerimaan dari Pemerintah	162,829	147,915	151,940
Pembayaran Kas kepada Pemasok dan Karyawan	(382,566)	(320,510)	(353,174)
Penerimaan Bunga	984	1,033	990
Penerimaan Lain-lain	--	--	--
Pembayaran Pajak	(8,414)	(48,500)	(20,273)
Pembayaran Lain-lain	--	--	--
<b>Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>17,063</b>	<b>5,875</b>	<b>52,593</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Penerimaan Dividen	3,000	153,908	--
Perolehan Aset Tetap	(5,416)	(94,900)	(127,500)
Penjualan Aset Tetap	1	2,700	1,000
Penempatan Investasi	(923)	(33,000)	--
Penempatan Pendanaan	--	--	--
<b>Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(3,339)</b>	<b>28,708</b>	<b>(126,500)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Penerimaan Pinjaman Bank	25,000	30,500	94,500
Pembayaran Pinjaman Bank	(28,043)	(26,700)	(39,600)
Pembayaran Bunga Bank	--	(1,500)	(4,800)
Pembayaran Sewa Pembiayaan	(291)	--	--
Pembayaran Liabilitas Sewa	(2,301)	--	--
<b>Kas Bersih Digunakan untuk (Diperoleh dari) Untuk Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(5,635)</b>	<b>(2,300)</b>	<b>50,100</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>8,089</b>	<b>35,531</b>	<b>(23,806)</b>
<b>SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<b>90,402</b>	<b>98,491</b>	<b>134,022</b>
<b>SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>98,491</b>	<b>134,022</b>	<b>110,216</b>

Tabel 23 Proyeksi Arus Kas 2022

## 1.4. Proyeksi Sumber dan Penggunaan Dana

URAIAN	2022 (Prognosa)					
	PSO	Komersil	IMQ	AETP	Supporting	Konsolidasi
<b>PENDAPATAN</b>						
Pendapatan PSO	150,933	-	-	-	-	150,933
Pendapatan Komersil	-	243,869	-	-	-	243,869
Pendapatan IMQ	-	-	5,735	-	-	5,735
Pendapatan AETP						-
<b>Total Pendapatan</b>	150,933	243,869	5,735	-	-	400,538
<b>BEBAN POKOK</b>						
Beban Pokok PSO	37,709	-	-	-		37,709
Beban Pokok Komersil	-	131,138	-	-		131,138
Beban Pokok IMQ	-	-	7,819	-		7,819
Gaji	27,062	12,408	3,790	876		44,137
Incentif	3,584	1,891	198	-		5,674
Tunjangan Tetap	26,870	10,829	492	-		38,191
Lembur	40	66	10	-		117
Outsource	1,968	4,012	-	-		5,980
Internet	931	1,791	138	5		2,865
Konsultan	1,090	2,245	14	1,737		5,086
<b>Total Beban Pokok</b>	99,254	164,381	12,461	2,618	--	278,715
<b>Gross Margin</b>	51,678	79,487	(6,725)	(2,618)	--	121,822
<b>BEBAN PEMASARAN</b>						
Jamuan	-	-	80	-		80
Promosi Penagihan	-	521	183	-		705
Pameran	-	-	-	-		-
Jamuan Penagihan	-	-	-	-		-
Transport Penagihan	-	-	-	-		-

URAIAN	2022 (Prognosa)					
	PSO	Komersil	IMQ	AETP	Supporting	Konsolidasi
Komisi Penagihan	-	-	-	-	-	-
<b>Total Beban Pemasarn</b>	-	521	264	-	-	785
<b>BEBAN UMUM ADMINISTERASI</b>						
Tunjangan Tidak Tetap	7,716	4,153	362	-	-	12,231
Bonus	6,991	3,965	17	-	-	10,973
Thr	4,496	2,088	333	-	-	6,918
Asuransi	2,805	5,120	335	-	-	8,260
Cop	-	-	-	-	-	-
Komisi	-	-	-	-	-	-
Pensiun	4,609	9,455	423	-	-	14,486
Penghargaan Karyawan	416	856	-	-	-	1,272
Pesangon	30	61	-	-	-	91
Pelatihan	1,248	2,105	111	-	-	3,466
Ibo	105	216	-	-	-	320
Rekrutasi	49	102	1	-	-	152
Promosi	124	256	-	-	-	381
Outbound	415	844	-	-	-	1,259
Atk	185	323	66	18	-	591
Listrik	978	1,436	69	-	-	2,484
Telepon	59	65	6	-	-	130
Sewa Gedung	1,798	2,969	315	174	-	5,257
Sewa Alat Kerja	41	918	-	-	-	1,323
Perawatan Alat Kerja	1,106	968	248	40	-	2,362
Air	42	10	-	-	-	51
Rtk	767	1,264	6	6	-	2,043
Keanggotaan	81	157	-	-	-	238
Rapat	946	1,013	-	20	-	1,980



URAIAN	2022 (Prognosa)					
	PSO	Komersil	IMQ	AETP	Supporting	Konsolidasi
Kontribusi Lingkungan	413	647	-	-		1,059
Buku	75	47	-	-		122
Perijinan	-	-	-	-		-
Materai	14	16	-	-		30
Sppd Non Project	1,848	1,502	229	-		3,579
Transport	1,239	1,433	43	16		2,731
Biaya Lainnya	781	1,608	137	30		2,555
Biaya Contingency & Lain-lain	-	-	-	-		-
Beban Penyusutan	2,625	5,406	986	61		9,078
Beban Penyisihan Piutang	1,824	3,756	-	-		5,579
<b>Total Beban Um&amp;Adm</b>	<b>44,191</b>	<b>52,759</b>	<b>3,687</b>	<b>365,</b>	<b>--</b>	<b>101,003</b>
<b>PENDAPATAN/ BEBAN LAINNYA</b>						
Pendapatan Lain			2,100	-	149,331	151,431
Biaya Lain			1,325	-	8,052	9,377
Total Pendapatan/Beban Lainnya	-	-	774	-	141,280	142,054
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>7,487</b>	<b>26,207</b>	<b>(9,902)</b>	<b>(2,984)</b>	<b>141,280</b>	<b>162,087</b>
<b>PAJAK</b>						
Pajak Badan			-	-	35,659	35,659
<b>LABA SETELAH PAJAK</b>	<b>7,487</b>	<b>26,207</b>	<b>(9,902)</b>	<b>(2,984)</b>	<b>105,620</b>	<b>126,428</b>

(dalam juta rupiah)

URAIAN	RKAP 2023				
	PSO	Komersil	AETP	Supporting	Konsolidasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Pendapatan PSO	155,743	--	--		155,743
Pendapatan Komersil	--	279,797	--		279,797
Pendapatan ETP	--	--	11,885		11,885
<b>Total Pendapatan</b>	155,743	267,912	11,885	--	435,540
<b>BEBAN POKOK</b>					
Beban Pokok PSO	44,978	--	--		44,978
Beban Pokok Komersil	--	145,468	--		145,468
Beban Pokok IMQ	--	--	--		--
Gaji	28,264	23,199	--		51,463
Incentif	3,562	1,970	--		5,532
Tunjangan Tetap	28,473	12,594	--		41,068
Lembur	25	74	--		99
Outsource	1,639	4,669	--		6,309
Internet	952	2,392	--		3,345
Konsultan	721	4,078	--		4,799
<b>Total Beban Pokok</b>	108,619	194,447	--	--	303,066
<b>Gross Margin</b>	48,605	77,870	4,907	--	131,383
<b>BEBAN PEMASARAN</b>					
Buku	--	--	--		--
Jamuan	--	500	--		500
Pameran	--	--	--		--
Jamuan Penagihan	--	--	--		--
Transport Penagihan	--	--	--		--
Komisi Penagihan	--	--	--		--

URAIAN	RKAP 2023				
	PSO	Komersil	AETP	Supporting	Konsolidasi
<b>Total Beban Pemasarn</b>	--	500	--	--	500
<b>BEBAN UMUM ADMINISTERASI</b>					
Tunjangan Tidak Tetap	7,842	5,135	--		12,978
Bonus	6,933	4,176	--		11,109
Thr	4,576	2,337	--		6,913
Asuransi	2,270	6,176	--		8,446
Cop	--	--	--		--
Komisi	--	--	--		--
Pensiun	3,754	10,822	--		14,576
Penghargaan Karyawan	304	879	--		1,184
Pesangon	230	663	--		893
Pelatihan	954	2,752	--		3,707
Ibo	151	435	--		586
Rekrutasi	57	166	--		224
Promosi	35	103	--		139
Outbonds	257	742	--		1,000
Atk	187	412	--		599
Listrik	931	1,602	--		2,533
Telepon	55	74	--		130
Sewa Gedung	660	1,516	--		2,177
Sewa Alat Kerja	416	1,284	--		1,701
Perawatan Alat Kerja	1,073	1,187	--		2,260
Air	42	10	--		53
Rtk	671	1,483	--		2,154
Keanggotaan	68	181	--		249
Rapat	888	1,197	--		2,085
Kontribusi Lingkungan	374	779	--		1,153
Buku	73	54	--		128
Perijinan	--	--	--		--

URAIAN	RKAP 2023				
	PSO	Komersil	AETP	Supporting	Konsolidasi
Materai	12	20	--		33
Sppd Non Project	1,078	1,090	--		2,168
Transport	1,038	1,344	--		2,383
Biaya Lainnya	646	1,980	--		2,627
Biaya Contingency & Lain-lain	--	--	--		--
Beban Penyusutan	1,654	5,012	--		6,667
Beban Penyisihan Piutang	1,415	4,078	--		5,493
<b>Total Beban Um&amp;Adm</b>	<b>38,656</b>	<b>57,703</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>96,359</b>
<b>PENDAPATAN/ BEBAN LAINNYA</b>					
Pendapatan Lain			--	2,044	2,044
Biaya Lain			--	8,812	8,812
Total Pendapatan/Beban Lainnya	--	--	--	(6,768)	(6,768)
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>8,466</b>	<b>27,146</b>	<b>--</b>	<b>(6,768)</b>	<b>28,845</b>
<b>PAJAK</b>					
Pajak Badan			--	6,346	6,346
<b>LABA SETELAH PAJAK</b>	<b>8,466</b>	<b>27,146</b>	<b>--</b>	<b>(13,114),</b>	<b>22,499</b>

Tabel 24 Proyeksi Sumber dan Penggunaan Dana 2023

## BAB V LAPORAN KEUANGAN ANAK PERUSAHAAN

### 1. Proyeksi Pokok Keuangan PT IMQ

#### 1.1. Proyeksi Neraca

Uraian	Audited 2021	Realisasi 30-Sep-22
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas dan Setara Kas	730	30,054
Piutang Usaha	7,485	11,923
Piutang Lain-lain	11,654	24
Persediaan		
Pajak Dibayar di Muka	2,323	3,971
Beban Dibayar di Muka	396	556
Uang Muka Kerja		
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>22,586</b>	<b>46,528</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>		
Aset Pajak Tangguhan	1,141	1,141
Investasi pada Entitas Asosiasi		
Aset Hak Guna - Bersih		
Aset Tetap	608	443
Uang Jaminan	28	186
Aset Tidak Lancar Lainnya	802	286
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>2,580</b>	<b>2,056</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>25,166</b>	<b>48,584</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		
Utang usaha		3,393
Utang lain-lain	136	162
Utang pajak	654	697
Utang dana pensiun		
Beban yang masih harus dibayar	4,591	8,092
Bagian Jangka Pendek dari Utang Jangka Panjang		
Pinjaman Bank		
Utang Sewa Pembiayaan		
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>5,381</b>	<b>12,344</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
Liabilitas Pajak Tangguhan		

Uraian	Audited	Realisasi
	2021	30-Sep-22
Utang Jangka Panjang		
setelah dikurangi bagian jangka pendek		
Pinjaman Bank		
Utang Sewa Pembiayaan		
Liabilitas Sewa	627	66
Liabilitas Imbalan Pascakerja	3,170	3,170
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>3,797</b>	<b>3,237</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>9,179</b>	<b>15,581</b>
<b>EKUITAS</b>		
<b>Ekuitas Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk</b>		
Modal Disetor	14,700	29,400
Tambahan Modal Disetor	300	600
Tambahan Modal Disetor Lainnya	14	14
Saldo Laba	(1,036)	(1,036)
Ditentukan Penggunaannya		
Belum Ditentukan Penggunaannya	2,010	4,026
<b>Jumlah</b>	<b>15,987</b>	<b>33,003</b>
Kepentingan Nonpengendali		
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>15,987</b>	<b>33,003</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>25,166</b>	<b>48,584</b>

## 1.2. Proyeksi Laba Rugi

Uraian	Audited	Realisasi
	2021	30-Sep-22
<b>PENDAPATAN USAHA</b>	<b>29,278</b>	<b>20,796</b>
<b>BEBAN POKOK USAHA</b>	<b>(17,103)</b>	<b>(12,906)</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>12,175</b>	<b>7,889</b>
Beban Penjualan		
Beban Administrasi dan Umum	(9,697)	(6,518)
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	137	645
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>2,615</b>	<b>2,016</b>
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(698)	
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>1,917</b>	<b>2,016</b>

## 1.3. Proyeksi Arus Kas

Uraian	Audited	Realisasi
	2021	30-Sep-22
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan Kas dari Pelanggan	25,224	30,476
Penerimaan dari Pemerintah		
Pembayaran Kas kepada Pemasok dan Karyawan	(24,570)	(3,117)
Penerimaan Bunga	9	
Penerimaan Lain-lain		
Pembayaran Pajak	(826)	(1,404)
Pembayaran Lain-lain		
<b>Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>(163)</b>	<b>25,954</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penerimaan Dividen		
Perolehan Aset Tetap	(200)	
Penjualan Aset Tetap	1	
Penempatan Investasi		3,370
Penempatan Pendanaan		
<b>Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(199)</b>	<b>3,370</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan Pinjaman Bank		
Pembayaran Pinjaman Bank		
Pembayaran Bunga Bank		
Pembayaran Sewa Pembiayaan		
Pembayaran Liabilitas Sewa		
<b>Kas Bersih Digunakan untuk (Diperoleh dari) Untuk Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(685)</b>	
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(1,047)</b>	<b>29,324</b>
<b>SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<b>1,777</b>	<b>729</b>
<b>SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>730</b>	<b>30,054</b>

## 2. Proyeksi Pokok Keuangan ETP

### 2.1. Proyeksi Neraca

(dalam juta rupiah)

Uraian	Prognosa 2022	RKAP 2023
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas dan Setara Kas	27,365	29,216
Piutang Usaha		
Piutang Lain-lain		
Persediaan		
Pajak Dibayar di Muka		
Beban Dibayar di Muka	157	157
Uang Muka Kerja		
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	27,522	29,372
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>		
Aset Pajak Tangguhan	597	
Investasi pada Entitas Asosiasi		
Aset Hak Guna - Bersih		
Aset Tetap	1,037	793
Uang Jaminan		
Aset Tidak Lancar Lainnya		
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	1,633	793
<b>JUMLAH ASET</b>	29,155	30,165
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang usaha	1,542	
Utang lain-lain		
Utang pajak		3
Utang dana pensiun		
Beban yang masih harus dibayar		
Bagian Jangka Pendek dari Utang Jangka Panjang		
Pinjaman Bank		
Utang Sewa Pembiayaan		
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	1,542	3
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
Liabilitas Pajak Tangguhan		
Utang Jangka Panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek		



Uraian	Prognosa	RKAP
	2022	2023
Pinjaman Bank		
Utang Sewa Pembiayaan		
Liabilitas Sewa		
Liabilitas Imbalan Pascakerja		149
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>0</b>	<b>149</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>1,542</b>	<b>152</b>
<b>EKUITAS</b>		
<b>Ekuitas Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk</b>		
Modal Disetor	30,000	30,000
Tambahan Modal Disetor		
Tambahan Modal Disetor Lainnya		
Saldo Laba		
Ditentukan Penggunaannya		(2,387)
Belum Ditentukan Penggunaannya	(2,387)	2,400
<b>Jumlah</b>	<b>27,613</b>	<b>30,013</b>
Kepentingan Nonpengendali		
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>27,613</b>	<b>30,013</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>29,155</b>	<b>30,165</b>

Tabel 25 Proyeksi Neraca Anak Perusahaan Antara pada 2023

## 2.2. Proyeksi Laba/Rugi

(dalam juta rupiah)

Uraian	Prognosa 2022	RKAP 2023
PENDAPATAN USAHA		11,885
BEBAN POKOK USAHA		
<b>LABA BRUTO</b>	0	11,885
Beban Penjualan		
Beban Administrasi dan Umum		
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	(2,984)	(8,885)
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	(2,984)	3,000
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	597	(600)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<u>(2,386)</u>	<u>2,400</u>

Tabel 26 Proyeksi Laba/Rugi Anak Perusahaan Antara pada 2022

## 2.3. Proyeksi Arus Kas

(dalam juta rupiah)

Uraian	Prognosa 2022	RKAP 2023
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan Kas dari Pelanggan		11,885
Penerimaan dari Pemerintah		
Pembayaran Kas kepada Pemasok dan Karyawan	(539)	(9,925)
Penerimaan Bunga		
Penerimaan Lain-lain		
Pembayaran Pajak	(876)	(110)
Pembayaran Lain-lain		
<b>Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>	<u>(1,415)</u>	<u>1,851</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penerimaan Dividen		
Perolehan Aset Tetap	(1,219)	
Penjualan Aset Tetap		
Penempatan Pendanaan		
<b>Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<u>(1,219)</u>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan Pinjaman Bank		
Pembayaran Pinjaman Bank		

Uraian	Prognosa 2022	RKAP 2023
Pembayaran Bunga Bank		
Pembayaran Sewa Pembiayaan		
Pembayaran Liabilitas Sewa		
<b>Kas Bersih Digunakan untuk (Diperoleh dari) Untuk Aktivitas Pendanaan</b>	--	--
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(2,635)	1,851
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	30,000	27,365
<b>SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>27,365</b>	<b>29,216</b>

Tabel 27 Proyeksi Arus Kas Anak Perusahaan Antara 2022

## **BAB VI**

### **PROFIL MANAJEMEN RISIKO**

#### **1. Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko 2022**

Perum LKBN Antara selama tiga tahun terakhir ini telah menerapkan manajemen risiko secara konsisten didukung dengan komitmen penuh dari Dewan Direksi sebagai pemegang akuntabilitas tertinggi di lingkungan perusahaan. Selama periode singkat itu, Antara terus memperbaiki implementasi manajemen risiko dengan menerbitkan buku pedoman yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama – yang di dalamnya memuat semesta kategori risiko, kriteria-kriteria penilaian, serta peran dan tanggung jawab unit-unit yang ada sampai ke level tertinggi.

Selain itu, perusahaan juga telah membentuk unit khusus yang menangani pengembangan manajemen risiko, dan memberikan berbagai pelatihan yang relevan kepada puluhan karyawan. Pada periode ini pula Antara telah mengenalkan sejumlah elemen penting dalam manajemen risiko seperti identifikasi dan pengukuran risiko kepada seluruh karyawan sampai di level biro-biro daerah dan luar negeri. Semua ini adalah upaya awal pihak manajemen untuk membangun budaya risiko secara menyeluruh di lingkungan perusahaan.

Berdasarkan pengukuran tingkat maturitas risiko yang dilakukan pada Oktober 2022, praktik manajemen risiko di Perum LKBN Antara telah berada pada level III dengan skor 3,42 – naik cukup signifikan dari capaian tahun sebelumnya 2,32. Pada level ini, perusahaan dinilai telah berhasil membangun kerangka/framework sehingga manajemen risiko menjadi siklus berulang sehingga konsisten diterapkan dan mengarah pada penerapan proses yang berkesinambungan. Selain itu, manajemen risiko pada level III ini juga telah mengintegrasikan dengan baik lini pertama sebagai pemilik dan lini kedua sebagai penjaga nilai (*assurance*).

Beberapa faktor yang membuat nilai maturitas perusahaan naik secara signifikan pada tahun ini adalah sebagai berikut:

- Adanya komitmen Direksi dan Dewan Pengawas yang ditandai dengan penandatanganan Piagam Manajemen Risiko,
- Adanya Roadmap Manajemen Risiko yang dapat mengukur dengan jelas pencapaian perusahaan dalam membangun budaya risiko,
- Perusahaan pada tahun ini juga telah mengubah sejumlah peraturan internal terkait manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan praktik terbaik,
- Selain itu, Perum LKBN Antara juga telah meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia di bidang risiko dengan memberikan pelatihan-pelatihan terkait risiko. Saat ini, perusahaan memiliki 10 karyawan dengan sertifikasi manajemen risiko tingkat tiga (QRMP)
- Yang terakhir, perusahaan telah menerapkan metode kuantitatif dalam pengukuran risiko secara konsisten.

#### **2. Kebijakan Umum Manajemen Risiko 2023**

Kebijakan umum manajemen risiko di Perum LKBN Antara pada tahun 2023 sebagian besar didasarkan pada penilaian maturitas yang dilakukan pada tahun ini. Dari hasil penilaian maturitas ini, manajemen akan menyusun strategi pengembangan manajemen risiko sampai tahap maturitas paling tinggi yang diharapkan akan tercapai dalam tiga tahun mendatang.

Secara umum, strategi pengembangan manajemen risiko pada tahun 2023 akan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Pengembangan sistem informasi manajemen risiko yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memonitoring dan mereview proses-proses dalam manajemen risiko dalam jaringan, dengan keamanan data yang terjamin.
- Melibatkan secara penuh Satuan Pengawas Internal sebagai lini ketiga (penjamin nilai – assurance) dalam model tiga lini manajemen risiko Antara.
- Melibatkan pihak eksternal untuk menilai index maturitas risiko perusahaan untuk menjamin independensi dan objektivitas hasil akhir.
- Melakukan sosialisasi manajemen risiko yang massif ke biro-biro daerah untuk membangun budaya sadar risiko, serta untuk membangun penerapan yang konsisten di seluruh unit kerja perusahaan.
- Melakukan kajian atas data-data dalam *loss events* untuk membangun indikator-indikator *early warning system* yang akurat.

### 3. Selera Risiko

Untuk penyelarasan inisiatif strategis dengan prinsip penganggaran berbasis risiko, Perum LKBN Antara pada 2022 menetapkan selera risiko sebagaimana berikut:

**REPUTASI.** Tahun 2023 merupakan tahun yang kritikal bagi reputasi perusahaan karena harus turut mensukseskan agenda pesta demokrasi Indonesia dengan memproduksi berita-berita untuk meningkatkan literasi politik warga dan dengan berkolaborasi bersama lembaga-lembaga negara. Mengingat hal tersebut, perusahaan tidak akan menerima risiko-risiko yang berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan kunci dan hanya akan mentoleransi eksposur dalam ***batas rendah***.

**STRATEGI.** Perusahaan pada tahun 2023 akan melakukan sejumlah langkah strategis penting di tengah ketidakpastian situasi politik (pemilihan umum) dan ekonomi (resesi) eksternal sehingga menetapkan selera ***moderat*** untuk kategori risiko ini.

**OPERASIONAL.** Mengingat situasi politik Indonesia menjelang pemilihan umum yang memberikan pengaruh besar bagi pemberitaan, maka perusahaan menetapkan ***batas selera yang rendah*** dengan menjaga akurasi dan keberimbangan berita, serta target-target operasional lain baik dari sisi bisnis maupun redaksi.

**KEUANGAN.** Perusahaan mentoleransi eksposur risiko keuangan ***sampai level moderat*** – karena perusahaan akan melakukan investasi yang cukup besar terkait aset-aset tetap baru diakuisisi di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat resesi.

**HUKUM DAN KEPATUHAN.** Perusahaan akan selalu patuh terhadap semua regulasi yang berlaku, baik untuk induk maupun untuk anak perusahaan, dan tidak akan mentoleransi pelanggaran-pelanggaran hukum yang mengakibatkan sengketa litigasi. Pada risiko ini, selera perusahaan adalah ***rendah***.

**KESELAMATAN KERJA.** Untuk mendapatkan berita-berita eksklusif yang hanya bisa didapatkan dari Kantor Berita Antara dan meningkatkan reputasi perusahaan di bidang pers, perusahaan akan mengirim wartawan untuk melakukan peliputan ke daerah konflik, daerah rawan bencana, dan liputan berbahaya lainnya. Perusahaan siap menerima keterpaparan risiko dengan ***batas tinggi*** yang ditimbulkan dari sikap ini dan akan melakukan upaya mitigasi yang maksimal.

Sementara itu selera risiko untuk masing-masing indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

KPI	Selera	KRI	Target	Batas Deviasi	Monitoring
EBITDA	<b>Moderat</b>	% capaian EBITDA	47,7	2%	Bulanan
ROIC $\geq$ WACC	<b>Rendah</b>	Rasio ROIC:WACC	1,60	2%	Bulanan
Interest Bearing Debt to EBITDA	<b>Rendah</b>	% Interest Bearing Debt to Ebitda	1,1	2%	Bulanan
Interest Bearing Debt to Invested Capital	<b>Moderat</b>	Interest Bearing Debt to Invested Capital	18,3	5%	Bulanan
Diseminasi berita Pemilu untuk meningkatkan kesadaran terhadap pendidikan pemilih di 38 Provinsi	<b>Rendah</b>	Jumlah media yang mengutip berita Antara tentang pemilu	64	2%	Bulanan
Peningkatan Kompetensi Wartawan Non Antara	<b>Rendah</b>	% realisasi program uji kompetensi	30	2%	Semester
Jumlah Inovasi penunjang Performa Perusahaan	<b>Rendah</b>	Jumlah digitalisasi proses kerja	2	0%	Semester
Pengembangan Platform Antara ETP untuk partisipan trading offshore melalui Conduit Model	<b>Moderat</b>	% realisasi pengembangan Conduit Model	100%	10%	Semester
Sinergi Bisnis Antar anggota kluster TMT	<b>Rendah</b>	% realisasi tahapan sinergi	1	5%	Triwulan
Peningkatan Skor INDI 4.0	<b>Moderat</b>	% pemenuhan gap	>2022	10%	Triwulan
Ketersediaan dukungan IT untuk operasional perusahaan	<b>Moderat</b>	% realisasi program kerja sesuai roadmap IT	5	10%	Triwulan
Ketepatan waktu pelaksanaan soft trial Bisnis ETP	<b>Moderat</b>	% realisasi tahapan menuju soft trial	TW I	10%	Bulanan
Ketersediaan Roadmap untuk Revitalisasi /Pengembangan Asset	<b>Moderat</b>	% realisasi tahapan penyusunan roadmap	100	10%	Semester
Rasio Top Talent Muda (< 42 tahun) dalam nominated talent	<b>Tinggi</b>	% penempatan perempuan dalam jabatan struktural (GM, manajer, asisten manajer)	19	5%	Triwulan
Rasio perempuan dalam nominated talent	<b>Moderat</b>	% millennial dalam pelatihan pengembangan kapasitas	20	5%	Triwulan
Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko (Rasio Kualifikasi)	<b>Moderat</b>	% pemenuhan kualifikasi dalam Organ Pengelola Risiko	70	15%	Triwulan
Pelatihan untuk Digital readiness	<b>Rendah</b>	Jenis pelatihan digital	6	2%	Triwulan
Ketersediaan roadmap Dana Pensiun menuju kualitas pendanaan tingkat 1	<b>Moderat</b>	% realisasi tahapan penyusunan roadmap	TW2	10%	Bulanan

#### 4. Kapasitas Risiko

Parameter yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kapasitas risiko dalam RKAP 2023 ini adalah EBITDA, karena parameter inilah yang menjadi pengukuran kinerja utama dalam kontrak manajemen.

Kapasitas risiko perusahaan pada 2023 dibagi menjadi dua bagian – yang nantinya akan digunakan sebagai dasar menentukan batas toleransi operasional – sebagai berikut:

Parameter	Kapasitas	Nominal (Rp Juta)	Sumber data
EBITDA		47,774	RKAP 2023
Risk Capacity I	29,47% dari EBITDA	14,207	Total risk residual exposure pada risiko utama 2023
Risk Capacity II	24% dari EBITDA	11,466	Peluang ketidak-tercapaian EBITDA pada 2023 dengan metode Monte Carlo
Risk Capacity III	19% dari EBITDA	10,510	Prosentase risk capacity II dikurangi dengan risk appetite direksi untuk kategori keuangan

Tabel 28 Kapasitas Risiko Perum LKBN Antara

#### 5. Batas Toleransi Risiko

Batas toleransi risiko untuk setiap direktorat ditentukan dengan **mengalikan proporsi anggaran operasional expenditure** masing-masing direktorat, dengan **Risk Capacity II**.

Direktorat	Opex	% Opex	BTR Direktorat	Nominal BTR
Direktorat Utama	68,966	18.97%	4.17%	2,877
Direktorat Pemberitaan	78,055	21.47%	4.72%	3,686
Direktorat Komersil dan Pengembangan Bisnis	146,804	40.37%	8.88%	13,039
Direktorat Keuangan, MSDM, dan Manajemen Risiko	69,791	19.19%	4.22%	2,947

Tabel 29 Batas Toleransi Risiko Operasional untuk Setiap Direktorat, dalam juta Rp

## 6. Kriteria Risiko

Dengan mempertimbangkan batas toleransi risiko di atas, maka perusahaan menetapkan kriteria risiko sebagai berikut:

### Kriteria Dampak:

Pengukuran Dampak	1	2	3	4	5
	Tidak berarti	Ringan	Sedang	Besar	Kritikal
<b>Finansial</b>					
Kapasitas Risiko	Kurang dari 5% nilai Kapasitas Risiko II	Di antara 5% < x < 9% dari nilai RC II	Di antara 10% < x < 14 dari nilai RC II	Di antara 15% < x < 20% dari nilai RC II	Lebih besar dari 20% nilai Kapasitas Risiko (Risk Capacity) II
<b>Operasional</b>					
Reputasi	terdapat masukan dari pelanggan perusahaan baik verbal maupun tertulis	Munculnya keluhan/publisitas bersentimen negatif - yang disampaikan secara verbal; atau -yang disampaikan pada channel customer service resmi perusahaan;	Munculnya keluhan/publisitas bersentimen negatif - di media sosial	Munculnya keluhan/publisitas bersentimen negatif -di media cetak regional maupun nasional; atau -di media online; -di media sosial yang berulang dan menjadi viral (i.e., trending topic	Munculnya keluhan/publisitas bersentimen negatif yang -menjadi viral secara berulang dan berkepanjangan; atau -menjadi headline di berbagai media cetak maupun online secara berulang dan berkepanjangan atau -yang menimbulkan reaksi dari public figure / influencer ternama serta pemegang saham
Sistem IT	Sistem Informasi Perusahaan terhenti <1 jam	Sistem Informasi Perusahaan terhenti lebih dari 1<x<2 jam	Sistem Informasi Perusahaan terhenti lebih dari 2<x<3 jam	Sistem Informasi Perusahaan terhenti lebih dari 3<x<6 jam	Sistem Informasi Perusahaan terhenti lebih dari 6 jam
Ketidakpuasan Pemangku Kepentingan	Ketidakpuasan pemangku kepentingan internal yang disampaikan melalui verbal/informal	Ketidakpuasan pemangku kepentingan eksternal yang disampaikan melalui verbal/informal	Ketidakpuasan yang tertuang dalam hasil meeting / pertemuan pembahasan formal	Menerima penyampaian ketidakpuasan/ peringatan secara tertulis (formal) dari pemangku kepentingan baik ditujukan langsung pada perusahaan ataupun disampaikan pada pihak eksternal terkait (i.e., LSM, regulator, lembaga terkait)	Menerima peringatan secara tertulis (formal) dengan disertai adanya sanksi , atau Adanya aksi protes /demo/ unrest dari pihak internal maupun eksternal perusahaan
<b>Hukum dan Kepatuhan</b>					



Pengukuran Dampak	1	2	3	4	5
	Tidak berarti	Ringan	Sedang	Besar	Kritikal
Sanksi dari regulator		Teguran lisan/informal dari regulator	Pelanggaran yang mengakibatkan adanya teguran secara tertulis dari regulator (teguran formal, surat peringatan formal)	Pelanggaran yang mengakibatkan adanya sanksi berupa denda dari regulator	Pelanggaran yang mengakibatkan sanksi pidana (seperti namun tidak terbatas pada denda pidana / ganti rugi kerugian negara) dan/atau ganti rugi perdata dan/atau pemutusan kontrak atau penghentian sementara dan/atau pencabutan izin layanan/ usaha kegiatan usaha dari regulator
Perselisihan	Tidak ada perselisihan	Timbulnya perselisihan yang dapat diselesaikan di luar pengadilan baik dengan cara verbal (lisan) maupun tertulis dan tidak adanya pemberian kompensasi	Timbulnya perselisihan yang dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan adanya pemberian kompensasi	Timbulnya perselisihan yang perlu diselesaikan melalui kesepakatan kedua belah pihak yang diperintahkan oleh pengadilan	Timbulnya perselisihan yang perlu diselesaikan oleh putusan hakim di pengadilan

Tabel 30 Kriteria Dampak Risiko

### Kriteria Kemungkinan

No	Pengukuran	Definisi	Data availability	Jarang	Kemungkinan Kecil	Mungkin Terjadi	Kemungkinan Besar	Hampir Pasti
				1	2	3	4	5
1a	Probabilitas	Probabilitas adalah ekspresi keyakinan confidence ) bahwa sebuah peristiwa akan terjadi (tidak ada catatan data sebelumnya). Probabilitas tidak memperkirakan seberapa besar kemungkinan itu akan terjadi, tetapi keyakinan kita untuk memprediksi hal tersebut akan/dapat terjadi berdasarkan professional judgment.	tidak ada/minim ketersediaan data historical	$0% < x \leq 20%$	$20% < x \leq 40%$	$40% < x \leq 60%$	$60% < x \leq 80%$	$80% < x < 100%$
1b	Persentase Kejadian	Seberapa besar persentase sebuah kejadian terjadi berkaca pada pengalaman historis	Terdapat data/pengalaman historical	Persentase kemungkinan terjadinya 5% dari volume total dalam 1 periode	Persentase kemungkinan terjadinya 5-10% dari volume total dalam 1 periode	Persentase kemungkinan terjadinya 10-20% dari volume total dalam 1 periode	Persentase kemungkinan terjadinya 20-50% dari volume total dalam 1 periode	Persentase kemungkinan terjadinya >50% dari volume total dalam 1 periode

No	Pengukuran	Definisi	Data availability	Jarang	Kemungkinan Kecil	Mungkin Terjadi	Kemungkinan Besar	Hampir Pasti
				1	2	3	4	5
2	Frekuensi	Frekuensi adalah ukuran jumlah kemunculan suatu kejadian yang berulang berdasarkan data. Pengukuran ini digunakan untuk kejadian dengan frekuensi sangat kecil (seperti bencana alam gempa/tsunami, pandemi, kebakaran, kerusakan, terrorist attack)	Terdapat data/pengalaman historical	Risiko terjadi <2 kali dalam 1 tahun	Risiko terjadi 2-4 kali dalam 1 tahun	Risiko terjadi 5-47kali dalam 1 tahun	Risiko terjadi 8-10 kali dalam 1 tahun	Risiko terjadi >10 kali dalam 1 tahun
				Risiko pernah terjadi sekali dalam 5 tahun terakhir, atau Risiko mungkin terjadi dalam waktu 5 tahun yang akan datang	Risiko pernah terjadi sekali dalam 4 tahun terakhir, atau Risiko mungkin terjadi dalam waktu 4 tahun yang akan datang	Risiko pernah terjadi sekali dalam 3 tahun terakhir, atau Risiko mungkin terjadi dalam waktu 3 tahun yang akan datang	Risiko pernah terjadi sekali dalam 2 tahun terakhir, atau Risiko mungkin terjadi dalam waktu 2 tahun yang akan datang	Risiko pernah terjadi sekali dalam 1 tahun terakhir, atau Risiko mungkin terjadi dalam waktu 1 tahun yang akan datang

Tabel 31 Kriteria Kemungkinan Terjadinya Risiko

**Level Risiko**

<b>DAMPAK</b>	5 Kritikal	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	4 Besar	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	3 Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
	2 Ringan	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi
	1 Tidak berarti	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Sedang
	1 Jarang	2 Kecil Kemungkinan	3 Mungkin Terjadi	4 Kemungkinan Besar	5 Hampir Pasti	
<b>PELUANG</b>						

## 7. Profil Risiko dan Peta Risiko Utama

Risiko Utama I			
<b>Identitas Risiko</b>			
Direktorat	Komersil dan Pengembangan Bisnis		
Divisi	Layanan Media dan Komunikasi		
Kategori Risiko BUMN	Business Risk of SOEs/General Business Risk/Market & Macroeconomic Risk		
Kategori Risiko Perusahaan	Strategis		
Sasaran	Target EBITDA sebesar Rp47,774 miliar		
Going Concern	Tidak		
<b>Uraian Risiko</b>			
Deskripsi	Penurunan pendapatan dari layanan komunikasi akibat penurunan daya beli pelanggan di tengah resesi.		
Penyebab	<p>IMF dan Bloomberg memperkirakan bahwa perekonomian dunia akan mengalami resesi pada 2023 sebagai akibat dari krisis suplai -- yang terjadi karena berlarut-larutnya perang Rusia dan Ukraina -- serta kebijakan bank sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga untuk mengerem laju inflasi di negara tersebut. Dua kondisi ini membuat ekonomi global akan tumbuh negatif, yang pada akhirnya akan menurunkan daya beli konsumen. Sementara itu, Indonesia sejauh ini masih diperkirakan tidak akan banyak terdampak pada resesi tersebut karena tidak banyak bergantung pada pasokan global -- bahkan justru ikut menikmati kenaikan harga komoditas, terutama minyak sawit. Namun, jika pemerintah gagal menjaga nilai tukar rupiah dan gagal memberikan alternatif impor barang-barang baku, maka Indonesia resesi global akan memukul perekonomian dalam negeri (lihat, kertas kerja)</p> <p>Studi menunjukkan bahwa resesi akan diikuti oleh penurunan belanja iklan dan marketing yang merupakan salah satu ladang pendapatan utama Perum LKBN Antara. Sepanjang dua resesi terakhir -- tahun 2008 dan 2020, belanja iklan dan marketing di media digital maupun tradisional turun sebesar 25 persen s/d 35 persen (lihat, kertas kerja). Turunnya belanja iklan ini akan berdampak langsung pada kinerja pendapatan Antara. Namun mengingat dampak resesi di Indonesia akan terbatas, maka kami mengasumsikan bahwa belanja iklan di Indonesia hanya akan turun sebesar 10 persen.</p> <p>Selain berdampak pada pendapatan dari layanan komunikasi, resesi juga akan menghambat rencana perusahaan dalam memaksimalkan dua aset baru diakuisisi perusahaan tahun ini, yaitu Wisma Grafika di Bogor dan Kantor Cabang PNRI di Ambon. Wisma Grafika yang rencananya akan menjadi salah satu pilihan untuk company retreat akan kesulitan mencari pelanggan pada masa resesi, demikian pula dengan bekas Kantor Cabang PNRI di Ambon yang akan menjadi gudang bagi industri di kota tersebut.</p>		
Dampak Finansial	Rp 5.610.000.000		
Penjelasan Dampak			
<b>Kontrol Eksisting</b>			
Kontrol Eksisting	Perusahaan belum mempunyai kontrol untuk mengantisipasi dampak resesi terhadap kinerja komersial		
Efektivitas Kontrol	-		
<b>Level Risiko</b>			
Peluang Inheren	4	<b>INHEREN</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
Dampak Inheren	5		
Peluang Residual	4	<b>RESIDUAL</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
Dampak Residual	5		
Target Peluang	4	<b>TARGET</b>	<b>SEDANG</b>
Target Dampak	2		
<b>Indikator</b>			
Indikator	Pendapatan triwulanan		
Batasan	Capaian per triwulan kurang lima persen dari target		
<b>Rencana Perlakuan</b>			

<b>Perlakuan I</b>	
Rencana	Fokus menyasar segmentasi pelanggan dengan kategori STAR (lihat, kertas kerja)
Biaya	0
Akhir Pelaksanaan	31 Desember 2023
Pelaksana	Divisi Layanan Media dan Komunikasi
<b>Perlakuan II</b>	
Rencana	Bekerja sama dengan biro untuk memasarkan produk layanan komunikasi perusahaan ke pemerintah daerah, BUMD, dan perusahaan-perusahaan di luar Jakarta dan sekitarnya
Biaya	0
Akhir Pelaksanaan	31 Desember 2023
Pelaksana	Divisi Layanan Media dan Komunikasi

<b>Risiko Utama II</b>			
<b>Identitas Risiko</b>			
Direktorat	Keuangan, MSDM, Umum, dan Manajemen Risiko		
Divisi	Keuangan		
Kategori Risiko BUMN	Business Portfolio Risks/Composition Risk/Finance Risk		
Kategori Risiko Perusahaan	Keuangan		
Gping Concern	Tidak		
Sasaran	Target EBITDA sebesar Rp47,774 miliar		
<b>Uraian Risiko</b>			
Deskripsi	Tidak terkontrolnya kenaikan biaya administrasi dan umum akibat biaya klaim kesehatan dan imbalan paska kerja		
Penyebab	Hal ini disebabkan oleh risiko yang tinggi dari biaya klaim kesehatan, dana pensiun, HPP Komersil serta Distribusi.  Tidak adanya pagu klaim kesehatan menimbulkan lepasnya kontrol dalam mengeluarkan biaya untuk klaim kesehatan karyawan. Klaim kesehatan dikategorikan menjadi tiga yaitu rawat inap, klinik, dan rawat jalan. Dari ketiga kategori tersebut, kategori yang paling beresiko adalah rawat inap dikarenakan memiliki deviasi paling tinggi yaitu 29%. Rata-rata klaim per tahunnya berkisar 9 juta per karyawan per tahun dan rata-rata karyawan yang mengklaim per tahunnya berkisar 417 orang. Jika hal tersebut tidak memiliki kontrol yang jelas, maka biaya untuk klaim kesehatan akan meningkat jika karyawan yang sakit meningkat lebih dari rata-rata 5 tahun sebelumnya.  Dikarenakan Ketidakpastian akan masa depan dan para pakar telah memprediksi kejadian resesi di tahun 2023, maka akan berdampak pada hasil investasi dari kinerja Dana Pensiun. Jika kinerja investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun di bawah Tingkat Bunga Teknis yang telah ditetapkan, maka akan berujung pada peningkatan iuran tambahan perusahaan kepada Dana Pensiun, Kinerja Dapen (Return Investment) dan penerimaan Iuran Mandiri		
Dampak Finansial	Rp 4.778.109.142,-		
Penjelasan Dampak	Dampak finansial tersebut merupakan hasil dari perhitungan perkiraan deviasi klaim kesehatan dan asumsi kinerja Dana Pensiun lebih rendah dari tingkat bunga teknis.		
<b>Kontrol Eksisting</b>			
Kontrol Eksisting	Setiap tiga tahun menyewa aktuaris untuk menghitung rasio solvabilitas dan mengkampanyekan penggunaan BPJS untuk klaim kesehatan		
Efektivitas Kontrol			
<b>Level Risiko</b>			
Peluang Inheren	5	<b>INHEREN</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
Dampak Inheren	5		
Peluang Residual	5	<b>RESIDUAL</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
Dampak Residual	5		
Target Peluang	2	<b>TARGET</b>	<b>RENDAH</b>
Target Dampak	2		
<b>Indikator</b>			

Indikator	Jumlah klaim kesehatan per triwulan
Batasan	Rp. 765.000.000.-
<b>Rencana Perlakuan</b>	
Perlakuan I	
Rencana	Menyusun dan menerapkan program insentif bagi karyawan untuk menjaga kesehatan
Biaya	0
Akhir Pelaksanaan	1 Maret 2023
Pelaksana	Direksi
Perlakuan II	
Rencana	Menetapkan pagu klaim kesehatan untuk karyawan
Biaya	0
Akhir Pelaksanaan	1 Maret 2023
Pelaksana	Divisi MSDM
Perlakuan II	
Rencana	Melakukan uji tuntas dan membuat road map pemenuhan rasio imbalan pasca kerja
Biaya	Rp. 390.000.000.-
Akhir Pelaksanaan	1 Juni 2023
Pelaksana	Divisi Keuangan

<b>Risiko Utama III</b>	
<b>Identitas Risiko</b>	
Direktorat	Pemberitaan
Divisi	
Kategori Risiko BUMN	Business Risk of SOEs/General Business Risks/Reputational Risk
Kategori Risiko Perusahaan	Operasional
Going Concern	Tidak
Sasaran	Tingkat kesalahan berita kurang dari 5 %
<b>Uraian Risiko</b>	
Deskripsi	Tidak terkontrolnya tingkat kesalahan berita pada masa jelang pemilu yang mengakibatkan penurunan pendapatan jasa komunikasi dan merusak hubungan dengan pemangku kepentingan
Penyebab	<p>Tahun 2023 merupakan tahun menjelang pemilu. Pada masa ini, berita-berita Antara akan fokus pada berita-berita politik yang secara inheren sangat sensitif -- yang diperparah dengan akan semakin banyaknya berita palsu yang beredar di media sosial. Jika tidak ditulis dengan menggunakan kaidah jurnalistik yang baik, berita-berita sensitif tersebut berpotensi dapat merusak hubungan perusahaan dengan calon pemangku kepentingan yang akan menduduki posisi kritical pemerintahan hasil pemilihan umum.</p> <p>Data sepanjang tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat kesalahan berita teks (baik kesalahan pada judul maupun pada paragraf pertama) masih berada di atas 10 persen. Dengan produksi berita teks sebanyak 200.000 setiap tahunnya, maka terdapat kemungkinan kesalahan berita sebesar 20.000 sepanjang tahun 2023 -- sebuah angka yang cukup signifikan, terutama pada masa-masa sensitif.</p> <p>Tingginya tingkat kesalahan tersebut menunjukkan bahwa sistem kontrol produksi berita teks Antara (penggunaan redaktur sebagai "mata kedua" dan sistem ticketing) masih belum efektif untuk meminimalkan kesalahan berita.</p>
Dampak Finansial	Rp 680.000.000
Penjelasan Dampak	<p>Data sepanjang tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa tingginya tingkat kesalahan akan diikuti oleh menurunnya tingkat kunjungan pada situs Antaranews pada tahun berikutnya. Sementara penurunan tingkat kunjungan situs Antaranews juga diikuti oleh penurunan pendapatan dari layanan bisnis komunikasi (lihat, kertas kerja).</p> <p>Sementara di sisi lain, kesalahan penulisan berita teks pada masa menjelang pemilu berpotensi akan merusak hubungan dengan pemangku kepentingan yang akan menduduki jabatan penting dalam pemerintahan yang akan datang</p>

<b>Kontrol Eksisting</b>			
Kontrol Eksisting		<ul style="list-style-type: none"> <li>sistem pewarta-redaktur, di mana redaktur berfungsi untuk memeriksa berita yang diproduksi pewarta -- baik dari sisi kaidah jurnalistik, substansi, kebenaran fakta, maupun gaya bahasa</li> <li>sistem ticketing -- pewarta harus mempunyai tiket sebelum memproduksi berita. Tujuan sistem ini adalah untuk mencegah berita-berita liar yang tidak direncanakan sebelumnya.</li> </ul>	
Efektivitas Kontrol	3		
<b>Level Risiko</b>			
Peluang Inheren	5	<b>INHEREN</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
Dampak Inheren	5		
Peluang Residual	3	<b>RESIDUAL</b>	<b>TINGGI</b>
Dampak Residual	4		
Target Peluang	2	<b>TARGET</b>	<b>SEDANG</b>
Target Dampak	3		
<b>Indikator</b>			
Indikator	Jumlah keluhan terhadap berita Antara setiap bulan		
Batasan	5		
<b>Rencana Perlakuan</b>			
Perlakuan I			
Rencana	Menentukan editorial standpoint yang jelas pada masa pemilu, dan mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada pemangku kepentingan kritikan. Editorial standpoint ini diharapkan dapat membuat pemangku kepentingan memahami sikap Antara selama masa menjelang pemilu.		
Biaya	0		
Akhir Pelaksanaan	1 Juni 2023		
Pelaksana	Tim 22		

<b>Risiko Utama IV</b>	
<b>Identitas Risiko</b>	
Direktorat	Pemberitaan
Divisi	
Kategori Risiko BUMN	Business Risks of SOEs/General Business Risks/Operasional Risk
Kategori Risiko Perusahaan	Operasional
Going Concern	Tidak
Sasaran	Target EBITDA sebesar Rp47,774 miliar
<b>Uraian Risiko</b>	
Deskripsi	Overproduksi berita PSO yang membuat beban umum dan administrasi naik melebihi target
Penyebab	<p>Salah satu penyebab utama dari risiko overproduksi PSO adalah ketidakmampuan perusahaan untuk memprediksi tingkat kelulusan berita teks pada rangkaian verifikasi berita oleh Kementerian Kominfo. Lolos tidaknya sebuah berita sulit diprediksi karena sangat bergantung pada subjektivitas verifikator dari kementerian dan pemenuhan persyaratan berita PSO -- yang biasanya baru disahkan pada kuartal kedua. Akibat dari sulitnya prediksi ini, perusahaan selama tiga tahun terakhir memilih untuk memperbanyak produksi berita-berita PSO jauh melampaui target dalam perjanjian kerja sama -- kebijakan ini dilakukan sebagai langkah aman agar jumlah berita yang lolos dapat mencapai target PKS.</p> <p>Selama tiga tahun terakhir, Antara memproduksi berita teks PSO konsisten memproduksi 200.000 berita teks meskipun perjanjian kerja hanya mensyaratkan sekitar 135.000. Meskipun overproduksi adalah langkah aman, namun hal ini juga meningkatkan risiko inefisiensi dan meningkatkan beban pokok produksi PSO melebihi target yang ditetapkan dalam RKAP.</p>
Dampak Finansial	Rp 1.511.938.461

Penjelasan Dampak	Selain inefisiensi yang meningkatkan beban, overproduksi juga berpotensi mengurangi kualitas berita karena pewarta dituntut untuk lebih mementingkan kuantitas dibanding kualitas berita		
<b>Kontrol Eksisting</b>			
Kontrol Eksisting	Antara mempunyai sistem ticketing yang diharapkan dapat menekan jumlah berita yang tidak diagendakan		
Efektivitas Kontrol	2		
<b>Level Risiko</b>			
Peluang Inheren	5	<b>INHEREN</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
Dampak Inheren	5		
Peluang Residual	4	<b>RESIDUAL</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
Dampak Residual	4		
Target Peluang	2	<b>TARGET</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>
Target Dampak	1		
<b>Indikator</b>			
Indikator	Jumlah berita bulanan		
Batasan	Maksimal 15% di atas target		
<b>Rencana Perlakuan</b>			
Perlakuan I			
Rencana	Membangun machine learning yang bisa memprediksi lolos tidaknya sebuah berita PSO, dengan menunjuk konsultan yang kompeten		
Biaya	300.000.000		
Akhir Pelaksanaan	30 Juni 2023		
Pelaksana	Divisi Informasi dan Teknologi, Redaksi, Manajemen Strategis		
Perlakuan II			
Rencana	Mengubah target cushion produksi berita, dari 15 persen pada semester pertama, menyesuaikan dengan evaluasi pencapaian enam bulan		
Biaya	0		
Akhir Pelaksanaan	15 Juni 2023		
Pelaksana	Redaksi		

<b>Risiko Utama V</b>	
<b>Identitas Risiko</b>	
Direktorat	Utama
Divisi	Informasi Teknologi
Kategori Risiko BUMN	Business Risks of SOEs/General Business Risks/Technology, Cyber & Information Security Risk
Kategori Risiko Perusahaan	Operasional
Going Concern	Tidak
Sasaran	Target EBITDA sebesar Rp47,774 miliar
<b>Uraian Risiko</b>	
Deskripsi	Ketidaksiapan perusahaan dalam menghadapi peningkatan serangan siber pada masa menjelang pemilu
Penyebab	<p>Kecenderungan serangan siber selalu meningkat pada masa menjelang pemilu karena beberapa faktor sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketidaksukaan pelaku serangan terhadap pemberitaan Antara,</li> <li>2. upaya menyebarkan berita bohong melalui situs berita kredibel -- seperti Antaranews -- dengan melakukan peretasan,</li> <li>3. tren pada 2018 -- satu tahun menjelang pemilu 2019 -- juga menunjukkan peningkatan serangan siber secara umum di Indonesia sehingga meningkatkan risiko serangan ke Antara.</li> </ol> <p>Sementara itu perusahaan berpotensi belum siap menghadapi serangan siber tersebut karena beberapa faktor berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. literasi digital yang masih rendah di kalangan karyawan sehingga rentan menjadi korban serangan phising yang berdampak ke perusahaan</li> </ol>



	2. perkembangan metode serangan yang begitu cepat sehingga sistem pertahanan internal terlambat mengantisipasi.		
Dampak Finansial	2.000.000.000		
Penjelasan Dampak	Serangan massif yang tidak tertangani akan membuat perusahaan berhenti beroperasi -- mengingat operasional pemberitaan sangat bergantung pada sistem teknologi informasi. Selain itu, perusahaan juga berpotensi kehilangan data-data, jika penyerang memutuskan untuk merusak data di server utama maupun cadangan.		
<b>Kontrol Eksisting</b>			
Kontrol Eksisting	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan sudah menerapkan kebijakan password kuat yang memaksa user untuk membuat password dengan kombinasi huruf, angka, dan karakter khusus.</li> <li>2. Sudah mempunyai lisensi firewall yang cukup</li> <li>3. Sudah menerapkan sistem otentikasi ganda.</li> </ol>		
Efektivitas Kontrol	3		
<b>Level Risiko</b>			
Peluang Inheren	5	<b>INHEREN</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
Dampak Inheren	5		
Peluang Residual	3	<b>RESIDUAL</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
Dampak Residual	5		
Target Peluang	3	<b>TARGET</b>	<b>TINGGI</b>
Target Dampak	3		
<b>Indikator</b>			
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survei literasi digital</li> <li>2. Jumlah serangan digital per triwulan</li> </ol>		
Batasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. &lt;60%</li> <li>2. 3</li> </ol>		
<b>Rencana Perlakuan</b>			
Perlakuan I			
Rencana	Melakukan pelatihan literasi digital kepada semua karyawan, terutama dalam hal keamanan siber		
Biaya			
Akhir Pelaksanaan	1 Juni 2023		
Pelaksana	Divisi IT		
Perlakuan II			
Rencana	Melakukan audit keamanan IT dengan pihak independen untuk mengevaluasi sistem keamanan IT perusahaan		
Biaya	100.000.000		
Akhir Pelaksanaan	1 Maret 2023		
Pelaksana	Divisi IT		
Perlakuan III			
Rencana			
Biaya			

<b>Risiko Utama VI</b>	
<b>Identitas Risiko</b>	
Direktorat	Keuangan, MSDM, dan Manajemen Risiko
Divisi	Keuangan
Kategori Risiko BUMN	Business Risk of SOEs/General Business Risks/Financial Risks
Kategori Risiko Perusahaan	Finansial
Going Concern	Tidak
Sasaran	Target EBITDA sebesar Rp47,774 miliar
<b>Uraian Risiko</b>	
Deskripsi	Potensi kenaikan suku bunga bank BI yang berakibat pada kenaikan bunga kredit investasi untuk penyelesaian rencana aksi korporasi
Penyebab	Salah satu rencana investasi besar yang akan dilakukan perusahaan pada tahun 2023 adalah renovasi kompleks Antara di Pasar Baru sebagai konsekuensi atas penjualan Wisma

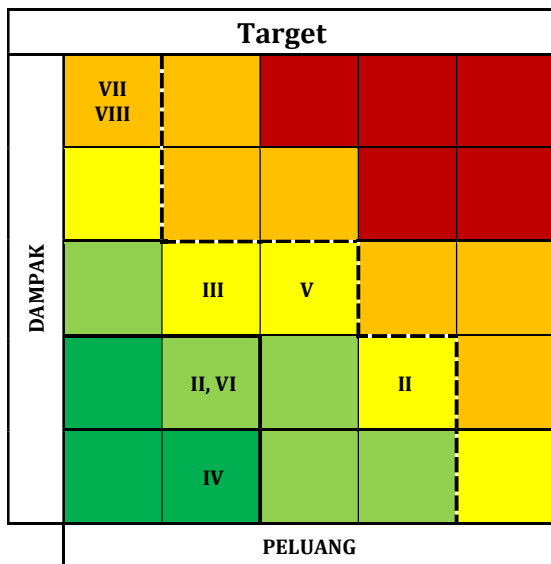
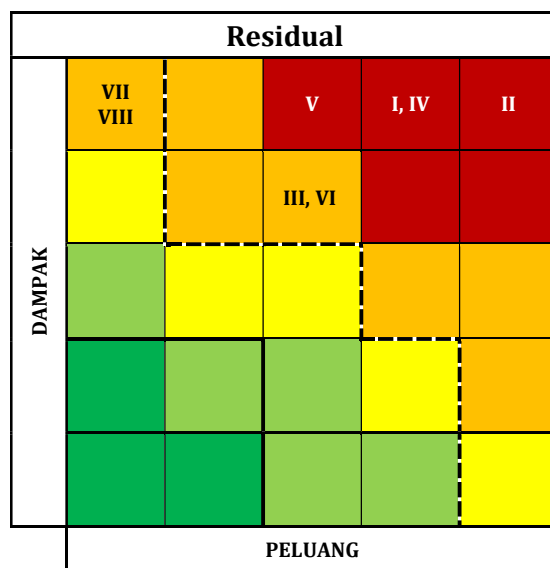
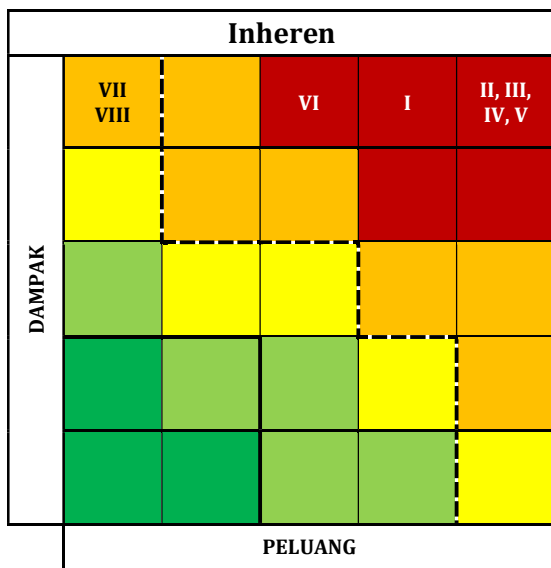
	<p>Antara. Investasi tersebut dilakukan pada masa resesi yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah, lesunya kegiatan ekonomi, dan meningkatnya suku bunga.</p> <p>Salah satu risiko yang paling mungkin terjadi – dalam konteks pembiayaan rencana aksi panca daya melalui pinjaman bank – adalah kenaikan suku bunga BI. Hubungan antara BI rate dan suku bunga kredit ini bersifat positif -- apabila BI rate mengalami kenaikan, maka suku bunga kredit juga akan mengalami peningkatan. Sedangkan bila BI rate mengalami penurunan, maka suku bunga kredit akan mengalami penurunan juga. Berikut data suku bunga Pinjaman Investasi dari Bank Perseroan dengan BI rate.</p> <p>Saat ini, Perum LKBN Antara menggunakan asumsi bunga kredit investasi sebesar 10 persen. Namun, simulasi yang dilakukan menunjukkan bahwa asumsi tersebut dapat berubah hingga 13 persen selama masa pinjaman – dengan tingkat kemungkinan sebesar 20%.</p> <p>Selain fluktuasi suku bunga BI selama satu dekade terakhir, penyebab lain adalah situasi perekonomian Indonesia yang akan terdampak resesi -- yang berpotensi memaksa Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga.</p>		
Dampak Finansial	1.498.750.000		
Penjelasan Dampak	Dampak di atas merupakan perhitungan atas kenaikan total cicilan yang harus ditanggung oleh perusahaan jika suku bunga kredit investasi naik dari 10% menjadi 13% pada tahun pertama dengan metode saldo menurun -- total kredit sebesar Rp55 miliar dan tenor lima tahun (lihat, kertas kerja)		
<b>Kontrol Eksisting</b>			
Kontrol Eksisting	Perusahaan tidak mempunyai kontrol eksisting untuk mengantisipasi risiko kenaikan suku bunga BI		
Efektivitas Kontrol	1		
<b>Level Risiko</b>			
Peluang Inheren	3	<b>INHEREN</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
Dampak Inheren	5		
Peluang Residual	3	<b>RESIDUAL</b>	<b>TINGGI</b>
Dampak Residual	4		
Target Peluang	2	<b>TARGET</b>	<b>RENDAH</b>
Target Dampak	2		
<b>Indikator</b>			
Indikator	Cost of fund dari bunga kredit perbankan		
Batasan	10%		
<b>Rencana Perlakuan</b>			
Perlakuan I			
Rencana	Menyiapkan dana cadangan untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga		
Biaya	0		
Akhir Pelaksanaan	31 Agustus 2023		
Pelaksana	Divisi LMK		

<b>Risiko Utama VII</b>	
<b>Identitas Risiko</b>	
Direktorat	Pemberitaan
Divisi	
Kategori Risiko BUMN	Business Risks of SOEs/General Business Risks/Political Risk
Kategori Risiko Perusahaan	Reputasi/Stakeholder Engagement
Going Concern	YA
Sasaran	Pendapatan PSO sebesar Rp 155,2 miliar
<b>Uraian Risiko</b>	
Deskripsi	Penunjukan media lain sebagai pelaksana PSO bidang Pers.
Penyebab	Eksternal: 1. Munculnya media lain yang mempunyai jaringan yang hampir setara dengan Antara dan dianggap mampu menjalankan PSO bidang Pers

	2. Tidak adanya regulasi setingkat Perpres atau yang lebih tinggi yang mengatur penunjukan Antara sebagai pelaksana PSO bidang Pers (saat ini hanya ada peraturan setingkat menteri -- PMK 014 tahun 2014)		
Dampak Finansial			
Penjelasan Dampak	PSO selama ini menyumbang sekitar 40 persen dari total pendapatan perusahaan, sehingga hilangnya pendapatan ini akan berdampak sistemik terhadap keberlangsung Antara		
<b>Kontrol Eksisting</b>			
Kontrol Eksisting	Perusahaan selalu melakukan menyerahkan laporan pelaksanaan PSO bidang pers setiap tahunnya, sebagai evaluasi atas keberhasilan Antara dalam menjalankan tugas negara		
Efektivitas Kontrol	3		
<b>Level Risiko</b>			
Peluang Inheren	1	<b>INHEREN</b>	<b>TINGGI</b>
Dampak Inheren	5		
Peluang Residual	1	<b>RESIDUAL</b>	<b>TINGGI</b>
Dampak Residual	5		
Target Peluang	1	<b>TARGET</b>	<b>TINGGI</b>
Target Dampak	5		
<b>Indikator</b>			
Indikator	Jumlah keluhan, baik formal maupun informal, dari pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika setiap bulannya		
Batasan	1		
<b>Rencana Perlakuan</b>			
Perlakuan I			
Rencana	Mengusulkan regulasi setingkat Perpres atau yang lebih tinggi untuk memastikan penunjukan Antara sebagai pelaksana PSO bidang Pers – dan berlaku selama beberapa tahun,		
Biaya	0		
Akhir Pelaksanaan	31 Desember 2023		
Pelaksana	Koordinator PSO		

<b>Risiko Utama VIII</b>			
<b>Identitas Risiko</b>			
Direktorat	Komersil dan Pengembangan Bisnis		
Divisi			
Kategori Risiko BUMN	Business Risks of SOEs/ General Business Risks/Third Party Risk		
Kategori Risiko Perusahaan	Reputasi/Stakeholder Engagement		
Sasaran	Target EBITDA sebesar Rp47,774 miliar		
<b>Uraian Risiko</b>			
Deskripsi	Pemutusan kontrak hubungan kerja dari mitra Bloomberg dan Refinitiv		
Penyebab	Eksternal: 1. Tidak ada lagi peraturan yang mengharuskan mitra kerja untuk bekerja sama dengan Antara, 2. Keinginan dari mitra kerja untuk memaksimalkan perolehan pendapatan tanpa harus ada pembagian dengan Antara, 3. Adanya pilihan untuk bekerja sama dengan mitra lain selain Antara		
Dampak Finansial			
Penjelasan Dampak	Layanan data finansial – yang bekerja sama dengan Bloomberg dan Revinitif – merupakan penyumbang pendapatan terbesar dari sisi komersial. Pendapatan dari layanan tersebut mencapai 60 persen dari total perolehan bisnis Antara setiap tahunnya. Hilangnya pendapatan dari sumber tersebut akan berdampak sistemik terhadap keberlangsungan Antara		
<b>Kontrol Eksisting</b>			
Kontrol Eksisting	Menjaga hubungan baik dengan Bloomberg dan Reuters		
Efektivitas Kontrol	3		
<b>Level Risiko</b>			
Peluang Inheren	1	<b>INHEREN</b>	<b>TINGGI</b>

Dampak Inheren	5		
Peluang Residual	1	<b>RESIDUAL</b>	<b>TINGGI</b>
Dampak Residual	5		
Target Peluang	1	<b>TARGET</b>	<b>TINGGI</b>
Target Dampak	5		
<b>Indikator</b>			
Indikator	Jumlah keluhan dari Revinitif dan Bloomberg setiap bulannya		
Batasan	1		
<b>Rencana Perlakuan</b>			
Perlakuan I			
Rencana	Secara mandiri membangun bisnis/teknologi sebagai penyedia jasa layanan keuangan – menginvestasikan sebagian pendapatan KSO untuk pengembangan teknologi		
Biaya	0		
Akhir Pelaksanaan	1 Juni 2023		
Pelaksana	Divisi Layanan Data		



Keterangan:

*Risiko level residual adalah level risiko setelah mempertimbangkan kontrol eksisting yang dimiliki oleh perusahaan. Sementara target adalah level risiko setelah mendapatkan perlakuan.*

----- = Garis Risk Appetite

————— = Garis Risk Tolerance

## 8. Target Penurunan Risiko

Sementara itu, target penurunan level risiko sebagaimana tergambar pada peta di atas merupakan target berdasarkan selera risiko perusahaan dan batas toleransi yang telah di tetapkan di atas. Target tersebut dapat tergambar pada gambar berikut:

Tabel 32 Target Penurunan Risiko (Risk Limit)

Deskripsi Risiko	Dampak risiko kuantitatif (inherent)	Dampak risiko kuantitatif (residual)	Prosen (%) proporsi dampak	KPI Pengendalian Risiko BEFORE RAS		KPI Pengendalian Risiko AFTER RAS	
				Target penurunan residual risk (berbasis BTR ops)	Target residual risk rtm pada akhir RKAP 2023	Target penurunan residual risk (berbasis BTR ops)	Target residual risk pada akhir 2023
Penurunan pendapatan dari layanan komunikasi akibat penurunan daya beli pelanggan di tengah resesi.	Rp5,610	Rp3,740	26.33%	Rp722	Rp3,018.37	Rp973	Rp2,766.84
Overproduksi berita PSO yang membuat beban pokok PSO naik melebihi target	Rp3,000	Rp1,511	10.64%	Rp292	Rp1,219.45	Rp393	Rp1,117.83
Tidak terkontrolnya tingkat kesalahan berita pada masa jelang pemilu yang mengakibatkan penurunan pendapatan jasa komunikasi dan merusak hubungan dengan pemangku kepentingan	Rp1,300	Rp680	4.79%	Rp131	Rp548.79	Rp177	Rp503.06
Ketidaksiapan perusahaan dalam menghadapi peningkatan serangan siber pada masa menjelang pemilu	Rp3,600	Rp2,000	14.08%	Rp386	Rp1,614.10	Rp520	Rp1,479.59

Deskripsi Risiko	Dampak risiko kuantitatif (inherent)	Dampak risiko kuantitatif (residual)	Prosen (%) proporsi dampak	KPI Pengendalian Risiko BEFORE RAS		KPI Pengendalian Risiko AFTER RAS	
				Target penurunan residual risk (berbasis BTR ops)	Target residual risk rtm pada akhir RKAP 2023	Target penurunan residual risk (berbasis BTR ops)	Target residual risk pada akhir 2023
Tidak terkontrolnya kenaikan biaya administrasi dan umum akibat biaya klaim kesehatan dan imbalan paska kerja	Rp6,000	Rp4,778	33.63%	Rp922	Rp3,856.09	Rp1,243	Rp3,534.74
Potensi kenaikan suku bunga bank BI yang berakibat pada kenaikan bunga kredit investasi untuk penyelesaian rencana aksi korporasi	Rp1,500	Rp1,498	10.54%	Rp289	Rp1,208.96	Rp390	Rp1,108.21
<b>Total</b>	<b>Rp21,010.00</b>	<b>Rp14,207.00</b>	<b>100%</b>	<b>Rp2,741</b>	<b>Rp11,466</b>	<b>Rp3,697</b>	<b>Rp10,510</b>
Selisih inheren - residual	<b>Rp6,803</b>						

### 9. Rincian target penurunan risiko per triwulan

Risiko Utama	Inherent			Residual Q1			Residual Q2			Residual Q3			Residual Q4		
	P	D	L	P	D	L	P	D	L	P	D	L	P	D	L
Penurunan pendapatan dari layanan komunikasi akibat penurunan daya beli pelanggan di tengah resesi.	4	5	20	4	5	20	4	4	16	4	3	12	4	2	8
Tidak terkontrolnya kenaikan biaya administrasi dan umum akibat biaya klaim kesehatan dan imbalan paska kerja	5	5	25	5	5	25	4	4	16	3	3	9	2	2	4
Tidak terkontrolnya tingkat kesalahan berita pada masa jelang pemilu yang mengakibatkan penurunan pendapatan jasa komunikasi dan merusak hubungan dengan pemangku kepentingan	5	5	25	3	4	12	3	4	12	2	3	6	2	3	6
Overproduksi berita PSO yang membuat beban umum dan administrasi naik melebihi target	5	5	25	4	5	20	4	3	12	3	2	6	2	1	2

Risiko Utama	Inherent			Residual Q1			Residual Q2			Residual Q3			Residual Q4		
	P	D	L	P	D	L	P	D	L	P	D	L	P	D	L
Ketidaksiapan perusahaan dalam menghadapi peningkatan serangan siber pada masa menjelang pemilu	5	5	25	3	5	15	3	4	12	3	3	9	3	3	9
Potensi kenaikan suku bunga bank BI yang berakibat pada kenaikan bunga kredit investasi untuk penyelesaian rencana aksi korporasi	3	5	15	3	4	12	3	3	9	2	3	6	2	2	4
Penunjukan media lain sebagai pelaksana PSO bidang Pers.	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5
Pemutusan kontrak hubungan kerja dari mitra Bloomberg dan Refinitiv	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5

## 10. Situasi dan Klasifikasi Risiko Perum LKBN Antara Berdasarkan Permen-5

Untuk menindaklanjuti Permen BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022, berikut hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) atas klasifikasi risiko Perum LKBN Antara tahun 2022 secara ringkas sebagai berikut:

Aspek	Hasil Penilaian
Kesesuaian dengan ketentuan Permen-5	Sebagian besar aturan internal perusahaan, struktur organisasi, dan praktik yang dijalankan perusahaan selama satu tahun terakhir telah sesuai dengan Permen-5 tentang Penerapan Manajeme Risiko pada BUMN. Lihat lampiran untuk detail kesesuaian.
Intensitas risiko:	
a. Intensitas pada induk	Dimensi Ukuran : KECIL Dimensi Kompleksitas: TINGGI Kuadran Klasifikasi: Sistemik B
b. Intensitas pada anak Perusahaan	Dimensi Ukuran : BESAR Dimensi Kompleksitas: TINGGI Kuadran Klasifikasi: Sistemik A

## 1. Matrix kesesuaian situasi Perum LKBN Antara dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022

Pasal Permen-5	Keterangan
Pasal 7 tentang Kategori BUMN (Konglomerasi atau Individu)	<b>INDIVIDU</b> . Kontribusi anak perusahaan yang dimiliki oleh Perum LKBN Antara masih di bawah dari 20 persen dari total pendapatan induk.
Pasal 8 tentang <i>three lines model</i>	Perusahaan sudah menerapkan model tiga lini sebagaimana disyaratkan oleh pasal ini – dengan ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah ditetapkan Perum LKBN Antara
Pasal 10 (3) tentang ukuran BUMN	Perum LKBN Antara merupakan BUMN berukuran <b>KECIL</b> dengan total aset kurang dari satu triliun rupiah
Pasal 10 (4) tentang kompleksitas BUMN	Perum LKBN Antara memiliki <b>kompleksitas tinggi</b> karena menjalankan kewajiban pelayanan umum ( <i>public service obligation</i> ) dan memiliki hubungan kelembagaan strategis dengan lebih dari satu kementerian teknis
Pasal 10 (6) tentang klasifikasi dalam posisi kuadran	Berada dalam kuadran <b>Sistemik B</b> , yaitu BUMN berukuran kecil dengan kompleksitas tinggi
Pasal 13 tentang organ pengelola manajemen risiko	Karena berada dalam klasifikasi Sistemik B dan berkategori Individu, maka Perum LKBN Antara wajib memiliki organ pengelola risiko sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Pengawas</li> <li>• Direksi</li> <li>• Komite Audit (<i>ket: sudah ada</i>)</li> <li>• Komite Pemantau Risiko yang dirangkap oleh Komite Tata Kelola Integrasi (<i>ket: sudah ada Komite Pemantau Risiko, namun jabatan tersebut belum dirangkap dengan Komite Tata Kelola Integrasi</i>)</li> <li>• Direktur yang membidangi pengelolaan risiko (<i>ket: dirangkap oleh Direktur Keuangan</i>)</li> <li>• Direktur yang membidangi keuangan (<i>ket: dirangkap oleh Direktur Manajemen Risiko</i>)</li> </ul>
Pasal 14 – 21 tentang fungsi organ pengelola risiko	Sudah sesuai dengan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang dimiliki perusahaan, dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas antar organ pengelola manajemen risiko yang dimiliki
Pasal 22 tentang Taksonomi Risiko	Perusahaan sudah memiliki taksonomi risiko – dan akan disesuaikan dengan taksonomi yang ditetapkan Kementerian BUMN
Pasal 23 tentang Kebijakan Manajemen Risiko	Sebagian besar sesuai dengan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang dimiliki perusahaan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan risiko sesuai dengan taksonomi</li> <li>• Penetapan penggunaan metode pengukuran</li> <li>• Penentuan limit dan toleransi risiko</li> </ul>



Pasal Permen-5	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem informasi yang mencakup eksposur dan realisasi pelaksanaan</li> </ul> <p>Namun yang belum dimiliki oleh perusahaan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk</li> </ul>
Pasal 24-25 tentang Sistem Pengendalian Intern	Sudah sesuai dengan bab terkait "Perbaikan Berkelanjutan" dalam Pedoman Manajemen Terintegrasi Perum LKBN Antara
Pasal 26 tentang penyesuaian pedoman internal dengan Permen-5	<p>Beberapa pedoman internal yang telah sesuai dengan Permen-5 adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Piagam Dewan Pengawas tentang komitmen pengelolaan risiko, dan organ-organnya</li> <li>Piagam Direksi tentang komitmen pengelolaan risiko</li> <li>Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi</li> </ul> <p>Sementara aturan internal yang masih harus disesuaikan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rangkap jabatan antara Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Integrasi</li> <li>Pedoman Audit Internal</li> </ul>
Pasal 27 tentang penyusunan RKAP	<p>Perusahaan sudah menyusun perencanaan Manajemen Risiko dalam RKAP, sesuai dengan pasal ini, yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Profil risiko</li> <li>Peta risiko</li> <li>Target perhitungan risiko inheren dan residual</li> <li>Rencana pelaksanaan mitigasi dan biayanya</li> </ul>
Pasal 30 tentang laporan Manajemen Risiko	<p>Perusahaan telah secara rutin menyerahkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan persyaratan Permen-5</li> <li>Laporan audit internal</li> <li>Laporan <i>Risk Maturity Index</i> dengan nilai 3,42 pada tahun 2022, naik dari 2,42 pada tahun sebelumnya.</li> </ul> <p>Namun demikian, perusahaan belum melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tata Kelola Integrasi</li> </ul>

## 2. Pemetaan posisi Perum LKBN Antara berdasarkan tingkat intensitas risiko

### a. Posisi BUMN dalam klasifikasi risiko

#### ***Dimensi Ukuran: KECIL***

Perum LKBN Antara adalah BUMN dengan ukuran kecil dengan aset kurang dari Rp100 triliun. Berikut merupakan jumlah aset perusahaan dalam laporan audited selama tiga tahun terakhir:

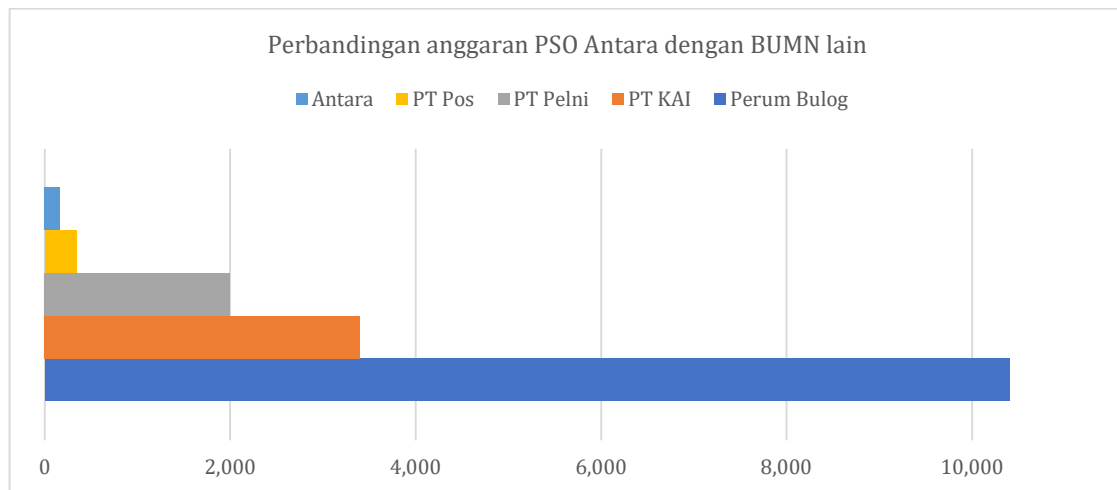
	2021	2020	2019
Aset Lancar	Rp 194,120,766,571	Rp 184,163,071,680	Rp 164,386,732,821
Aset Tidak Lancar	Rp 82,020,953,987	Rp 85,628,328,401	Rp 78,758,310,117
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>Rp 276,141,720,558</b>	<b>Rp 269,791,400,081</b>	<b>Rp 243,145,042,938</b>

#### ***Dimensi Kompleksitas: TINGGI***

Syarat	Antara
Menjalankan kewajiban PSO	<b>YA</b>
Memiliki hubungan kelembagaan strategis dengan kementerian teknis	<b>YA</b> dengan Kominfo dan KSP

Memiliki pangsa pasar atau barang/jasa yang sulit tergantikan oleh swasta (statusnya hampir monopoli)	<b>TIDAK</b> kompetitor banyak
Memiliki struktur korporasi kompleks: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki lebih dari lima anak perusahaan</li> <li>• Memiliki anak perusahaan di luar negeri</li> <li>• Memiliki perusahaan JV untuk proyek dengan skema <i>project finance</i></li> </ul>	<b>TIDAK</b>
Memiliki interkoneksi tinggi dengan BUMN lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah transaksi dengan sesama BUMN <math>\geq 20\%</math> dari total transaksi</li> <li>• Memiliki interdependensi signifikan dengan BUMN lain</li> </ul>	<b>TIDAK</b> transaksi dengan BUMN lain 14.5%
<b>Kesimpulan</b>	<b>TINGGI</b>

Berdasarkan tabel pemenuhan syarat di atas, seharusnya masuk dalam kategori BUMN dengan dimensi kompleksitas yang tinggi karena memenuhi dua dari lima syarat yang ada – mengemban penugasan negara untuk PSO bidang Pers dan mempunyai lebih dari satu kementerian teknis. Namun demikian, kondisi yang ada di Perum LKBN Antara adalah nilai penugasan PSO sebesar Rp 160 Milyar atau 40% dari total penjualan (omset) perusahaan, dan bahwa seluruh tagihan Pemerintah dapat diselesaikan atau selalu dapat dibayar pada tahun yang bersangkutan. Berikut disampaikan perbandingan anggaran PSO Perum LKBN Antara dengan PSO pada BUMN lain, dimana dapat disampaikan bahwa penerimaan PSO perusahaan jauh lebih rendah dari PSO/Subsidi yang diterima oleh BUMN lain.



Berdasarkan perbandingan di atas, terlihat bahwa anggaran PSO untuk Antara jauh lebih kecil dari BUMN-BUMN serupa yang menerima penugasan negara. Kondisi ini dapat menjadi pertimbangan untuk penilaian lebih lanjut untuk penempatan Perum LKBN Antara sebagai BUMN dengan kompleksitas tinggi.

**b. Posisi anak dan cucu perusahaan dalam klasifikasi risiko**

**Dimensi Ukuran: BESAR**

Berdasarkan ketentuan dalam panduan pengisian self assesment dalam surat S-42/DKU.MBU/10/2022, anak perusahaan dikategorikan BESAR jika total modal anak perusahaan (didefinisikan sebagai semua item dalam ekuitas) lebih besar dari lima persen modal konsolidasi. Berikut adalah total modal konsolidasi dan anak perusahaan dalam laporan keuangan per 30 September 2022 (inhouse):

<b>Total modal konsolidasi</b>	Rp81,596
<b>Total modal ETP</b>	Rp30,000
<b>Prosentase</b>	36.8%

Dengan demikian, ukuran anak perusahaan adalah BESAR

**Dimensi Kompleksitas: TINGGI**

Syarat	Antara-ETP
Menjalankan kewajiban PSO	<b>TIDAK</b>
Memiliki hubungan kelembagaan strategis dengan kementerian teknis	<b>YA</b> BI dan OJK
Memiliki pangsa pasar atau barang/jasa yang sulit tergantikan oleh swasta (statusnya hampir monopoli)	<b>YA</b> Penyedia ETP hanya dibatasi tiga perusahaan (relatif monopoli)
Memiliki struktur korporasi kompleks: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki lebih dari lima anak perusahaan</li> <li>• Memiliki anak perusahaan di luar negeri</li> <li>• Memiliki perusahaan JV untuk proyek dengan skema <i>project finance</i></li> </ul>	<b>TIDAK</b>
Memiliki interkoneksi tinggi dengan BUMN lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah transaksi dengan sesama BUMN <math>\geq 20\%</math> dari total transaksi</li> <li>• Memiliki interdependensi signifikan dengan BUMN lain</li> </ul>	<b>YA</b> transaksi dengan BUMN lain diperkirakan lebih dari 50%
<b>Kesimpulan</b>	<b>TINGGI</b>

PT Antara ETP, dengan bisnis utama yaitu sebagai penyedia *Electronic Trading Platform*, memiliki kompleksitas tinggi karena perusahaan menjalin hubungan dengan Lembaga-lembaga strategis yaitu Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), KPEI. Perusahaan PT Antara ETP juga memiliki pangsa pasar yang sulit tergantikan oleh swasta karena sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI), maka di Indonesia hanya diijinkan 3 (tiga) perusahaan penyedia ETP. PT Antara ETP juga memiliki interkoneksi yang tinggi terhadap BUMN lain yaitu BUMN yang tergabung dalam Himbara (Himpunan Bank Negara), dengan jumlah transaksi diperkirakan lebih dari 50%.

PT Antara ETP adalah anak perusahaan Perum LKBN Antara yang merupakan pengalihan bisnis sebelumnya yaitu Antara Digital Media (dahulu PT IMQ Multimedia Utama) yang menjalankan bisnis distribusi media melalui i-media dan videotron di seluruh Indonesia dan luar negeri. Perubahan nama anak perusahaan (dari PT IMQ menjadi PT Antara ETP) dilakukan pada Januari 2022 guna memenuhi ketentuan Bank Indonesia, di mana bisnis usaha PT Antara ETP hanya berfokus pada penyediaan *Electronic Trading Platform* dan akan beroperasi pada 2023.

Kondisi anak perusahaan sebagaimana disampaikan di atas dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan posisi intensitas risiko Perum LKBN Antara.

## BAB VII ASPIRASI PEMEGANG SAHAM

### 1. Aspirasi Pemegang Saham Dalam Fungsi Keuangan, Manajemen Risiko, SDM, Teknologi Informasi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

#### 1.1. Fungsi Keuangan

- a. Audit atas laporan keuangan dan pelaksanaan Audit Upon Procedure (AUP) direncanakan selesai pada bulan Februari 2023 sebagaimana harapan para pemegang saham pada APS.
- b. Pemegang saham juga berharap agar seluruh BUMN dapat meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan dengan ketentuan minimum opini auditor terhadap laporan keuangan audited BUMN pada level Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sejak beberapa tahun terakhir, Antara selalu mendapatkan opini WTP.
- c. Sementara itu, LKBN Antara telah menyesuaikan sejumlah target keuangan dengan aspirasi pemegang saham sebagaimana berikut: Tunggu keuangan
  - a) *Ekspansi berkesinambungan* yang diukur dengan:
    - Pertumbuhan EBITDA dan CFO. Pada tahun 2023, perusahaan menargetkan arus kas operasi tumbuh sebesar 1062,87% persen menjadi sekitar Rp52,59 miliar, sementara EBITDA juga akan tumbuh sebesar 15 persen menjadi sekitar Rp47,77 miliar. Di sisi lain, laba bersih akan turun sebesar persen 83% (dari prognosa tahun 2022 diluar perhitungan penjualan gedung Wisma Antara) menjadi Rp22,50 miliar.
    - *Net Profit* dengan target pada 2023 sebesar Rp22,49 miliar.
  - b) Pada tahun ini, Antara ditargetkan memenuhi aspirasi pemegang saham dengan nilai ROIC yang lebih besar dari WACC. Perbandingan *return on invested capital* (ROIC) dengan *weighted average cost of capital* (WACC) adalah 11,13:9,52%.
  - c) Aspirasi pemegang saham mengharapkan BUMN untuk secara bertahap dan jangka panjang dapat mempertahankan rasio keuangan yang sehat dengan peringkat *investment grade* seperti *financing debt to invested capital* pada kisaran 18,34% dan *financing debt to EBITDA* pada 115% atau 1,15 kali.
- d. Antara selalu mengikutsertakan Kementerian BUMN dalam pembahasan perencanaan penugasan dan mengusulkan penetapan penugasan dalam RUPS RKAP, sesuai dengan Undang Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005.

#### 1.2. Fungsi Manajemen Risiko

- a. Perencanaan dan Strategi Risiko:
  - a) RKAP 2023 LKBN Antara didasari oleh penetapan target risiko, toleransi risiko (*risk tolerance*), batas risiko (*risk limit*), dan selera risiko (*risk appetite*) sesuai arahan dari pemegang saham (KBUMN).
  - b) *Risk appetite* pada RKAP 2023 disusun sesuai dengan arahan pada APS yang tercantum dalam butir C halaman 5.
  - c) Strategi risiko Antara mendapatkan persetujuan dari Dewas melalui penandatanganan bersama *risk appetite statement* dan meliputi *risk appetite threshold* dari masing-masing *risk appetite metric* berdasarkan taksonomi risiko Antara.

- d) *Top risk* Antara disusun dan diintegrasikan dengan anak perusahaan sesuai taksonomi risiko BUMN.
- e) *Top Risk* sudah memuat risiko yang berkaitan dengan pencapaian target dan terkait dengan going concern dalam jangka waktu lebih 1 tahun di periode RKAP 2023.
- f) Masing-masing *top risk* pada RKAP 2023 telah memuat *Key Risk Indicators* (KRI) yang dilengkapi dengan parameter dan formula masing-masing dan memiliki threshold dengan tiga kategori sesuai APS.
- g) Pengukuran *top risk* Antara selaras dengan kriteria dan arahan dari KBUMN.
- h) Risk register pada *top risk* Antara sudah menampilkan informasi sebagai berikut:
  - Tabel terdiri dari: i) sasaran, (ii) jenis/kategori risiko sesuai dengan taksonomi risiko KBUMN, (iii) peristiwa risiko (*risk event*), (iv) penyebab risiko, (v) dampak risiko kuantitatif rupiah (wajib ada dengan menghitung dampak pada tahun berjalan), (vi) penjelasan dampak risiko, (vii) kontrol eksisting, (viii) penilaian efektifitas kontrol, (ix) tingkat kemungkinan risiko inheren, (x) tingkat dampak risiko inheren, (xi) level risiko inheren, (xii) rencana penanganan risiko, (xiii) target waktu penanganan, (xiv) tingkat kemungkinan risiko residual setiap triwulan, (xv) tingkat dampak risiko residual setiap triwulan, (xvi) level risiko residual setiap triwulan, (xvii) dampak risiko kuantitatif residual setiap triwulan (wajib ada), (xviii) penjelasan dampak risiko residual setiap triwulan.
  - Peta risiko (*heatmap*) yang memuat *heatmap* risiko inheren di awal tahun dan risiko residual di akhir tahun.
  - *Timeline* penanganan risiko yang memuat (i) rencana penanganan risiko, (ii) breakdown rencana penanganan, (iii) output masing-masing *breakdown* rencana penanganan, (iv) waktu penanganan yang di- *breakdown* secara bulanan, (v) Biaya penanganan risiko, (vi) PIC yang bertanggungjawab.
- i) Pelaksanaan dan monitoring risiko baik dari segi penyusunan, pedoman dan klasifikasi risiko dilaksanakan sesuai dengan APS dan rutin dilaporkan secara berkala ke KBUMN sesuai dengan arahan pada APS . Direksi ikut serta secara aktif dalam mengurus risiko dan diawasi oleh Dewas.
- j) Antara sudah melakukan evaluasi resiko dan perbaikan berkelanjutan dengan Risk Maturity Index (RMI) pada 2021 sebesar 2,32 menjadi 3.42 di tahun 2022.

### 1.3. Fungsi Sumber Daya Manusia

- a. Dalam rangka meningkatkan inklusivitas untuk menciptakan ekosistem kerja yang dinamis dan agile Antara akan melaporkan progress kajian dan/atau rencana implementasi *Talent Management* di induk dan anak perusahaan terkait dengan *talent development, career path dan job grading*. Hal tersebut sudah tertuang dalam RJPP 2020-2024.
- b. Mengenai kesiapan sumber daya antara lain kebijakan, sistem, *human capital*, anggaran dan implementasi *Talent Mobility* akan dilaporkan sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri BUMN Nomor S-580/MBU/09/2022 tanggal 16 September 2022 hal Aspirasi Perputaran Talenta (*Talent Mobility*) BUMN.
- c. Sesuai dengan aspirasi pemegang saham untuk rencana kerja 2023, Antara telah mempunyai *blueprint* pemenuhan amanat undang-undang tentang penyandang disabilitas yang telah disampaikan dalam RJPP perusahaan tahun 2020 – 2024. Hingga 2022, perusahaan telah mempekerjakan disabilitas sebanyak 8 Orang.
- d. Sementara itu target indikator pengembangan talenta perusahaan pada 2023 adalah sebagai berikut;

No	Indikator	Formula	Target 2022	Target 2023
1	Rasio milenial dalam <i>nominated talent</i>	$\frac{\text{Jumlah top talent (< 42)}}{\text{Jumlah nominated talent}} \times 100\%$	18%	19%
2	Rasio perempuan dalam <i>nominated talent</i>	$\frac{\text{Jumlah nominated talent perempuan}}{\text{Jumlah nominated talent}} \times 100\%$	18%	20%

Tabel 33 Target Pengembangan Talenta Sesuai APS Tahun 2023

#### 1.4. Fungsi Teknologi dan Teknologi Informasi

- Antara telah memiliki *Master Plan* Teknologi Informasi (MPTI) dan progress ini disampaikan dalam lapornan manajemen triwulan serta tahunan.
- Pada awal tahun 2022, Antara juga sudah melaksanakan penilaian IT *maturity level* dengan skor 1,78. Pada tahun 2023, Antara akan merencanakan program terkait pemenuhan gap IT *Maturity* agar sesuai dengan harapan pemangku saham (minimal level 3).
- Penilaian INDI 4.0 sudah dilakukan pada Januari 2022, Antara juga sudah membentuk tim transformasi INDI 4.0 sesuai instruksi Direksi. Pelaksanaan assesmen bekerja sama dengan Lembaga asesor B4T Kementerian Perindustrian RI pada 29 Juni hingga 1 Juli 2022, dan hingga September 2022 masih menunggu hasil akhir penilaian dari tim B4T. Rencana pembuatan gap untuk *roadmap* INDI 4.0 kan dilakukan setelah hasil assesmen 2022 selesai.
- Antara sudah mengalokasikan 5% talenta perusahaan untuk mengikuti program *Making Digital Talent* BUMN pada tahun 2022 dan pada 2023 Antara merencanakan target kepesertaan sebesar 7% (organik dan non organik) sesuai yang tercantum pada APS.
- Antara akan berupaya mengembangkan budaya inovasi dan kerjasama melalui BUMN *research institute* dalam/antar klaster dan mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi.

#### 1.5. Fungsi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

- Sesuai dengan aspirasi pemegang saham, program TJSJ LKBN Antara pada tahun 2023 fokus terhadap 3 bidang yaitu: Pendidikan, Lingkungan dan Pengembangan UMK.
- Antara berupaya menjalankan program TJSJ dengan meningkatkan kolaborasi dengan sesama BUMN ataupun dengan lembaga/pihak lainnya dengan tetap berkontribusi atas pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Pelaksanaan penagihan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) serta memberikan pembinaan terhadap UMK akan dioptimalisasi pada tahun anggaran 2023.
- Antara tetap berupaya mengkomunikasikan program TJSJ BUMN dengan mengedepankan asas kemanfaatan atas program TJSJ terlebih dari sisi penerima manfaat.
- Usulan Program TJSJ pada KPI Tahun 2023 sesuai dengan target kinerja program TJSJ sbb:

No	Program APS	Target APS	Keterangan	Program TJSJ Antara
1	Melakukan pengukuran dampak terhadap program TJSJ dengan menggunakan metode <i>Social Return On Investment</i> (SROI)	Minimal 3 (tiga) program yang di ukur dampaknya dengan metode SROI, baik dilakukan secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak lain yang berkompeten	Pengukuran SROI dapat dilakukan secara mandiri atau melalui pihak ketiga, minimal Dengan indikator penghematan sumber daya yang digunakan perusahaan ataupun peningkatan profit/labaperusahaan. SROI Ratio: Present Value/ Value of Input	1. Uji Kompetensi Wartawan Non ANTARA dan wartawan lepas ANTARA (kontributor, stringer, video jurnalis) dalam rangka memfasilitasi 30 wartawan lokal non Antara untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi dari Dewan Pers.  2. Pelatihan wartawan dalam rangka peningkatan kapasitas
2	Menetapkan kebijakan <i>levelling</i>	Kebijakan Direksi atas <i>levelling</i> unit	Berdasarkan <i>best practice</i> , pelaksanaan program TJSJ di	

No	Program APS	Target APS	Keterangan	Program TJSL Antara
	unit kerja TJSL menjadi setingkat BOD-1 atau disesuaikan dengan hasil kajian terkait hal tersebut.	kerja TJSL berdasarkan hasil kajian terkait hal tersebut.	BUMN akan berjalan efektif jika berada di level setingkat di Bawah Direksi yang secara khusus memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola struktur organisasi TJSL. Namun hal ini juga perlu didasari pertimbangan kajian dimasing-masing perusahaan.	pada 100 wartawan lokal non ANTARA.  3. Literasi media dalam rangka edukasi jurnalistik kepada pelajar/mahasiswa melalui program Antara goes to School/Campus.  4. Memberikan sumbangan Beasiswa Pendidikan melalui Yayasan BUMN.
3	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam program TJSL, termasuk untuk pemenuhan pengisian sistem informasi berbasis teknologi informasi Kementerian BUMN.	Terpenuhinya data pelaporan program TJSL yang lengkap dan tepat waktu.	Ketersediaan data informasi yang lengkap dibutuhkan dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan program TJSL. Untuk itu keberadaan sistem informasi melalui Portal TJSL menjadi bagian penting sebagai <i>tools</i> untuk mengevaluasi dan memonitor.	5. Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada UMKM untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas 6. Bantuan bencana alam kepada daerah yang terkena musibah atas perubahan iklim di Indonesia.
4	Meningkatkan kolaborasi antar BUMN maupun dengan pihak lain yang sesuai kompetensinya dalam pelaksanaan program TJSL, dengan tujuan untuk meningkatkan dampak positif program.	Masing-masing minimal 1 (satu) program kolaborasi pada setiap bidang prioritas (Pendidikan, Lingkungan, dan Pengembangan UMK).	Dengan kolaborasi diharapkan bisa mengeskalasi dampak yang didapatkan dari program TJSL, sehingga perlu adanya keterlibatan dari berbagai pihak yang terlibat.	7. Program Transplantasi Terumbu Karang di wilayah perairan yang harus di revitalisasi. 8. Program penghijauan/penanaman pohon di wilayah yang terdampak erosi.
5	Melibatkan peran serta karyawan secara aktif dalam program TJSL	Setiap karyawan terlibat dalam minimal 1 kegiatan sosial kemasyarakatan baik yang berasal dari Program TJSL maupun dari luar Program TJSL	Perlu adanya dorongan bagi karyawan agar dapat terlibat aktif di berbagai kegiatan sosial baik di sekitar perusahaan maupun di sekitar area tempat tinggalnya. Untuk menumbuhkan rasa empati dan kepedulian untuk mendukung pencapaian program TJSL.	

Tabel 34 Kesesuaian program TJSL Antara dengan APS

## 1.6. Fungsi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

- Antara memuat rencana upaya tindak lanjut atas rekomendasi audit kepatuhan baik yang masih merupakan temuan berulang maupun temuan baru yang memerlukan langkah-langkah penyelesaian.
- Antara melakukan upaya penanganan permasalahan hukum dengan mengedepankan proses mediasi penyelesaian masalah hukum baik antar/terkait BUMN/anak perusahaan BUMN/perusahaan yang terafiliasi, sebelum permasalahan tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan (pengadilan atau arbitrase) jika terjadi permasalahan hukum.
- Pada semester 1 tahun 2022, perusahaan sempat menghadapi beberapa perkara hukum baik dari eksternal dan internal, diantaranya yaitu:



- a) Gugatan terhadap berita yang ditayangkan pada tahun 2016 terhadap LKBN Antara dan lima (5) media lainnya di Pengadilan Negeri Makassar dengan Perkara Perdata No. 1/Pd G/2022/PN Mks. LKBN Antara sebagai salah satu tergugat telah mengikuti proses persidangan yang telah berjalan selama kurang lebih lima bulan. Pada 8 September 2022, Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan atas perkara tersebut yang menyatakan bahwa gugatan ditolak. Namun, setelah putusan tersebut penggugat menyampaikan banding ke Pengadilan Tinggi, sehingga putusan perkara tersebut hingga saat ini belum memiliki ketetapan hukum. Antara berpartisipasi dan mendukung proses pengembangan Portal Aset BUMN yang sedang dikembangkan oleh Kementerian BUMN melalui penginputan data sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang ditetapkan dan sesuai dengan keadaan di lapangan, serta memberikan dukungan lain yang diperlukan dalam pengembangan Portal Aset BUMN.
- b) Adanya pengajuan mediasi dari Serikat Pekerja Antara untuk permasalahan hubungan industrial di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta dan Kementerian Ketenagakerjaan RI. Adapun hal menjadi permasalahan adalah tuntutan dari Serikat Pekerja adalah kebijakan pemberian uang transport akibat penerapan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) serta tuntutan untuk segera melakukan perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Terhadap kedua hal di atas, perusahaan telah melakukan tindak lanjut sesuai proses yang berlaku.
- d. Antara dalam proses menyelesaikan penyusunan/penyempurnaan SOP yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN.

## 2. Key Performance Indicators (Indikator Kinerja Utama)

No	Indikator	ESG	88 PS	Satuan	Target	Polaritas	Bobot	
							Sub	Total
<b>I</b>	<b>NILAI EKONOMI UNTUK INDONESIA</b>							<b>36</b>
	<b>Finansial</b>							
1	EBITDA	C		Miliar	47,77	Maximize	7	
2	ROIC >= WACC	C		Prosentase	1,60	Maximize	4	
3	Interest Bearing Debt							
	a. Interest Bearing Debt to EBITDA	G		Kali	1,1	Minimize	7	11
	b. Interest Bearing Debt to Invested Capital			Prosentase	18,34	Minimize	4	
	<b>Operasional</b>							
4	Diseminasi berita Pemilu untuk meningkatkan kesadaran terhadap pendidikan pemilih di 38 Provinsi	G		Jumlah	64	Maximize	7	
	<b>Sosial</b>							
5	Peningkatan Kompetensi Wartawan Non Antara	S		Jumlah	30	Maximize	7	
<b>II</b>	<b>INOVASI MODEL BISNIS</b>							<b>20</b>
6	Jumlah Inovasi penunjang Performa Perusahaan	C		Jumlah	2	Maximize	7	
7	Pengembangan Platform Antara ETP untuk partisipan trading offshore melalui Conduit Model	C		Prosentase	100	Stabil	6	
8	Sinergi Bisnis antar anggota Klaster TMT	G		Jumlah	1	Maximize	7	
<b>III</b>	<b>KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI</b>							<b>14</b>
9	Peningkatan Skor INDI 4.0 *	C		Skor	Lebih baik dari tahun sebelumnya Tahun 2022	Maximize	7	
10	Ketersediaan dukungan IT untuk operasional Perusahaan	C		Jumlah	5	Maximize	7	
<b>IV</b>	<b>PENINGKATAN INVESTASI</b>							<b>12</b>



No	Indikator	ESG	88 PS	Satuan	Target	Polaritas	Bobot	
							Sub	Total
11	Ketepatan waktu pelaksanaan soft trial Bisnis ETP	C		Waktu	TW 1	Minimize	6	
12	Ketersediaan Roadmap untuk Revitalisasi/Pengembangan Asset	C		Prosentase	100	Stabil	6	
<b>V</b>	<b>PENGEMBANGAN TALENTA</b>							<b>18</b>
13	Pengembangan Talenta dalam Manajemen							
	a. Rasio Top Talent Muda ( $\leq 42$ tahun) dalam nominated talent	S		Prosentase	19	Maximize	3	8
	b. Rasio perempuan dalam nominated talent			Prosentase	20	Maximize	3	
	c. Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko (Rasio Kualifikasi)			Prosentase	70	Maximize	2	
14	Pelatihan untuk Digital readiness	G		Jenis pelatihan Digital Readiness	6	Maximize	5	
15	Penyelesaian Roadmap Penyehatan Dana Pensiun Manfaat Pasti	C		Waktu	TW 2	Minimize	5	
	<b>TOTAL</b>							<b>100</b>

Tabel 35 KPI Kantor Berita Antara Tahun 2023

## Glossary KPI

Indikator	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
I.1	
(Finansial)	
<b>Nama KPI</b>	EBITDA
<b>Definisi</b>	Indikator yang menggambarkan kemampuan Perusahaan yang dilihat dari pendapatan diterima sebelum pengurangan bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi
<b>Tujuan</b>	Untuk mengetahui laba Perusahaan sebelum ada pengurangan bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi
<b>Satuan</b>	Miliar Rp
<b>Formula</b>	EBITDA = Operating Income + Depreciation Expenses + Amortization Expenses + Gain (loss) on Forex + Income from Associated Entities and Joint Venture
<b>Target</b>	Rp 47,77 miliar
<b>Frekuensi</b>	Tahunan
<b>Polaritas</b>	Maximize
<b>Unit Pemilik KPI</b>	Direksi
<b>Unit Pengolah KPI</b>	Divisi Keuangan
<b>Sumber Data</b>	Laporan keuangan tahunan
<b>Jenis Pengukuran</b>	Realisasi nilai dari EBITDA tahun berjalan
Indikator	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
I.2	
(Finansial)	
<b>Nama KPI</b>	ROIC dengan tingkat jangka panjang (ROIC > WACC)
<b>Definisi</b>	Economic Value Creation tercipta ketika ROIC > WACC
<b>Tujuan</b>	Untuk mengetahui Nilai Ekonomis (Economic Value Creation) yang diukur dengan parameter tingkat kembalian investasi (Return on Invested Capital atau ROIC) di atas biaya modal tertimbang (Weighed Average Cost of Capital atau WACC) atas modal (atau Invested Capital)

Satuan	% GAP = ROIC -WACC
Formula	<p><b>Return on Invested Capital (ROIC)</b></p> <p><u>Rumus</u></p> $ROIC = \frac{\text{Laba Bersih Tahun Berjalan} + \text{Biaya Bunga}}{\text{Invested Capital}^*}$ <p><u>Definisi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laba Bersih tahun berjalan: <i>total revenue</i> dikurangi <i>total cost of goods sold</i>, pendapatan dan biaya operasi, pendapatan dan biaya non-operasi, serta pajak, pada 4 triwulan terakhir.</li> <li>• Biaya Bunga: total biaya bunga pada tahun berjalan.</li> <li>• <b>Invested Capital = (Hutang Pendanaan Y-1 + Hutang Pendanaan Y)/2 + (Modal Y-1 + Modal Y)/2.</b> Contoh: Untuk perhitungan ROIC 2023, maka rumus <i>Invested Capital</i> adalah (Hutang Pendanaan 31 Des 2022 + Hutang Pendanaan 31 Des 2023)/2 + (Modal 31 Des 2022 + Modal 31 Des 2023)/2.</li> </ul> <p><b>Weighted Average Cost of Capital (WACC)</b></p> <p><u>Rumus</u></p> $WACC = \left\{ \frac{\text{Hutang Pendanaan}}{\text{Invested Capital}} \times \text{Effective Cost of Debt} \right\} + \left\{ \frac{\text{Modal}}{\text{Invested Capital}} \times \text{Cost of Equity} \right\}$ <p><u>Definisi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutang pendanaan/debt: <b>Total saldo terutang rata-rata Tahun Y-1 dan Tahun Y</b> dari pinjaman berbunga jangka pendek dan jangka panjang tercatat pada laporan keuangan pada akhir periode. Hutang pendanaan/debt yang digunakan dalam perhitungan termasuk dan tidak terbatas pada, pinjaman bank (jangka pendek dan jangka panjang), obligasi, hutang sewa (<i>lease liability</i>), <i>bank overdrafts</i> dan pinjaman lainnya, pinjaman hutang pemerintah, dan utang surat berharga.</li> <li>• Modal: <b>Total ekuitas rata-rata Tahun Y-1 dan Tahun Y</b> dari perusahaan tercatat pada laporan keuangan.</li> <li>• <b>Invested Capital = (Hutang Pendanaan Y-1 + Hutang Pendanaan Y)/2 + (Modal Y-1 + Modal Y)/2.</b></li> <li>• <i>Effective Cost of Debt = Weighted Average Cost of Debt x (1-Effective Tax Rate)</i>; merupakan rata-rata tertimbang biaya bunga masing-masing BUMN dan komponen ini menunjukkan <i>borrowing capacity</i> masing-masing BUMN.</li> <li>• <i>Cost of Equity</i> ditetapkan oleh Kementerian BUMN.</li> </ul>
Target	1,60
Frekuensi	Tahunan
Polaritas	Maximize
Unit Pemilik KPI	Direktorat Keuangan, MSDM, dan Manajemen Risiko
Unit Pengolah KPI	Divisi Keuangan
Sumber Data	Laporan keuangan tahunan
Jenis Pengukuran	Realisasi nilai dari ROIC tahun berjalan
Indikator	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
I.3.a	
(Finansial)	
Nama KPI	Interest Bearing Debt:

	a. Interest Bearing Debt to EBITDA
<b>Definisi</b>	Indikator yang menggambarkan kemampuan laba dari aktivitas operasional perusahaan berikut dengan memperhitungkan beban depresiasi/amortisasi/depleksi
<b>Tujuan</b>	Untuk mengukur profitabilitas dari perusahaan dari aktivitas operasional perusahaan
<b>Satuan</b>	Kali
<b>Formula</b>	Total Debt / EBITDA (EBITDA = Operating Income + Depreciation Expenses + Amortization Expenses + Gain (loss) on Forex + Income from Associated Entities and Joint Venture)
<b>Target</b>	1,1
<b>Frekuensi</b>	Tahunan
<b>Polaritas</b>	Minimize
<b>Unit Pemilik KPI</b>	Direksi
<b>Unit Pengolah KPI</b>	Divisi Keuangan
<b>Sumber Data</b>	Laporan keuangan tahunan
<b>Jenis Pengukuran</b>	Realisasi nilai dari EBITDA tahun berjalan
<b>Indikator</b>	
<b>1.3.b</b>	<b>Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia</b>
<b>(Finansial)</b>	
<b>Nama KPI</b>	Interest Bearing Debt: b. Interest Bearing Debt to Invested Capital
<b>Definisi</b>	Indikator yang menggambarkan struktur finansial terkait kemampuan modal perusahaan untuk melunasi hutang berbunga
<b>Tujuan</b>	Untuk mengukur kelayakan perusahaan melakukan Investasi menggunakan hutang (berbunga)
<b>Satuan</b>	Persen
<b>Formula</b>	Total Debt/(Total Debt + Total Equity)
<b>Target</b>	18,34
<b>Frekuensi</b>	Tahunan
<b>Polaritas</b>	Minimize
<b>Unit Pemilik KPI</b>	Direksi
<b>Unit Pengolah KPI</b>	Divisi Keuangan
<b>Sumber Data</b>	Laporan keuangan tahunan
<b>Jenis Pengukuran</b>	Realisasi nilai dari EBITDA tahun berjalan
<b>Indikator</b>	
<b>1.4</b>	<b>Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia</b>
<b>(Operasional)</b>	
<b>Nama KPI</b>	Diseminasi berita Pemilu untuk meningkatkan kesadaran terhadap pendidikan pemilih di 38 Provinsi
<b>Definisi</b>	Mengetahui banyaknya media yang mengutip berita Pemilu untuk meningkatkan kesadaran dan mendidik masyarakat pemilih dalam pesta demokrasi di setiap provinsi
<b>Tujuan</b>	Untuk mengetahui diseminasi berita pemilu melalui media di provinsi
<b>Satuan</b>	Jumlah
<b>Formula</b>	Jumlah Media yang mengutip berita tentang Pemilu minimal 64 Media
<b>Target</b>	64 Media
<b>Frekuensi</b>	Dihitung per bulan
<b>Polaritas</b>	Stabil
<b>Unit Pemilik KPI</b>	Direktorat Pemberitaan
<b>Unit Pengolah KPI</b>	Direktorat Pemberitaan
<b>Sumber Data</b>	SP2MT
<b>Jenis Pengukuran</b>	Jumlah Media yang mengutip berita tentang pemilu minimal 64 Media
<b>Indikator</b>	
<b>1.5</b>	<b>Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia</b>
<b>(Sosial)</b>	

<b>Nama KPI</b>	Peningkatan Kompetensi Wartawan Non Antara
<b>Definisi</b>	Mengadakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bagi Wartawan Non Antara
<b>Tujuan</b>	Memfasilitasi dalam menciptakan wartawan Non Antara yang berkualitas dengan sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan
<b>Satuan</b>	Jumlah
<b>Formula</b>	Jumlah wartawan Non Antara yang mendapat Sertifikasi melalui Antara
<b>Target</b>	30
<b>Frekuensi</b>	Dihitung per triwulan
<b>Polaritas</b>	Maximize
<b>Unit Pemilik KPI</b>	Direksi
<b>Unit Pengolah KPI</b>	Direktorat Utama
<b>Sumber Data</b>	Sekretaris Perusahaan
<b>Jenis Pengukuran</b>	Jumlah wartawan Non Antara yang mengikuti uji kompetensi wartawan
<b>Indikator II.6</b>	<b>Inovasi Model Bisnis</b>
<b>Nama KPI</b>	Jumlah Inovasi penunjang Performa Perusahaan
<b>Definisi</b>	Inovasi yang dapat membantu meningkatkan performa Perusahaan dengan dukungan digitalisasi guna terciptanya sistem kerja yang produktif
<b>Tujuan</b>	Untuk memberikan kemudahan dalam bekerja dimana saat ini dengan sistem WFO (working from Office/outside) dan WFH (working from home) dan dalam upaya meningkatkan produktivitas dalam bekerja serta terciptanya ekosistem yang baik
<b>Satuan</b>	Jumlah
<b>Formula</b>	Jumlah Inovasi yang dapat menunjang Performa Perusahaan sesuai target
<b>Target</b>	2 (KPI Digital dan Blueprint Antara Baru)
<b>Frekuensi</b>	Tahunan
<b>Polaritas</b>	Maximize
<b>Unit Pemilik KPI</b>	Direksi
<b>Unit Pengolah KPI</b>	Divisi TI
<b>Sumber Data</b>	Laporan Manajemen Triwulan
<b>Jenis Pengukuran</b>	Jumlah inovasi
<b>Indikator II.7</b>	<b>Inovasi Model Bisnis</b>
<b>Nama KPI</b>	Pengembangan Platform Antara ETP untuk partisipan trading offshore melalui Conduit Model
<b>Definisi</b>	Pengukuran yang menjelaskan mengenai kemajuan pengembangan Platform Antara ETP untuk dapat melayani transaksi trading antara partisipan offshore dan onshore
<b>Tujuan</b>	Sebagai sarana untuk mengetahui pengembangan bisnis dari Platform Antara ETP
<b>Satuan</b>	Prosentase
<b>Formula</b>	1. 0% = Belum Berjalan; 2. 25% = Bloomberg dan Antara ETP telah setuju dengan desain Access model BTBS ; 3. 50%= System dan user test telah dilakukan 4. 75% = sudah dilakukannya depliyoment dan masuk ke tahap client onboarding; 5. 100% jika sudah launching
<b>Target</b>	100
<b>Frekuensi</b>	setiap Triwulan
<b>Polaritas</b>	Stabil
<b>Unit Pemilik KPI</b>	Direktur Komersil dan Pengembangan Bisnis
<b>Unit Pengolah KPI</b>	Direktur Anak Usaha
<b>Sumber Data</b>	Laporan Triwulan
<b>Jenis Pengukuran</b>	Perkembangan tahapan per triwulan

<b>Indikator III.8</b>	<b>Inovasi Model Bisnis</b>
<b>Nama KPI</b>	Sinergi Bisnis antar anggota Klaster TMT
<b>Definisi</b>	Kerjasama antar kluster TMT
<b>Tujuan</b>	Meningkatkan kualitas kerja Perusahaan di dalam kluster TMT
<b>Satuan</b>	Jumlah
<b>Formulasi</b>	Jumlah Kerjasama antar kluster TMT
<b>Target</b>	1 (Aplikasi pijar mahir untuk pelatihan Jurnalistik)
<b>Frekuensi</b>	Tahunan
<b>Polaritas</b>	Maximize
<b>Unit Pemilik KPI</b>	Direksi
<b>Unit Pengolah KPI</b>	Divisi TI, Divisi Layanan Media dan Komunikasi
<b>Sumber Data</b>	Daftar Kerjasama
<b>Jenis Pengukuran</b>	Jumlah sinergi bisnis
<b>Indikator III.9</b>	<b>Kepimpinan Teknologi</b>
<b>Nama KPI</b>	Peningkatan Skor INDI 4.0
<b>Definisi</b>	Untuk mengukur kesiapan industri BUMN dalam bertransformasi menuju industri 4.0 akan di lanjutkan kembali asesmen hingga tercapai target yang telah ditentukan BUMN yaitu mencapai level 4
<b>Tujuan</b>	Mengetahui level kesiapan dan perbaikan Perusahaan dalam bertransformasi menuju Industri 4.0
<b>Satuan</b>	Skor/Level
<b>Formulasi</b>	Hasil asesmen INDI 4.0
<b>Target</b>	Lebih baik dari tahun sebelumnya
<b>Frekuensi</b>	Tahunan
<b>Polaritas</b>	Maximize
<b>Unit Pemilik KPI</b>	Direksi
<b>Unit Pengolah KPI</b>	Divisi TI, Divisi Manstrat
<b>Sumber Data</b>	Laporan hasil Asesmen INDI 4.0
<b>Jenis Pengukuran</b>	Asesmen INDI 4.0
<b>Indikator III.10</b>	<b>Kepimpinan Teknologi</b>
<b>Nama KPI</b>	Ketersediaan dukungan IT untuk operasional Perusahaan
<b>Definisi</b>	Inovasi berbasis IT yang dapat mempermudah sistem kerja Perusahaan
<b>Tujuan</b>	Untuk mengetahui jumlah dukungan terkait dukungan dalam teknologi dalam operasional Perusahaan
<b>Satuan</b>	Jumlah
<b>Formulasi</b>	Jumlah ketersediaan dukungan IT untuk operasional Perusahaan
<b>Target</b>	5 (Redesign Portal Pusat dan Biro, Pengembangan Foto Repository, Pengembangan GRC System, Pengembangan Internal Audit System, Pengembangan Branda)
<b>Frekuensi</b>	Tahunan
<b>Polaritas</b>	Maximize
<b>Unit Pemilik KPI</b>	Direktorat Utama
<b>Unit Pengolah KPI</b>	Divisi TI
<b>Sumber Data</b>	Laporan Triwulan
<b>Jenis Pengukuran</b>	Jumlah inovasi berbasis IT untuk operasional Perusahaan
<b>Indikator IV.11</b>	<b>Peningkatan Investasi</b>
<b>Nama KPI</b>	Ketepatan waktu pelaksanaan soft trial Bisnis ETP
<b>Definisi</b>	Indikator yang menjelaskan pelaksanaan waktu soft trial bisnis ETP
<b>Tujuan</b>	Untuk memastikan terlaksananya soft trial dalam bisnis baru ETP

<b>Satuan</b>	Waktu
<b>Formula</b>	100 dikurangi jumlah keterlambatan hari dikalikan 1%
<b>Target</b>	TW 1
<b>Frekuensi</b>	Tahunan
<b>Polaritas</b>	Minimize
<b>Unit Pemilik KPI</b>	Direksi
<b>Unit Pengolah KPI</b>	Anak Perusahaan bisnis ETP
<b>Sumber Data</b>	Laporan Triwulan
<b>Jenis Pengukuran</b>	Ketepatan waktu soft trial
<b>Indikator IV.12</b>	<b>Peningkatan Investasi</b>
<b>Nama KPI</b>	Ketersediaan Roadmap untuk revitalisasi/Pengembangan Asset
<b>Definisi</b>	Indikator yang menjelaskan adanya perencanaan terhadap asset baru yang dimiliki oleh Antara
<b>Tujuan</b>	Untuk mengetahui potensi peningkatan pendapatan dari asset baru
<b>Satuan</b>	Prosentase
<b>Formula</b>	Adanya roadmap terkait perencanaan untuk monetasi asset baru
<b>Target</b>	100
<b>Frekuensi</b>	Tahunan
<b>Polaritas</b>	Stabil
<b>Unit Pemilik KPI</b>	Direksi
<b>Unit Pengolah KPI</b>	Direktorat Komersil dan Pengembangan Bisnis cq. Divisi LMK
<b>Sumber Data</b>	Laporan Triwulan
<b>Jenis Pengukuran</b>	Tahunan
<b>Indikator V.13</b>	<b>Pengembangan Talenta</b>
<b>Nama KPI</b>	Pengembangan Talenta dalam Manajemen a. Rasio Top Talent Muda ( $\leq 42$ tahun) dalam nominated talent
<b>Definisi</b>	Indikator yang menunjukkan jumlah pemimpin muda $\leq 42$ tahun dalam manajemen
<b>Tujuan</b>	Untuk menciptakan inklusifitas dalam lingkungan kerja
<b>Satuan</b>	%
<b>Formula</b>	Target x jumlah jabatan
<b>Target</b>	19 % atau 25 orang
<b>Frekuensi</b>	Tahunan
<b>Polaritas</b>	Maximize
<b>Unit Pemilik KPI</b>	Direktorat Keuangan, MSDM, dan Manajemen Risiko
<b>Unit Pengolah KPI</b>	Divisi MSDM
<b>Sumber Data</b>	Laporan Triwulan Divisi MSDM
<b>Jenis Pengukuran</b>	Triwulan
<b>Indikator V.13</b>	<b>Pengembangan Talenta</b>
<b>Nama KPI</b>	Pengembangan Talenta dalam Manajemen b. Rasio perempuan dalam nominated talent
<b>Definisi</b>	Indikator yang menunjukkan jumlah pemimpin perempuan yang menduduki posisi jabatan di manajemen
<b>Tujuan</b>	Untuk menciptakan inklusifitas dan diversitas
<b>Satuan</b>	%
<b>Formula</b>	Target x jumlah jabatan
<b>Target</b>	20 % atau 26 orang
<b>Frekuensi</b>	Tahunan
<b>Polaritas</b>	Maximize
<b>Unit Pemilik KPI</b>	Direktorat Keuangan, MSDM, dan Manajemen Risiko
<b>Unit Pengolah KPI</b>	Divisi MSDM
<b>Sumber Data</b>	Laporan Triwulan Divisi MSDM
<b>Jenis Pengukuran</b>	Triwulan

<b>Indikator</b> V.13	<b>Pengembangan Talenta</b>
<b>Nama KPI</b>	Pengembangan Talenta dalam Manajemen c. Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko (Rasio Kualifikasi)
<b>Definisi</b>	Perbandingan antara jumlah personil di unit kerja yang mengelola risiko dengan jumlah orang di unit yang sama yang mempunyai sertifikat pengelolaan risiko sesuai dengan tingkat jabatannya
<b>Tujuan</b>	Untuk Memperkuat kualitas personil dalam organ pengelola risiko
<b>Satuan</b>	%
<b>Formula</b>	Jumlah Personil organ pengelola risiko yang memenuhi kualifikasi dibagi dengan jumlah personil seluruh organ pengelola risiko
<b>Target</b>	70
<b>Frekuensi</b>	Tahunan
<b>Polaritas</b>	Maximize
<b>Unit Pemilik KPI</b>	Direktorat Keuangan, MSDM, dan Manajemen Risiko
<b>Unit Pengolah KPI</b>	Divisi MSDM
<b>Sumber Data</b>	Laporan Triwulan Divisi MSDM
<b>Jenis Pengukuran</b>	Triwulan

<b>Indikator</b> IV.14	<b>Pengembangan Talenta</b>
<b>Nama KPI</b>	Pelatihan untuk Digital readiness
<b>Definisi</b>	Indikator yang digunakan untuk mengetahui kesiapan Insan Antara dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja
<b>Tujuan</b>	Untuk meningkatkan digital readiness karyawan
<b>Satuan</b>	Jenis
<b>Formula</b>	Jenis Pelatihan untuk Digital readiness: 1. Digital Marketing 2. Digital Bisnis 3. Digital Product Management 4. Cyber Security 5. AI & Machine Learning 6. Data Scientist & data Analytics
<b>Target</b>	6
<b>Frekuensi</b>	Tahunan
<b>Polaritas</b>	Maximize
<b>Unit Pemilik KPI</b>	Direksi
<b>Unit Pengolah KPI</b>	Direktorat Keuangan, MSDM, dan Manajemen Risiko
<b>Sumber Data</b>	Laporan Triwulan
<b>Jenis Pengukuran</b>	Jumlah jenis pelatihan untuk Digital Readiness

<b>Indikator</b> IV.15	<b>Pengembangan Talenta</b>
<b>Nama KPI</b>	Penyelesaian Roadmap Penyehatan Dana Pensiun Manfaat Pasti
<b>Definisi</b>	Ketersediaan dokumen yang menjelaskan langkah-langkah dan kebijakan yang akan diambil Perusahaan selama 5 tahun mendatang untuk memperoleh kualitas tingkat pendanaan 1 di Dana Pensiun (Rencana Kecukupan Dana 100%)
<b>Tujuan</b>	1. Untuk memastikan peserta Dana Pensiun mendapatkan manfaat dari hak yang mereka miliki 2. Mengurangi iuran tambahan yang dibebankan kepada Pendiri (LKBN Antara)
<b>Satuan</b>	Waktu
<b>Formula</b>	100 dikurangi jumlah keterlambatan hari dikalikan 1%
<b>Target</b>	TW 2
<b>Frekuensi</b>	Satu kali
<b>Polaritas</b>	Minimize
<b>Unit Pemilik KPI</b>	Direksi
<b>Unit Pengolah KPI</b>	Direktorat Keuangan, MSDM, dan Manajemen Risiko
<b>Sumber Data</b>	Laporan Tim Evaluasi Dana Pensiun
<b>Jenis Pengukuran</b>	Ketepatan waktu terselesaikannya roadmap

Tabel 36 Glossary KPI Antara 2023



### 3. Target Rasio-Rasio Perusahaan

Rasio	2021	Prog 2022	RKAP 2023
Return On Equity (ROE)	18%	57%	9%
Return On Assets (ROA)	6%	30%	5%
Return On Investment (ROI)	12%	8%	9%
Rasio Kas / Cash Ratio	188%	208%	201%
Rasio Lancar / Current Ratio	370%	336%	369%
Perputaran Total Aset / Total Aset Turn Over (TATO)	149%	95%	90%
Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset (TMS terhadap TA)	20%	13%	12%
Collection Period (CP)	76 hari	68 hari	69 hari

Tabel 37 Target Rasio Keuangan Perusahaan 2023

#### Catatan:

*Collection period* pada tahun 2023 akan lebih besar dibanding tahun sebelumnya karena sebagian besar *project* pada tahun tersebut baru akan tertagih pada 2024.

### 4. Target Tingkat Kesehatan Perusahaan

Indikator	Bobot	Skor 2021 (audited)	2022 (Prog)	RKAP 2023	
				Skor	Target
<b>Finansial</b>					
1. ROE	20	20	20	20	9%
2. ROI	15	12	7.5	7.5	9%
3. Cash Ratio	5	5	5	5	201%
4. Current Ratio	5	5	5	5	369%
5. Collecting Period	5	4.5	4.5	4.5	69%
6. Inventory Turn Over	5	5	5	5	0%
7. Total Asset turn Over	5	5	4.5	4.5	90%
8. Total Equity to Total Asset	10	7.25	6	6	12%
<b>Sub Total</b>	<b>70</b>	<b>63.75</b>	<b>57.5</b>	<b>57</b>	
<b>Operasional</b>					
1. Penyerapan Berita Teks	7	6.69	7	7	100%
2. Penyerapan Berita Foto	3	2.63	3	3	100%
3. Penyerapan Berita TV	3	3	3	3	100%
4. Penyerapan Berita Infografis	2	2	2	2	100%
<b>Sub Total</b>	<b>15</b>	<b>14.32</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
<b>Administrasi</b>					
1. Laporan Perhitungan Tahunan	3	2	3	3	28-Feb-22
2. Rancangan RKAP	3	3	3	3	31-Oct-21
3. Laporan Periodik	3	1	3	3	< 30 Hari
4. Kinerja PUKK	6	0	6	6	100%
<b>Sub Total</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>84.07</b>	<b>87.05</b>	<b>87.05</b>	



Indikator	Bobot	Skor 2021 (audited)	2022 (Prog)	RKAP 2023	
				Skor	Target
<b>PREDIKAT</b>		<b>AA</b>	<b>AA</b>	<b>AA</b>	

Tabel 38 Target Tingkat Kesehatan Perusahaan 2023

## 5. Matrix Kesesuaian RKAP dengan APS

Tabel 39 Matrix Kesesuaian RKAP dengan APS

No	Uraian	APS 2023	Buku RKAP 2023 (Ya/Tidak)	Kesesuaian	Penjelasan Sesuai/Tidak Sesuai
<b>1.</b>	<b>Asumsi Makro Ekonomi</b>				
a	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	Ya	Sesuai	Mengikuti asumsi ekonomi makro pada APBN 2023
b	Inflasi (%)	3,6	Ya	Sesuai	Mengikuti asumsi ekonomi makro pada APBN 2023
c	Suku Bunga (%)	7,9	Ya	Sesuai	Mengikuti asumsi ekonomi makro pada APBN 2023
d	Nilai Tukar Kurs (Rp/USD)	14.800.-	Ya	Sesuai	Mengikuti asumsi ekonomi makro pada APBN 2023
e	Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel)	90	Ya	Sesuai	Mengikuti asumsi ekonomi makro pada APBN 2023
f	Lifting Minyak (ribu barel/hari)	660	Ya	Sesuai	Mengikuti asumsi ekonomi makro pada APBN 2023
g	Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1100	Ya	Sesuai	Mengikuti asumsi ekonomi makro pada APBN 2023
<b>2.</b>	<b>Fungsi Keuangan</b>				
a	Penyelesaian audit Laporan Keuangan 2022	Minggu ke-1 April	Ya	Sesuai	Audit lap keu direncanakan selesai pada TW1 2023
b	Ketentuan minimum opini Laporan Keuangan	WTP	Ya	Sesuai	Ditargetkan WTP
c	Target Keuangan				
	1) Ekspansi Berkesinambungan	EBITDA positif	Ya	Sesuai	2023; Rp. 47.7M 2022: Rp. 188,6M
		Net profit dan deviden positif	Ya	Sesuai	
	2) Penciptaan Nilai Ekonomis	ROIC (Return on Invested Capital) di atas WACC (Weighted Average Cost of Capital)	Ya	Sesuai	Ditargetkan pada 2023 sebesar 1,60% atau positif (sesuai dengan APS)
	3) Sustainable Financial Position	Financing debt to Invested Capital lebih baik dibanding tahun sebelumnya atau terpenuhinya target minimal 15 - 45%	Ya	Sesuai	18,34% (memenuhi target minimal, yaitu 15-45%)

No	Uraian	APS 2023	Buku RKAP 2023 (Ya/Tidak)	Kesesuaian	Penjelasan Sesuai/Tidak Sesuai
		Financing debt to EBITDA lebih baik dibanding tahun sebelumnya atau terpenuhinya target minimal 1-3X	Ya	Sesuai	Ditargetkan pada 2023 sebesar 1,15 kali (sesuai dengan target minimal, yaitu 1-3 kali)
	4) RDI/ SLA/ BPYBDS & PMN yang belum dimanfaatkan dituangkan dalam RKAP (jika ada)	RKAP harus menuangkan Nilai, skema penyelesaian dan informasi relevan lainnya	Tidak	Antara tidak mempunyai RDI / SLA / BPYBDS ataupun PMN	
	d Penyiapan Infrastruktur & Suprastruktur Penyusunan Laporan Keuangan	Segmentasi Komersial & PSO	Ya	Sesuai	Telah dilakukan segmentasi laporan keuangan Komersil & PSO
	e Keterlibatan KBUMN dalam penetapan penugasan RUPS RKAP	Sesuai UU BUMN No. 19 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, BUMN yang menjalankan PSO agar mengikutkan KBUMN dalam pembahasan perencanaan penugasan dan mengusulkan penetapan penugasan dalam RUPS RKAP	Ya	Sesuai	Antara selalu melibatkan KBUMN dalam penyusunan RKAP
	f Realisasi penyerapan PMN	BUMN yang mendapat tambahan PMN diminta melakukan upaya-upaya untuk mendorong realisasi penyerapan PMN sesuai kajian laporan KPI serta realisasi penggunaan dana PMN secara berkala dalam laporan triwulanan/ tahunan dengan format sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2021	Tidak	Antara tidak mempunyai tambahan PMN	
	g Penyelesaian PSN tepat waktu	BUMN yang menjalankan penugasan PSN harus memastikan proyek dapat selesai tepat waktu dan menyampaikan laporan progress penyelesaian dalam laporan triwulan/ tahunan	Tidak	Antara tidak mempunyai tambahan PSN	
<b>3. Fungsi Manajemen Risiko</b>					
		1. RKAP 2023 berbasis MR dengan strategi berdasarkan penetapan risiko, toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ), batas risiko ( <i>risk limit</i> ), dan selera risiko ( <i>risk appetite</i> ).	Ya	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN
		2. BUMN wajib Menyusun selera risiko ( <i>risk appetite</i> ) pada RKAP 2023 dengan memperhatikan selera risiko KBUMN.	Ya	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN
	a Perencanaan dan Strategi Risiko	3. Strategi risiko harus mendapatkan tanggapan dan persetujuan Dekom/ Dewas melalui penandatanganan Bersama risk appetite statement yang meliputi <i>risk appetite threshold</i> dari masing-masing <i>risk appetite metric</i> berdasarkan taksonomi risiko BUMN.	Ya	Sesuai	Dalam proses persetujuan Dewas
		4. BUMN wajib Menyusun <i>Top Risk</i> hasil integrasi dengan anak perusahaan dan perusahaan afiliasi yang terkonsolidasi berdasarkan taksonomi risiko BUMN.	Ya	Sesuai	Akan diprogramkan pada 2023

No	Uraian	APS 2023	Buku RKAP 2023 (Ya/Tidak)	Kesesuaian	Penjelasan Sesuai/Tidak Sesuai	
		5. <i>Top Risk</i> memuat risiko yang berkaitan dengan pencapaian target RKAP dan risiko strategis terkait dengan going concern untuk jangka waktu lebih dari satu tahun yang jatuh tempo di periode RKAP berjalan.	Ya	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN	
		6. Masing-masing <i>top risk</i> disusun KRI yang dilengkapi dengan indikator, parameter dan formula masing-masing dan ditetapkan threshold masing-masing KRI tersebut berdasarkan 3 kategori <i>threshold</i> : batas bahaya/ merah, hati-hati/ kuning, dan batas aman/ hijau.	Ya	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN	
		7. <i>Top Risk</i> berdasarkan kriteria risiko yang disesuaikan dengan kriteria risiko KNUMN guna agregasi risiko di KBUMN.	Ya	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN	
		8. <i>Risk register</i> dari <i>top risk</i> menampilkan informasi paling sedikit: a. (i) sasaran, (ii) jenis/kategori risiko sesuai dengan taksonomi risiko KBUMN, (iii) peristiwa risiko (risk event), (iv) penyebab risiko, (v) dampak risiko kuantitatif rupiah (wajib ada dengan menghitung dampak pada tahun berjalan), (vi) penjelasan dampak risiko, (vii) kontrol eksisting, (viii) penilaian efektifitas kontrol, (ix) tingkat kemungkinan risiko inheren, (x) tingkat dampak risiko inheren, (xi) level risiko inheren, (xii) rencana penanganan risiko, (xiii) target waktu penanganan, (xiv) tingkat kemungkinan risiko residual setiap triwulan, (xv) tingkat dampak risiko residual setiap triwulan, (xvi) level risiko residual setiap triwulan, (xvii) dampak risiko kuantitatif residual setiap triwulan (wajib ada), (xviii) penjelasan dampak risiko residual setiap triwulan b. Peta risiko (heatmap) yang memuat heatmap risiko inheren di awal tahun dan risiko residual di akhir tahun. c. Timeline penanganan risiko yang memuat (i) rencana penanganan risiko, (ii) breakdown rencana penanganan, (iii) output masing-masing breakdown rencana penanganan, (iv) waktu penanganan yang di-breakdown secara bulanan, (v) Biaya penanganan risiko, (vi) PIC yang bertanggungjawab.	Ya	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN	
	b	Pelaksanaan dan Monitoring Risiko	1. Direksi turut aktif dalam penerapan risiko dan diawasi oleh Dekom/ Dewas.	Ya	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN. Direksi menyampaikan penerapan manajemen risiko dalam rapat gabungan.

No	Uraian	APS 2023	Buku RKAP 2023 (Ya/Tidak)	Kesesuaian	Penjelasan Sesuai/Tidak Sesuai
		<p>2. Pedoman manajemen risiko meliputi:</p> <p>a. Kecukupan kebijakan dan standar prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko.</p> <p>b. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, pelaporan dan monitoring, serta sistem informasi manajemen risiko.</p> <p>c. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.</p>	Ya	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN.
		3. BUMN wajib menetapkan klasifikasi risiko anak perusahaan berdasarkan tingkat intensitas risiko dan melengkapi organ pengelola risikonya sesuai dengan ketentuan.	Ya	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN.
		4. Setiap triwulan BUMN wajib melakukan <i>internal control testing</i> dan <i>stress testing</i> untuk menguji kehandalan pengendalian internal dan sensitivitas pencapaian target RKAP sesuai dengan asumsi yang terdampak terhadap kecepatan perkembangan lingkungan bisnis.	Ya	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN.
		5. BUMN wajib memiliki sistem informasi manajemen risiko dan memiliki pengelolaan atas catatan kejadian kerugian ( <i>loss event database</i> ).	Ya	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN.
		6. BUMN wajib memiliki sistem informasi manajemen risiko dan memiliki pengelolaan atas catatan kejadian kerugian ( <i>loss event database</i> ).	Ya	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN.
		<p>7. BUMN wajib menyampaikan laporan manajemen risiko, tata kelola, dan audit intern yang menjadi satu kesatuan dengan laporan berkala triwulanan dan tahunan kepada Kementerian BUMN yang memuat:</p> <p>a. Laporan Manajemen Risiko, memuat paling sedikit: profil risiko, peta risiko, target dan realisasi perhitungan risiko residual, target dan realisasi pelaksanaan mitigasi dan biaya, ikhtisar perubahan risiko, catatan kejadian kerugiab, laporan MR incidental (jika ada kondisi tidak normal yang menyebabkan kerugian luar biasa), hasil pengukuran internal control testing dan Langkah perbaikan yang telah dilakukan, hasil pengujian stress testing dan Langkah penguatan yang dilakukan.</p>	Ya	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN.
		<p>b. Laporan Audit Intern paling sedikit memuat: Laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit intern, laporan tindak lanjut audit internal, audit eksternal dan otoritas pengawas lainnya, laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha BUMN, laporann hasil kaji ulang pihak eksternal yang independen (<i>quality assurance review</i>), laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SPI, jika ada.</p>	Ya	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN.

No	Uraian	APS 2023	Buku RKAP 2023 (Ya/Tidak)	Kesesuaian	Penjelasan Sesuai/Tidak Sesuai	
		c. Laporan Tata Kelola Terintegrasi memuat paling sedikit: struktur tata kelola terintegrasi, proses tata kelola terintegrasi, hasil tata kelola terintegrasi dan tindak lanjut rekomendasi hasil assessment GCG tahun sebelumnya.	Ya	Sesuai	Diprogramkan	
		1. BUMN wajib melakukan penilaian Risk Maturity Index (RMI) TAHUN 2023 atas penerapan MR yang telah dilakukan dengan menggunakan panduan penilaian RMI KBUMN.	Ya	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN.	
	c	Evaluasi Risiko dan Perbaikan Berkelanjutan				
		2. BUMN wajib Menyusun <i>roadmap</i> perbaikan risiko berkelanjutan atas pelaksanaan MR tahun 2023 s.d 2027 berdasarkan <i>gap analysis</i> hasil penilaian RMI.	Ya	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN.	
		3. Melaporkan hasil penilaian RMI dan <i>roadmap</i> perbaikan MR berkelanjutan kepada KBUMN paling lambat TW III tahun 2023.	Ya	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN.	
<b>4. Fungsi Sumber Daya Manusia</b>						
	a	Implementasi Talent Management	Melaporkan progress/ kajian implementasi Talent Management di induk dan anak perusahaan yang meliputi: 1. <i>Talent development</i> 2. <i>Career path</i> 3. <i>Job grading</i>	Ya	Sesuai	Antara akan melaporkan <i>blueprint</i> terkait <i>talent development, career path dan job grading</i> pada laporan manajemen triwulan/ tahunan ke KBUMN.
	b	Kesiapan sumber daya	Laporan meliputi: Kebijakan sistem, human capital, anggaran dan implementasi <i>Talent Mobility</i> sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri BUMN No. S-580/MBU/09/2022 tgl 16 September 2022 hal Aspirasi Perputaran Talenta BUMN.	Ya	Sesuai	Diprogramkan
	c	<i>Blueprint</i> pemenuhan amanat UU No. 8 Thn 2016 tentang Penyandang Disabilitas Thn 2022	Menyangkut lima aspek sbb: 1. Penempatan tenaga kerja 2. Pengembangan karir 3. Kesejahteraan 4. Aksesibilitas 5. Program K3	Ya	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN.
	d	Pemenuhan kuantitas dan kualitas data	Meliputi: 1. Pengurus BUMN 2. Pengurus anak perusahaan BUMN 3. Pengurus perusahaan afiliasi terkonsolidasi BUMN 4. Talenta (Direksi/BoD dan BoD-1) dalam <i>Talent Pool</i> KBUMN. Melalui portal HC BUMN, serta menjadikan pemenuhan ini sebagai salah satu KPI bagi Direktur yang membidangi dalam RKAP 2023.	Ya	Sesuai	Sudah sesuai dengan APS KBUMN.
	e	Indikator Pengembangan Talenta	% Milenial (<42 tahun) dalam Nominated Talent lebih baik dibanding tahun sebelumnya atau terpenuhinya target minimal.	Ya	Sesuai	Sejak tahun 2021 Perusahaan sudah menyiapkan dalam program MDP dan penciptaan belum langsung ke BOD-1, masih

No	Uraian	APS 2023	Buku RKAP 2023 (Ya/Tidak)	Kesesuaian	Penjelasan Sesuai/Tidak Sesuai
					dalam taraf pengembangan untuk menjadi nominated talent Sehingga pengukuran untuk % Millennial adalah Target yang telah ditentukan Perusahaan 19% dikalikan dengan Jumlah jabatan
		% Perempuan dalam Nominated Talent lebih baik dibanding tahun sebelumnya atau terpenuhinya target minimal.	Ya	Sesuai	Tahun 2022 : 18% Tahun 2023: 20%  Dimana perhitungannya adalah jumlah target pemimpin perempuan yang telah ditentukan manajemen dikalikan dengan jumlah jabatan.
<b>5. Fungsi Teknologi dan Teknologi Informasi</b>					
a	Laporan <i>Master Plan</i> Teknologi Informasi (MPTI)	BUMN yang telah memiliki dan menetapkan <i>Master Plan</i> Teknologi Informasi (MPTI) agar menyampaikan <i>progress</i> implementasi program dalam Laporan Manajemen Triwulanan BUMN dan Laporan Manajemen Tahunan, sedangkan BUMN yang belum memiliki dan/atau menetapkan MPTI agar pada tahun 2023 dilakukan penyusunan dan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.	Ya	Sesuai	Diprogramkan
b	Asesmen <i>Maturity Level</i>	BUMN yang telah melakukan Asesmen IT <i>Maturity Level</i> dan mencapai target minimal level 3 agar melakukan evaluasi atas dampak investasi TI terhadap bisnis perusahaan, sedangkan BUMN yang belum mencapai target level 3 agar membuat rencana pemenuhan <i>gap</i> dan menyampaikan <i>progress</i> pemenuhan secara berkala dalam Laporan Manajemen Triwulanan BUMN dan Laporan Manajemen Tahunan.	Ya	Sesuai	Skor pada 2022: 1,78
c	Asesmen Transformasi Digital (INDI 4.0)	BUMN yang belum melaksanakan Asesmen Transformasi Digital (INDI 4.0) di tahun 2022 wajib melaksanakan di tahun 2023. Bagi BUMN yang belum mencapai level 4 (menerapkan transformasi digital) wajib menyusun dan mengimplementasikan rencana pemenuhan <i>gap</i> , sedangkan BUMN yang telah menerapkan transformasi digital wajib melaporkan implementasi transformasi digital menuju BUMN 4.0 pada Laporan Manajemen Triwulanan BUMN dan Laporan Manajemen Tahunan.	Ya	Sesuai	Diprogramkan
d	Program Digital Talent	BUMN berpartisipasi dalam Program <i>Digital Talent</i> BUMN dengan menugaskan karyawan dengan pencapaian target kepesertaan minimal sebanyak 7% dari jumlah keseluruhan SDM (organik dan non-organik) perusahaan, termasuk anak dan cucu perusahaan pada tahun 2023.	Ya	Sesuai	Diprogramkan
e	Inovasi dan Kerjasama	BUMN agar mengembangkan budaya inovasi dan mendorong kerja sama melalui BUMN <i>Research Institute</i> dalam dan/atau antar klaster serta mendorong kolaborasi dengan Perguruan Tinggi. Riset dan inovasi yang dihasilkan agar memperhatikan dukungan terhadap <i>core business</i> perusahaan.	Ya	Sesuai	Diprogramkan

No	Uraian	APS 2023	Buku RKAP 2023 (Ya/Tidak)	Kesesuaian	Penjelasan Sesuai/Tidak Sesuai	
<b>7.</b>	<b>Fungsi TJSL</b>					
	a	Fokus bidang TJSL	BUMN menjalankan program TJSL BUMN dengan fokus pada 3 bidang yaitu: Pendidikan, Lingkungan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK)	Ya	Sesuai	Sudah diprogramkan untuk 2023
	b	Kolaborasi pelaksanaan program	BUMN dalam menjalankan program TJSL diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dengan sesama BUMN ataupun dengan lembaga/pihak lainnya dengan tetap berkontribusi atas pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.	Ya	Sesuai	Diprogramkan
	c	Optimalisasi penagihan pendanaan dan pembinaan UMK	BUMN tetap berupaya mengkomunikasikan program TJSL BUMN dengan mengedepankan asas kemanfaatan atas program TJSL terlebih dari sisi penerima manfaat.	Tidak	Selama ini Antara tidak menjalankan program kemitraan, namun demikian masih diprogramkan untuk kelayakannya	
			1. Melakukan pengukuran dampak terhadap program TJSL dengan menggunakan metode <i>Social Return On Investment</i> (SROI) dengan target Minimal 3 (tiga) program yang di ukur dampaknya dengan metode SROI, baik dilakukan secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak lain yang berkompeten.	Ya	Sesuai	Diprogramkan
			2. Menetapkan kebijakan <i>levelling</i> unit kerja TJSL menjadi setingkat BOD-1 atau disesuaikan dengan hasil kajian terkait hal tersebut dengan target Kebijakan Direksi atas <i>levelling</i> unit kerja TJSL berdasarkan hasil kajian terkait hal tersebut.	Tidak	Antara masih akan melakukan kajian terkait roadmap TJSL untuk program <i>levelling</i> TJSL	
	e	Usulan KPI 2023 terkait TJSL	3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam program TJSL, termasuk untuk pemenuhan pengisian sistem informasi berbasis teknologi informasi Kementerian BUMN dengan target pelaporan program TJSL yang lengkap dan tepat waktu.	Ya	Sesuai	Diprogramkan
			4. Meningkatkan kolaborasi antar BUMN maupun dengan pihak lain yang sesuai kompetensinya dalam pelaksanaan program TJSL, dengan tujuan untuk meningkatkan dampak positif program dengan target Masing-masing minimal 1 (satu) program kolaborasi pada setiap bidang prioritas (Pendidikan Lingkungan, dan Pengembangan UMK).	Ya	Sesuai	Diprogramkan pada 2023
			5. Melibatkan peran serta karyawan secara aktif dalam program TJSL dengan target Setiap karyawan terlibat dalam minimal 1 kegiatan sosial kemasyarakatan baik yang berasal dari Program TJSL maupun dari luar Program TJSL.	Ya	Sesuai	Diprogramkan pada 2023
<b>8.</b>	<b>Fungsi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan</b>					

No	Uraian	APS 2023	Buku RKAP 2023 (Ya/Tidak)	Kesesuaian	Penjelasan Sesuai/Tidak Sesuai	
	a	Rencana tindak lanjut audit	BUMN wajib memuat rencana upaya tindak lanjut atas rekomendasi audit kepatuhan baik yang masih merupakan temuan berulang maupun temuan baru yang memerlukan langkah-langkah penyelesaian.	Ya	Sesuai	Diprogramkan
	b	Penanganan hukum dengan proses mediasi	BUMN wajib melakukan upaya penanganan permasalahan hukum dengan mengedepankan proses mediasi penyelesaian masalah hukum antar/terkait BUMN/anak perusahaan BUMN/ perusahaan yang terafiliasi, sebelum permasalahan tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan (pengadilan atau arbitrase);	Ya	Sesuai	Pada 2022 sudah dilakukan mediasi, namun masih berlanjut.
	c	Parameter penyelesaian hukum	Untuk menentukan parameter pencapaian terhadap penyelesaian permasalahan hukum antar/terkait BUMN/anak perusahaan BUMN/perusahaan yang terafiliasi, BUMN dapat menentukan permasalahan yang masih berproses di tahun berjalan dan ditargetkan penyelesaiannya pada tahun berikutnya. Dalam hal tidak tercapai penyelesaiannya sesuai dengan target yang ditetapkan, BUMN dapat melaporkan progress penyelesaiannya kepada pemegang saham beserta target baru terselesaikannya permasalahan tersebut.	Ya	Sesuai	Diprogramkan
	d	Berpartisipasi dalam proses pengembangan Portal Aset BUMN	BUMN diwajibkan untuk berpartisipasi dan mendukung proses pengembangan Portal Aset BUMN yang sedang dikembangkan oleh Kementerian BUMN melalui penginputan data sesuai dengan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang ditetapkan dan sesuai dengan keadaan di lapangan, serta memberikan dukungan lain yang diperlukan dalam pengembangan Portal Aset BUMN	Ya	Sesuai	Antara secara periodik mengirimkan laporan ke KBUMN via aplikasi ANAPLAN sesuai arahan KBUMN (Platform baru yang digunakan BUMN dalam melakukan collect data seperti: keuangan, risiko, termasuk KPI, dsb).
	e	Penyusunan SOP	BUMN agar segera menyelesaikan penyusunan/penyempurnaan SOP yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN.	Ya	Sesuai	Setiap SOP berdasarkan referensi KBUMN dan dilakukan pembaharuan berkala sesuai arahan KBUMN
<b>8</b>	<b>Pengelolaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)</b>					
		Aspirasi terkait DPPK	Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik, penerapan manajemen risiko yang efektif, upaya perbaikan dan optimalisasi pengelolaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dengan program manfaat pasti di lingkungan BUMN, serta menjaga tingkat kesehatan, BUMN diharapkan dapat melakukan evaluasi atas pengelolaan DPPK termasuk pengelolaan aset likuid dan non likuid DPPK per 31 Desember 2021 dan 30 Juni 2022 serta menyusun <i>roadmap</i> /rencana inisiatif perbaikan/penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun bagi BUMN yang	Ya	Sesuai	Akan diprogramkan di 2023



No	Uraian	APS 2023	Buku RKAP 2023 (Ya/Tidak)	Kesesuaian	Penjelasan Sesuai/Tidak Sesuai
		memiliki DPPK dengan kondisi kekurangan kekayaan untuk pendanaan dari nilai kini aktuarial			
9	Arahan Penggunaan Produk Dalam Negeri				
	Aspirasi terkait roadmap P3DN	Sebagaimana arahan Presiden yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BUMN diwajibkan untuk menyusun roadmap Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan membentuk Tim P3DN, serta SPI BUMN melakukan monitoring/reviu atas pelaksanaan program tersebut dan melaporkannya dalam Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan.	Ya	Sesuai	Antara sudah membentuk tim P3DN dan program <i>roadmap</i> baru akan diprogramkan pada tahun 2023.
10	Inisiatif Strategis, Aspirasi Pemegang Saham dan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Klaster/ Sub Klaster				
	Aspirasi terkait penyusunan KPI 2023	1. Inisiatif strategis dan KPI BUMN Tahun 2023 harus sejalan dengan inisiatif strategis yang ada dalam <i>roadmap cluster</i> , dan RJPP masing-masing BUMN.	Ya	Sesuai	KPI Antara tahun 2023 disusun sesuai APS KBUMN
		2. Inisiatif strategis dan KPI BUMN Tahun 2023 harus dijabarkan ke dalam lima program prioritas sebagaimana dijelaskan dalam Renstra Kementerian BUMN.	Ya	Sesuai	KPI Antara tahun 2023 disusun sesuai APS KBUMN
		3. Inisiatif strategis dan KPI BUMN Tahun 2023 untuk masing-masing klaster dan sub-klaster adalah sebagaimana dijabarkan pada halaman berikut. Masing-masing inisiatif strategis harus dijabarkan dalam rencana program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 disertai dengan besaran anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja tersebut.	Ya	Sesuai	KPI Antara tahun 2023 disusun sesuai APS KBUMN
		4. Untuk penentuan detail KPI untuk masing-masing BUMN mengacu pada ketentuan yang ada dan atau sesuai kebijakan yang dikoordinasikan oleh Wakil Menteri BUMN yang membidangi BUMN yang bersangkutan dengan memperhatikan panduan sebagaimana KPI setiap Klaster dan Sub Klaster tersebut.	Ya	Sesuai	KPI Antara tahun 2023 disusun sesuai APS KBUMN

No	Uraian	APS 2023	Buku RKAP 2023 (Ya/Tidak)	Kesesuaian	Penjelasan Sesuai/Tidak Sesuai
		5. BUMN yang mendapat tambahan PMN dan belum selesai realisasi penyerapannya diminta untuk menambahkan KPI PMN dalam Kontrak Manajemen dan menyajikannya secara terpisah dari KPI Direksi secara kolegal. Namun demikian agar pencapaian KPI PMN masuk dalam penghitungan skor KPI Direksi Kolegal maka total capaian KPI PMN diharapkan dapat menjadi salah satu KPI Direksi kolegal.	Tidak		Antara tidak memiliki PMN
		6. BUMN sebagai pendiri DPPK yang telah melakukan <i>due diligence</i> dengan kondisi kekurangan kekayaan untuk pendanaan dari nilai kini aktuarial dan hasil rasio pendanaan/kualitas pendanaan di bawah ketentuan (Rasio Kecukupan Dana < 100%) agar menyusun roadmap/ rencana inisiatif perbaikan/ penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun serta dituangkan dalam bagian KPI perspektif pengembangan talenta.	Ya	Sesuai	Akan diprogramkan di 2023
		BUMN yang mendapat tambahan PMN dan belum selesai realisasi penyerapannya diminta untuk menambahkan KPI PMN dalam Kontrak Manajemen dan menyajikannya secara terpisah dari KPI Direksi secara kolegal.	Tidak	Tidak Sesuai	Antara tidak mempunyai tambahan PMN
	KPI PMN dalam Kontrak Manajemen	Memasukkan capaian realisasi KPI PMN pada KPI Direksi Kolegal	Tidak	Tidak Sesuai	Antara tidak mempunyai tambahan PMN

## **BAB VIII**

### **RENCANA KERJA DEWAN PENGAWAS**

Dewan Pengawas adalah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Dewan Pengawas memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). Dewan Pengawas merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam pengelolaan perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Program kerja Dewan Pengawas Perum LKBN Antara tahun 2023 merupakan pedoman bagi Dewan Pengawas untuk mewujudkan terciptanya penerapan GCG di perusahaan. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya kewajiban bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menerapkan GCG sebagai landasan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. Kesadaran penuh untuk menjalankan GCG dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Demikian program kerja Dewan Pengawas ini disusun, agar kiranya dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi perusahaan.

#### **1. Pendahuluan**

##### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Perum LKBN Antara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007, perlu disusun Program Kerja Dewan Pengawas sebagai panduan dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan Perum LKBN Antara selama tahun 2022.

##### **1.2. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tanggal 3 Agustus 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
- c. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara;
- d. Keputusan Menteri BUMN Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perum LKBN Antara No. SK-205/MBU/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perum LKBN Antara;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Pembuatan Program Kerja Dewan Pengawas dimaksudkan untuk dijadikan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas untuk mencapai tujuan, yaitu:

- a. Mendapatkan keseragaman dan keterpaduan dalam penyelenggaraan kegiatan Dewan Pengawas;
- b. Mewujudkan hasil kerja yang optimal berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance*;
- c. Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, baik di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan;

### 1.4. Susunan Dewan Pengawas dan Komite-Komite

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perum LKBN Antara No. SK-205/MBU/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 telah diangkat nama-nama anggota Dewan Pengawas Perum LKBN Antara, dengan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut :

- a. Widodo Muktiyo, sebagai Ketua Dewan Pengawas
- b. Widiarsi Agustina, sebagai Anggota Dewan Pengawas
- c. Mayong Suryo Laksono, sebagai Anggota Dewan Pengawas Independen
- d. Monang Sinaga, sebagai Anggota Dewan Pengawas Independen

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perum LKBN Antara Nomor : SKEP-01/DEWAS/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perum LKBN Antara, maka susunan Komite Audit sebagai berikut :

- a. Monang Sinaga, sebagai Ketua Komite
- b. Eddy Endro Gyamirto, sebagai Anggota Komite

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perum LKBN Antara Nomor : SKEP-02/DEWAS/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Manajemen Risiko Perum LKBN Antara, maka susunan Komite Manajemen Risiko Perum LKBN sebagai berikut :

- a. Widiarsi Agustina, sebagai Ketua Komite
- b. Siti Farida, sebagai Anggota Komite

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perum LKBN Antara Nomor : SKEP-03/DEWAS/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perum LKBN Antara, sebagai berikut :

- a. Widodo Muktiyo, sebagai Ketua Komite
- b. Mayong Suryo Laksono, sebagai Anggota Komite

### 1.5. Pembagian Tugas Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perum LKBN Antara Nomor : SKEP-04/DEWAS/06/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Pengawas Perum LKBN Antara, dengan pembagian tugas Dewan Pengawas sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tugas
1.	Widodo Muktiyo	Ketua Dewan Pengawas	Mengkoordinir tugas-tugas Anggota Dewan Pengawas
2.	Mayong Suryo Laksono	Anggota Dewan Pengawas	Menangani bidang Komersil dan Pengembangan Bisnis
3.	Widiarsi Agustina	Anggota Dewan Pengawas	Menangani bidang Pemberitaan dan TI
4.	Monang Sinaga	Anggota Dewan Pengawas	Menangani bidang Keuangan, MSDM dan Umum.

Tabel 40 Pembagian Tugas Dewan Pengawas Antara

## 2. Tanggung Jawab, Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Pengawas

### 2.1. Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/khusus sesuai Peraturan Pemerintah serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Pengawas dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Pengawas akan selalu mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi;
- c. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Pengawas bertindak sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Pengawas;
- d. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, kecuali dalam hal Perusahaan tidak mempunyai Direksi, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tidak ada Direksi;
- e. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan secara pro-aktif, mencakup semua aspek bisnis Perusahaan;
- f. Dewan Pengawas dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/atau membentuk Komite untuk membantu tugas Dewan Pengawas.

### 2.2. Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

- a. Umum
  - a) Mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan Pemegang Saham;
  - b) Beritikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
  - c) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d) Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
  - e) Memantau efektivitas praktik *Good Corporate Governance* yang diterapkan Perusahaan antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Pengawas dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*;
  - f) Menyusun rencana kerja Dewan Pengawas untuk periode tahun berikutnya;
  - g) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham.
- b. Pengawasan
 

Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilakukan antara lain dengan cara:

  - a) Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan di Perusahaan;
  - b) Melakukan kunjungan kerja, baik dengan (atau tanpa) pemberitahuan kepada Direksi sebelumnya;
  - c) Memberikan tanggapan atas laporan berkala dari Direksi;
  - d) Menugaskan Komite-Komite untuk membantu melakukan tugas-tugas pengawasan.

- c. Pelaksanaan Tugas yang berkaitan dengan Pemegang Saham, Dewan Pengawas bertugas dan berkewajiban untuk:
  - a) Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan RKAP yang diusulkan Direksi;
  - b) mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
  - c) melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
  - d) meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
- d. Pengelolaan Manajemen Risiko  
Dewan Pegawai mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko.
- e. Sistem Pengendalian Internal  
Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi agar menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif.
- f. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
  - a) Dewan Pengawas mengawasi agar Direksi mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemegang Saham, dan Instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan secara obyektif.
  - b) Dewan Pengawas mengawasi agar Direksi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga informasi penting yang diperlukan oleh Stakeholder.
  - c) Dewan Pengawas mengawasi agar Direksi aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip good corporate governance dan masalah material yang dihadapi.
  - d) Dewan Pengawas bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan dan mengawasi agar informasi yang bersifat rahasia tidak diungkapkan sampai pengumuman mengenai hal tersebut diumumkan kepada masyarakat.
  - e) Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Etika Berusaha dan Anti Korupsi  
Anggota Dewan Pengawas tidak diperkenankan meminta atau menerima hadiah dan sejenisnya dari setiap pihak yang berkepentingan, bagi dirinya sendiri, keluarga atau rekan dimana hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitasnya mewakili kepentingan Perusahaan.

### 2.3. Wewenang Dewan Pengawas

- a. Anggota Dewan Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi, surat berharga dan lain-lain serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

- b. Anggota Dewan Pengawas berhak menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan.

### 3. Rencana Kerja Dewan Pengawas

Rencana Kerja Dewan Pengawas tahun 2023 diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) aspek strategis, yaitu aspek pengawasan & pengarahannya, aspek pelaporan, dan aspek dinamis. Di dalam masing-masing aspek tersebut dirumuskan aktivitas/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dalam tahun 2023.

Seluruh aspek dan masing-masing aktivitas/kegiatan di dalamnya dirumuskan dengan pendekatan pemenuhan tugas dan kewajiban Dewan Pengawas yang sudah ditetapkan dalam peraturan dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku.

#### 3.1. Aspek Pengawasan dan Pengarahan

Sebagaimana diuraikan di atas, tugas Dewan Pengawas adalah melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat. Adapun Aspek Pengawasan dan Pengarahan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023 terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Rapat Internal Dewan Pengawas.  
Rapat internal Dewan Pengawas minimal dilakukan satu kali dalam setiap bulan. Rapat internal Dewan Pengawas dapat dihadiri oleh Komite-komite dengan agenda utamanya adalah pembahasan kinerja perusahaan baik kinerja keuangan maupun kinerja operasional. Selain itu, dalam rapat internal Dewan Komisaris dapat juga membahas dan memutuskan hal-hal terkait dengan kewenangan Dewan Komisaris seperti yang diatur dalam anggaran dasar.
- b. Rapat Dewan Pengawas dan Direksi.  
Rapat ini pada dasarnya adalah rapat Dewan Pengawas yang mengundang Direksi untuk membahas masalah kinerja perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap penting. Dilakukan minimal satu kali setiap bulan sebagaimana surat Menteri Negara BUMN Nomor S-375/MBU.Wk/2011 tanggal 5 Desember 2011 perihal Kebijakan Menteri Negara BUMN dalam pengurusan dan Pengawasan BUMN.
- c. Rapat Pembahasan Rancangan RKAP Tahun 2023.  
Rapat pembahasan Rancangan RKAP Tahun 2023 dilakukan dalam beberapa kali kegiatan dengan mengikutsertakan Komite-komite. Pembahasan RKAP dilakukan secara intensif mengingat Dewan Pengawas harus memberikan pendapat mengenai RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
- d. Rapat Pembahasan Kinerja Perusahaan Tahun 2023.  
Rapat pembahasan kinerja dilakukan dalam beberapa kali rapat dengan Direksi dan Pemilik Modal sebelum disahkan oleh Menteri BUMN selaku Pemilik Modal.
- e. Pemberian saran dan masukan kepada Direksi dalam pengurusan Perusahaan. Pemberian saran atau masukan kepada Direksi disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi. Pemberian saran dan masukan tersebut didokumentasikan dalam risalah rapat dan/atau surat tersendiri yang memuat hal-hal terkait dengan permasalahan-permasalahan diantaranya :
  - Pencapaian kinerja keuangan
  - Pencapaian kinerja operasional
  - Pengelolaan manajemen risiko
  - Penerapan GCG



- Pengelolaan informasi dan teknologi
  - Pengelolaan investasi
  - Pemenuhan kepatuhan (*compliance*)
  - Masalah-masalah stratejik lainnya
- f. Evaluasi Kinerja Audit yang Dilakukan oleh Auditor Eksternal  
Evaluasi dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat yang terkait dengan proses seleksi untuk KAP, pengusulan KAP, dan evaluasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal. Dalam pelaksanaan tugas ini Dewan Pengawas secara khusus melakukan evaluasi dengan bantuan Komite Audit.
- g. Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern  
Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal berdasarkan *review* yang dilakukan oleh Komite Audit. Berdasarkan masukan Komite Audit, Dewan Pengawas memberikan pendapat terhadap kecukupan sistem pengendalian internal kepada Direksi.

### 3.2. Aspek Pelaporan

Aspek pelaporan terkait dengan kewajiban Dewan Pengawas untuk melaporkan aktivitas/kegiatan Dewan Pengawas dalam tahun 2023 sebagaimana diatur dalam ketentuan dan perundang-undangan lainnya yang berlaku, yaitu:

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas Tahun 2023.
- b. Menyusun dan mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) Dewan Komisaris Tahun 2023.
- c. Menyusun Laporan Triwulanan Perkembangan Realisasi KPI tahun 2023.
- d. Menyusun Laporan Tugas Pengawasan tahun 2022.
- e. Memberikan tanggapan/pendapat terhadap hal-hal yang memerlukan persetujuan dan/atau rekomendasi Dewan Pengawas seperti yang diatur dalam peraturan atau peraturan lainnya namun tidak terbatas pada :
  - Pengesahan RKAP Perusahaan
  - Pendapat tentang Laporan Manajemen
  - Pengusulan auditor eksternal untuk penugasan audit atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

### 3.3. Aspek Dinamis

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dalam tahun 2023 adalah:

- a. Kunjungan kerja ke Biro-Biro daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi.
- b. Seminar/workshop dalam rangka peningkatan kompetensi anggota Dewan Pengawas dan Komite-komite di bawah Dewan Pengawas.



### 3.4. Jadwal Kegiatan Dewan Pengawas

No	Program Kerja	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I Aspek Pengawasan Dan Pengarahan</b>													
1	Rapat Internal Dewan Pengawas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Rapat Pembahasan RKAP Tahun 2023									√	√		
4	Rapat Pembahasan Kinerja Perusahaan Tahun 2023	√	√										
5	Pemberian Saran dan Masukan Kepada Direksi dalam Pengurusan Perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Evaluasi Kinerja Audit yang Dilakukan oleh Auditor Eksternal		√								√		
7	Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal						√						√
<b>II Aspek Pelaporan</b>													
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas Tahun 2023									√	√		
2	Menyusun dan Mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas Tahun 2023									√	√		
3	Menyusun Laporan Triwulanan Perkembangan Realisasi KPI tahun 2023	√			√			√			√		
4	Menyusun Laporan Tugas Pengawasan Tahun 2023	√	√										
5	Memberikan tanggapan / pendapat terhadap hal-hal yang memerlukan persetujuan dan / atau rekomendasi Dewan Pengawas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan dan ketentuan lainnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
<b>III Aspek Dinamis</b>													
1	Kunjungan Kerja ke Biro-Biro Daerah	√		√			√			√			√
2	Seminar / Workshop dalam rangka peningkatan kompetensi Anggota Dewan Pengawas dan organ-organ pendukung Dewan Pengawas				√			√				√	

Tabel 41 Jadwal Kerja Dewan Pengawas 2023

### 4. Key Performance Indicator Dewan Pengawas

Masing-masing kegiatan/aktivitas dalam Program Kerja Dewan Pengawas tersebut di atas dirumuskan kuantitasnya. Kuantitas inilah yang menjadi tolok ukur capaian kinerja Dewan Pengawas.

Untuk keperluan penilaian kinerja Dewan Pengawas secara keseluruhan dalam satu periode penugasan, masing-masing aktivitas/kegiatan diberikan bobot. Dengan adanya bobot tersebut, penilaian atas capaian masing-masing aktivitas/kegiatan dapat dihitung secara proporsional dan apabila dijumlahkan akan diperoleh penilaian atas capaian kinerja Dewan Pengawas secara keseluruhan.

No	Program Kerja	KPI		Bobot
		Jumlah	Satuan	
<b>I</b>	<b>Aspek Pengawasan Dan Pengarahan</b>			<b>60</b>
1	Rapat Internal Dewan Pengawas	12	Rapat	12
2	Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi	12	Rapat	12
3	Rapat Pembahasan RKAP Tahun 2023	2	Rapat	4
4	Rapat Pembahasan Kinerja Perusahaan Tahun 2023	2	Rapat	4
5	Pemberian Saran dan Masukan Kepada Direksi Dalam Pengurusan Perusahaan	12	Dokumen	24
6	Evaluasi Kinerja Audit Yang Dilakukan oleh Auditor Eksternal	2	Rapat	2
7	Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal	2	Rapat	2
	<i>Sub Jumlah 1</i>			<b>60</b>
<b>II</b>	<b>Aspek Pelaporan</b>			<b>30</b>
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggran Dewan Pengawas Tahun 2023	1	Dokumen	5
2	Menyusun dan Mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas Tahun 2023	1	Dokumen	4
3	Menyusun Laporan Triwulanan Perkembangan Realisasi KPI tahun 2023	4	Dokumen	8
4	Menyusun Laporan Tugas Pengawasan Tahun 2022	1	Dokumen	5
5	Memberikan tanggapan / pendapat terhadap hal-hal yang memerlukan persetujuan dan / atau rekomendasi Dewan Pengawas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan dan ketentuan lainnya	3	Dokumen	8
	<i>Sub Jumlah 11</i>			<b>30</b>
<b>III</b>	<b>Aspek Dinamis</b>			<b>10</b>
1	Kunjungan Kerja ke Biro-Biro Daerah	5	Kegiatan	5
2	Seminar / Workshop dalam rangka peningkatan kompetensi Anggota Dewan Pengawas dan organ-organ pendukung Dewan Pengawas	3	Kegiatan	5
	<i>Sub Jumlah III</i>			<b>10</b>
	<i>Jumlah</i>			<b>100</b>

Tabel 42 KPI Dewan Pengawas 2023

Hasil penilaian kinerja Dewan Pengawas dikategorikan dalam 5 (lima) kriteria, yaitu:

No.	Realisasi Skor	Kriteria
1.	$\geq 95$ (maksimal 100)	Sangat Baik
2.	$> 80$ s.d. 94	Baik
3.	$> 65$ s.d. 80	Cukup
4.	$> 50$ s.d. 65	Kurang
5.	$\leq 50$	Sangat Kurang

Tabel 43 Kriteria Penilaian Dewan Pengawas Antara

## 5. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas

Anggaran Dewan Pengawas Tahun 2023 disusun berdasarkan program kerja /kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan rincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

No	Nama Program Kerja
1	Pengawasan kepatuhan RKAP 2023 terhadap (RJPP 2020-2024) dan Penyusunan RKAP 2023

No	Nama Program Kerja
2	Melakukan review atas realisasi RKAP per Triwulan berdasarkan laporan Realisasi RKAP 2023 oleh Direksi
3	Pengawasan terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan
4	Pengecekan atas respon Perusahaan terhadap Harapan Pemangku Kepentingan (stake holders)
5	Pemantauan dan Pemberian Saran atas Isu-Isu Terkini tentang Perubahan Lingkungan Bisnis yang berdampak pada perusahaan
6	Pemantauan terhadap Upaya Direksi melakukan Penguatan Sistem Pengendalian Intern
7	Pengawasan terhadap Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko
8	Pengawasan terhadap Kebijakan dan Pelaksanaan Sistem Teknologi Informasi
9	Pengawasan terhadap Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karier
10	Pengawasan terhadap Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan
11	Pengawasan terhadap Kebijakan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
12	Pengawasan terhadap Kebijakan dan Pelaksanaan Mutu dan Pelayanan
13	Persetujuan atas Transaksi atau Tindakan dalam Wewenang Dewan Pengawas
14	Penunjukan Calon Auditor Eksternal
15	Memberikan arahan terkait berjalannya Fungsi Manajemen risiko hingga Pembentukan Unit Manajemen Risiko dalam rangka pengawasan atas Gejala Menurunnya Kinerja Perusahaan
16	Pemantauan terhadap Efektivitas Audit Eksternal dan Audit Internal
17	Pengawasan terhadap Arah dan Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan
18	Pemantauan Pemilihan Calon Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan
19	Penilaian Kinerja Direksi
20	Pemberhentian Anggota Direksi untuk sementara waktu, apabila anggota direksi yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP Nomor 40/2007) atau terdapat indikasi melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan atau melalaikan kewajibannya dan/atau terdapat alasan yang mendesak bagi perusahaan (Pasal 23 dan 66 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perum LKBN ANTARA).
21	Pemberian Tanggapan atas Usulan Remunerasi Direksi
22	Pembuatan dan Pemutakhiran Surat Pernyataan yang berkaitan dengan Potensi Benturan Kepentingan, Pakta Integritas dan Kepemilikan Saham dan/atau keluarganya pada perusahaan atau perusahaan lain
23	Pemantauan atas Efektivitas Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
24	Pengukuran Penilaian Kinerja Dewan Pengawas
	Jumlah

Tabel 44 Rencana Anggaran Belanja Dewan Pengawas

## 6. Penutup

Demikian Program Kerja Dewan Pengawas LKBN Antara Tahun 2023 ini dibuat, untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Dewan Pengawas sepanjang Tahun 2022 dengan tetap berpedoman kepada pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

## BAB IX

### PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

#### 7. Pendahuluan

##### a. Gambaran Umum

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (Program TJSJL BUMN) adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan. Pelaksanaan Program TJSJL BUMN berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta beedoman kepada ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan program, dengan harapan pelaksanaan Program TJSJL BUMN yang lebih terukur, berdampak dan berkelanjutan.

Program TJSJL BUMN bertujuan untuk:

1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

##### b. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117; tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
3. Peraturan Presiden Nomor: 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/03/2020 tanggal 7 April 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
6. Surat Menteri BUMN Nomor: S-683/MBU/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 hal Aspirasi Pemegang Saham/Pemiliki Modal untuk Penyusunan RKAP Tahun 2023.
7. Surat Menteri BUMN Nomor: S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 hal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program PUMK").
8. Surat Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi atas nama Menteri BUMN Nomor: S-125/DSI.MBU/11/2022 tanggal 15 November 2022 hal *Key Performance Indicator* Program TJSJL BUMN.

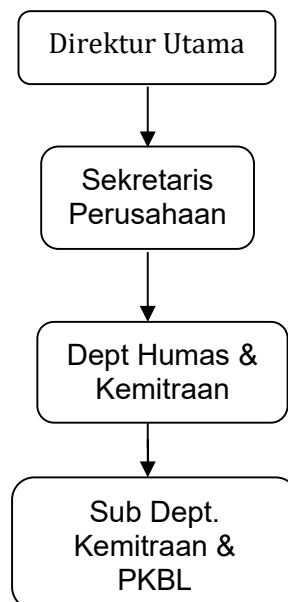
c. Tujuan dan Struktur Organisasi TJSL

Perusahaan Umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Perum LKBN ANTARA sebagai BUMN memiliki kewajiban kepada Kementerian BUMN sebagai stakeholder dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, adapun tujuan Perum LKBN ANTARA mengembangkan kegiatan TJSL adalah sebagai berikut.

1. Pada tingkat internal, terjadi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Perum LKBN ANTARA agar mampu mengelola kegiatan yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan perusahaan;
2. Meningkatkan kualitas pemahaman dan persepsi yang sama antara Perum LKBN ANTARA dengan mitra agar terciptanya saling pengertian yang positif dan kondusif guna membantu meningkatkan daya dorong dan posisi tawar Perum LKBN ANTARA selaku salah satu elemen dalam masyarakat Indonesia;
3. Melaksanakan program/kegiatan yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan di sekitar BUMN untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal; dan
4. Menumbuhkan sinergitas dengan BUMN, pelaku usaha, instansi pemerintah atau instansi terkait lainnya dalam mengelola suatu program yang sepenuhnya bermanfaat bagi masyarakat luas, di dalam maupun di luar negeri.

Adapun struktur organisasi TJSL Perum LKBN ANTARA adalah sebagai berikut:



## 8. Prognosa TJSJL Tahun 2022

Kegiatan program TJSJL tahun 2023 diprioritaskan pada Pilar Sosial dan Pilar Lingkungan menyesuaikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yang mencakup sebagai berikut:

### a. Kinerja TJSJL Tahun 2022

#### 1. CID (Non PUMK dan PUMK) dan Non CID

No	TPB	RKA 2022	Prognosa 2022	%Prognosa thdp RKA
<b>A</b>	<b>PILAR SOSIAL</b>	<b>327.000.000</b>	<b>294.542.219</b>	<b>90%</b>
1	TPB 1			
2	TPB 2			
3	TPB 3			
4	TPB 4	327.000.000	294.542.219	90%
5	TPB 5			
<b>B</b>	<b>PILAR EKONOMI</b>	<b>50.000.000</b>	<b>44.506.899</b>	<b>89%</b>
1	TPB 7			
2	TPB 8	50.000.000	44.506.899	89%
3	TPB 9			
4	TPB 10			
5	TPB 17			
<b>C</b>	<b>PILAR LINGKUNGAN</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.481.800</b>	<b>101%</b>
1	TPB 6			
2	TPB 11			
3	TPB 12			
4	TPB 13	15.000.000	15.000.000	100%
5	TPB 14	15.000.000	19.200.000	128%
6	TPB 15	20.000.000	16.281.800	81%
<b>D</b>	<b>PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA</b>	<b>393.400.000</b>	<b>315.335.440</b>	<b>80%</b>
1	TPB 16	393.400.000	315.335.440	80%
<b>TOTAL</b>		<b>820.400.000</b>	<b>704.866.358</b>	<b>86%</b>

#### 2. CID (Non PUMK)

No	TPB	RKA 2022	Prognosa 2022	%Prognosa thdp RKA
<b>A</b>	<b>PILAR SOSIAL</b>	<b>327.000.000</b>	<b>294.542.219</b>	<b>90%</b>
1	TPB 1			
2	TPB 2			
3	TPB 3			
4	TPB 4	327.000.000	294.542.219	90%
5	TPB 5			
<b>B</b>	<b>PILAR EKONOMI</b>	<b>50.000.000</b>	<b>44.506.899</b>	<b>89%</b>
1	TPB 7			
2	TPB 8	50.000.000	44.506.899	89%
3	TPB 9			
4	TPB 10			
5	TPB 17			
<b>C</b>	<b>PILAR LINGKUNGAN</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.481.800</b>	<b>101%</b>
1	TPB 6			
2	TPB 11			
3	TPB 12			
4	TPB 13	15.000.000	15.000.000	100%
5	TPB 14	15.000.000	19.200.000	128%
6	TPB 15	20.000.000	16.281.800	81%

No	TPB	RKA 2022	Prognosa 2022	%Prognosa thdp RKA
<b>D</b>	<b>PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA</b>			
1	TPB 16			
<b>TOTAL</b>		<b>820.400.000</b>	<b>389.530.918</b>	<b>91%</b>

## 3. Non CID

No	TPB	RKA 2022	Prognosa 2022	%Prognosa thdp RKA
<b>A</b>	<b>PILAR SOSIAL</b>			
1	TPB 1			
2	TPB 2			
3	TPB 3			
4	TPB 4			
5	TPB 5			
<b>B</b>	<b>PILAR EKONOMI</b>			
1	TPB 7			
2	TPB 8			
3	TPB 9			
4	TPB 10			
5	TPB 17			
<b>C</b>	<b>PILAR LINGKUNGAN</b>			
1	TPB 6			
2	TPB 11			
3	TPB 12			
4	TPB 13			
5	TPB 14			
6	TPB 15			
<b>D</b>	<b>PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA</b>	<b>393.400.000</b>	<b>315.335.440</b>	<b>80%</b>
1	TPB 16	393.400.000	315.335.440	80%
<b>TOTAL</b>		<b>393.400.000</b>	<b>315.335.440</b>	<b>80%</b>

## Keterangan:

- a) Program TJSL non PUMK yang dijalankan unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat/Community Involvement and Development (CID) yang bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada laporan RKA perusahaan tahun 2022 sebesar 427.000.000 atau 91% dari prognosa 2022
- b) Program TJSL non PUMK yang dijalankan Perum LKBN ANTara di luar unit CID bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada laporan RKA Perusahaan tahun 2022 sebesar 393.400.000 atau 80% dari prognosa 2022.
- c) Perum LKBN Antara tidak menganggarkan program Pendanaan UMK pada tahun 2022
- b. Program TJSL Tahun 2022
  1. Program Prioritas
    - a) Program Bidang Pendidikan

No	Program di Bidang Pendidikan	RKA 2022	Prognosa 2022	% Prognosa thd RKA
1	Uji Kompetensi Wartawan	150.000.000	174.694.329	116%
2	Pelatihan Wartawan	50.000.000	47.250.800	95%
3	Literasi Media	105.650.000	51.247.090	49%
4	Kolaborasi Bantuan Pendidikan	21.350.000	21.350.000	100%
<b>Total</b>		<b>327.000.000</b>	<b>294.542.219</b>	<b>90%</b>

Adapun uraian kegiatan dari program Bidang Pendidikan, sebagai berikut:

1) Uji Kompetensi Wartawan

Uji Kompetensi Wartawan (UKW) diselenggarakan sebanyak 2 kali kegiatan dengan total peserta lulus UKW sebanyak 34 wartawan dan dilaksanakan pada:

- 10-11 Februari 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara dengan total peserta lulus UKW sebanyak 22 wartawan.
- 20-21 Desember 2022 di Jakarta dengan total peserta lulus UKW sebanyak 12 wartawan.

2) Pelatihan Wartawan

Pelatihan Wartawan Cegah Hoaks bertajuk “Peran Jurnalis di Tengah Informasi Hoaks di Masyarakat” yang diselenggarakan secara online dan offline pada 30 Juni 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara dengan total peserta sebanyak 126 wartawan lokal dari berbagai media daring, elektronik maupun cetak.

3) Literasi Media

Menyelenggarakan kegiatan Antara goes to Campus/Schol dalam rangka mengedukasi mahasiswa/siswa mengenai bidang jurnalistik serta membangun awareness terhadap Antara sebagai Kantor Berita Indonesia. Adapun kegiatan dilaksanakan di beberapa universitas dan sekolah dengan data sebagai berikut:

- Politeknik Negeri Sambas, Kalimantan Barat yang bertajuk “Edukasi Foto dan Video Jurnalistik” dan diikuti sebanyak 75 peserta pada tanggal 27 Januari 2022
- Universitas Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah yang bertajuk “Pengenalan Foto dan Video Jurnalistik ANTARA” dan diikuti sebanyak 50 peserta pada 28 Maret 2022
- Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Kalimantan Tengah yang bertajuk Pengenalan Foto dan Video Jurnalistik ANTARA” dan diikuti sebanyak 120 peserta pada 29 Maret 2022
- SMAN 3 Boyolali, Jawa Tengah yang bertajuk “Pengenalan Foto Jurnalistik untuk Media Sosial” dan diikuti sebanyak 100 peserta pada 15 Desember 2022

4) Kolaborasi Bantuan Pendidikan

Penyampaian sumbangan kolaborasi bantuan pendidikan melalui Yayasan BUMN pada tanggal 26 Desember 2022.

b) Program Bidang Lingkungan

No	Program di Bidang Lingkungan	RKA 2022	Prognosa 2022	% Prognosa thd RKA
1	Bantuan Bencana Alam	15.000.000	15.000.000	100%
2	Transplantasi Terumbu Karang	20.000.000	19.200.000	96%
3	Penghijauan (Penanaman Pohon Non Mangrove)	15.000.000	16.281.800	109%
<b>Total</b>		<b>50.000.000</b>	<b>50.481.800</b>	<b>101%</b>

Adapun uraian kegiatan dari program Bidang Lingkungan, sebagai berikut:



- 1) Bantuan Bencana Alam  
Menyampaikan bantuan social berupa sembako kepada masyarakat terdampak bencana tanah gerak di Kecamatan Kampak dan Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur pada 13 Desember 2022
- 2) Translantasi Terumbu Karang  
Aksi Antara Jaga Laut sebagai salah satu upaya konservasi di perairan Pulau Banda lebih tepatnya di Taman Wisata Perairan Banda Neira pad 14 Oktober 2022.
- 3) Penghijauan (Penanaman Pohon Non Mangrove)  
Program Aksi Menanam Antara yang bertajuk “Bersama Tumbuh Hijaukan Beranda Negeri” di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada 27 Januari 2022 dengan menanam 1.500 bibit pohon Pinang, Tabubuya, Trambesi, Jengkol dan Petai yang lokasi penanamannya tersebar di 5 wilayah, yakni area Kampus Politeknik Negeri Sambas, area Kampus Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Kota Pemangkat, Pos Lintas Batas Negara Aruk, Daerah Paloh dan Obyek Wisata Bukit Piantus.

c) Program Pengembangan UMK

No	Program di Bidang Pengembangan UMK	RKA 2022	Prognosa 2022	% Prognosa thd RKA
1	Pelatihan Pengembangan UMK di NTB	20.000.000	44.506.899	223%
2	Pelatihan Pengembangan UMK di Kalimantan	15.000.000	0	0%
3	Pelatihan Pengembangan UMK di Bengkulu	15.000.000	0	0%
<b>Total</b>		<b>50.000.000</b>	<b>44.506.899</b>	<b>89%</b>

Adapun uraian kegiatan dari program Bidang Pengembangan UMK, sebagai berikut:

- 1) Pelatihan Pengembangan UMK di NTB  
Antara memberikan pelatihan kepada UMK di Kecamatan Sembalun, Nusa Tenggara Barat dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
  - Pelatihan yang bertajuk “Dasar *Marketing* dan Kisah Sukses UMKM” pada 19 Agustus 2022 yang diikuti oleh 21 pelaku UMK
  - Pelatihan yang bertajuk “Strategi Pengelolaan Produk dan Keuangan Bisnis Viral” pada 29 September 2022 yang diikuti oleh 21 pelaku UMK
  - Pelatihan yang bertajuk “*Digital Marketing*: Pengenalan Dasar Menggunakan Media Sosial Instagram” pada 15 November 2022 yang diikuti oleh 19 pelaku UMK.

2. Program *Creating Shared Value* (CSV)

No	Program CSV	RKA 2022	Prognosa 2022	% Prognosa thd RKA
1	Uji Kompetensi Wartawan	150.000.000	174.694.329	116%
2	Pelatihan Wartawan	50.000.000	47.250.800	95%
<b>Total</b>		<b>200.000.000</b>	<b>221.945.129</b>	<b>111%</b>

- c. Mitra Binaan  
Perum LKBN Antara belum memiliki Mitra Binaan
- d. Sumber Dana PUMK  
Perum LKBN Antara tidak melaksanakan dan membiayakan program Pendanaan UMK

## 9. Rencana Kerja Dan Anggaran TJSJ Tahun 2023

- a. Gambaran Umum Program TJSJ Tahun 2023

### 1. CID (Non-PUMK & PUMK) & Non CID

No	TPB	Prognosa 2022	RKA 2023	%RKA thdp Prognosa
<b>A</b>	<b>PILAR SOSIAL</b>	<b>294.542.219</b>	<b>340.000.000</b>	<b>115%</b>
1	TPB 1	-	-	-
2	TPB 2	-	-	-
3	TPB 3	-	-	-
4	TPB 4	294.542.219	340.000.000	-
5	TPB 5	-	-	-
<b>B</b>	<b>PILAR EKONOMI</b>	<b>44.506.899</b>	<b>100.000.000</b>	<b>225%</b>
1	TPB 7	-	-	-
2	TPB 8	44.506.899	100.000.000	-
3	TPB 9	-	-	-
4	TPB 10	-	-	-
5	TPB 17	-	-	-
<b>C</b>	<b>PILAR LINGKUNGAN</b>	<b>50.481.800</b>	<b>60.000.000</b>	<b>119%</b>
1	TPB 6	-	-	-
2	TPB 11	-	-	-
3	TPB 12	-	-	-
4	TPB 13	15.000.000	20.000.000	-
5	TPB 14	19.200.000	20.000.000	-
6	TPB 15	16.281.800	20.000.000	-
<b>D</b>	<b>PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA</b>	<b>315.335.440</b>	<b>275.000.000</b>	<b>87%</b>
1	TPB 16	315.335.440	275.000.000	-
<b>TOTAL</b>		<b>704.866.358</b>	<b>775.000.000</b>	<b>110%</b>

### 2. CID (Non PUMK)

No	TPB	Prognosa 2022	RKA 2023	%RKA thdp Prognosa
<b>A</b>	<b>PILAR SOSIAL</b>	<b>294.542.219</b>	<b>340.000.000</b>	<b>115%</b>
1	TPB 1	-	-	-
2	TPB 2	-	-	-
3	TPB 3	-	-	-
4	TPB 4	294.542.219	340.000.000	-
5	TPB 5	-	-	-
<b>B</b>	<b>PILAR EKONOMI</b>	<b>44.506.899</b>	<b>100.000.000</b>	<b>225%</b>
1	TPB 7	-	-	-
2	TPB 8	44.506.899	100.000.000	-
3	TPB 9	-	-	-
4	TPB 10	-	-	-
5	TPB 17	-	-	-
<b>C</b>	<b>PILAR LINGKUNGAN</b>	<b>50.481.800</b>	<b>60.000.000</b>	<b>119%</b>
1	TPB 6	-	-	-
2	TPB 11	-	-	-
3	TPB 12	-	-	-
4	TPB 13	15.000.000	20.000.000	133%

No	TPB	Prognosa 2022	RKA 2023	%RKA thdp Prognosa
5	TPB 14	19.200.000	20.000.000	104%
6	TPB 15	16.281.800	20.000.000	123%
<b>D</b>	<b>PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA</b>			
1	TPB 16			
<b>TOTAL</b>		<b>389.530.918</b>	<b>500.000.000</b>	<b>128%</b>

### 3. Non CID

No	TPB	Prognosa 2022	RKA 2023	%RKA thdp Prognosa
<b>A</b>	<b>PILAR SOSIAL</b>			
1	TPB 1			
2	TPB 2			
3	TPB 3			
4	TPB 4			
5	TPB 5			
<b>B</b>	<b>PILAR EKONOMI</b>			
1	TPB 7			
2	TPB 8			
3	TPB 9			
4	TPB 10			
5	TPB 17			
<b>C</b>	<b>PILAR LINGKUNGAN</b>			
1	TPB 6			
2	TPB 11			
3	TPB 12			
4	TPB 13			
5	TPB 14			
6	TPB 15			
<b>D</b>	<b>PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA</b>	<b>315.335.440</b>	<b>275.000.000</b>	<b>87%</b>
1	TPB 16	315.335.440	275.000.000	-
<b>TOTAL</b>		<b>315.335.440</b>	<b>275.000.000</b>	<b>87%</b>

#### Keterangan:

- a) Program TJSJ non PUMK yang dijalankan unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat/Community Involvement and Development (CID) yang bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada laporan RKA perusahaan tahun 2023 sebesar 500.000.000 atau 128% dari prognosa 2022
  - b) Program TJSJ non PUMK yang dijalankan Perum LKBN ANTara di luar unit CID bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada laporan RKA Perusahaan tahun 2023 sebesar 275.000.000 atau 87% dari prognosa 2022.
  - c) Perum LKBN Antara tidak menganggarkan program Pendanaan UMK pada tahun 2023
- b. Program TJSJ Tahun 2023
1. Program Prioritas
    - a) Program Bidang Pendidikan

No	Program di Bidang Pendidikan	Prognosa 2022	RKA 2023	% RKA thd Prognosa
1	Uji Kompetensi Wartawan	174.694.329	160.000.000	92%
2	Pelatihan Wartawan	47.250.800	70.000.000	148%
3	Literasi Media	51.247.090	60.000.000	117%
4	Kolaborasi Bantuan Pendidikan	21.350.000	50.000.000	234%

No	Program di Bidang Pendidikan	Prognosa 2022	RKA 2023	% RKA thd Prognosa
<b>Total</b>		<b>294.542.219</b>	<b>340.000.000</b>	<b>115%</b>

Adapun uraian kegiatan dari program Bidang Pendidikan, sebagai berikut:

- 1) Uji Kompetensi Wartawan  
Uji Kompetensi Wartawan dalam rangka memfasilitasi 30 wartawan media lokal non Antara di Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi dari Dewan Pers dengan rencana biaya sebesar 160.000.000
- 2) Pelatihan Wartawan  
Pelatihan wartawan media lokal non Antara di Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka peningkatan kapasitas pada 100 wartawan dengan rencana biaya kegiatan sebesar 70.000.000
- 3) Literasi Media  
Literasi media dalam rangka edukasi jurnalistik kepada mahasiswa/siswa (*Antara Goes to Campus/School*) secara tatap muka dengan rencana biaya kegiatan tersebut sebesar 60.000.000
- 4) Kolaborasi Bantuan Pendidikan  
Memberikan sumbangan kolaborasi bantuan pendidikan melalui Yayasan BUMN sebesar 50.000.000

#### b) Program Bidang Lingkungan

No	Program di Bidang Lingkungan	Prognosa 2022	RKA 2023	% RKA thd Prognosa
1	Bantuan Bencana Alam	15.000.000	20.000.000	133%
2	Transplantasi Terumbu Karang	19.200.000	20.000.000	104%
3	Penghijauan (Penanaman Pohon Non Mangrove)	16.281.800	20.000.000	123%
<b>Total</b>		<b>50.481.800</b>	<b>60.000.000</b>	<b>119%</b>

Adapun uraian kegiatan dari program Bidang Pendidikan, sebagai berikut:

- 1) Bantuan Bencana Alam  
Bantuan bencana alam berupa dana/natura di daerah-daerah yang terdampak bencana alam sebesar 20.000.000
- 2) Transplantasi Terumbu Karang  
Bantuan penanaman transplantasi terumbu karang ke wilayah yang memiliki dampak kerusakan ekosistem hayati di perairan Provinsi Sulawesi Tenggara 20.000.000
- 3) Penghijauan  
Bantuan penghijauan (penanaman pohon non mangrove) berupa dana/natura yang terdampak erosi sebesar 20.000.000

#### c) Program Pengembangan UMK

No	Program di Bidang Pengembangan UMK	Prognosa 2022	RKA 2023	% RKA thd Prognosa
----	------------------------------------	---------------	----------	--------------------

1	Pelatihan Pengembangan UMK	44.506.899	40.000.000	90%
2	Fasilitas Prasarana UMK di Lingkungan Perusahaan	0	60.000.000	100%
<b>Total</b>		<b>44.506.899</b>	<b>100.000.000</b>	<b>225%</b>

Adapun uraian kegiatan dari program Bidang Pendidikan, sebagai berikut:

- 1) Pelatihan Pengembangan UMK  
Bantuan pelatihan berkelanjutan kepada UMK di Nusa Tenggara Barat sebesar 40.000.000
- 2) Fasilitas Prasarana UMK di Lingkungan Perusahaan  
Memfasilitasi prasarana kepada UMK di lingkungan perusahaan sebesar 60.000.000

### 3. Program *Creating Shared Value* (CSV)

No	Program CSV	Prognosa 2022	RKA 2023	% RKA thd Prognosa
1	Uji Kompetensi Wartawan	174.694.329	160.000.000	92%
2	Pelatihan Wartawan	47.250.800	70.000.000	148%
<b>Total</b>		<b>221.945.129</b>	<b>230.000.000</b>	<b>104%</b>

#### c. RKA Program TJSJL PUMK Tahun 2023

Perum LKBN Antara tidak merencanakan dan menganggarkan program Pendanaan UMK

## 10. KPI Program TJSJL Tahun 2023

No	Indikator	Target	Bobot
1.	Melakukan pengukuran dampak atas program TJSJL dengan metode Social Return on Investment (SROI)	3 program	20%
2.	Ketersediaan kajian leveling unit Kerja TJSJL	BOD-3	20%
3.	Pemenuhan pengisian sistem informasi berbasis TI Kementerian BUMN	Lengkap dan tepat waktu	20%
4.	Ketercapaian kerjasama antar BUMN atau pihak lain dalam program TJSJL	3 program	20%
5.	Keterlibatan karyawan beartisipasi aktif dalam 1 kegiatan sosial kemasyarakatan baik yang berasal dari program TJSJL perusahaan maupun dari luar perusahaan	Seluruh 556 Karyawan Tetap	20%

Keterangan :

- a. Program TJSJL perusahaan yang akan diukur dengan metode *Social Return on Investment* (SROI) adalah sebagai berikut:

No.	Program	Rp
1	Uji Kompetensi Wartawan	160.000.000
2	Pelatihan Wartawan	70.000.000
3	Fasilitas Prasarana UMK di Lingkungan Perusahaan	60.000.000

- b. Program TJSJL yang dilaksanakan secara kolaborasi antar BUMN adalah sebagai berikut :

No.	Program	Rp
1	Kolaborasi Bantuan Pendidikan	50.000.000
2	Pelatihan Pengembangan UMK	20.000.000
3	Penghijauan (Penanaman Pohon Non Mangrove)	20.000.000

## BAB X LAIN-LAIN

### 1. Kesimpulan

Target-target finansial RKAP Perum LKBN Antara Tahun 2023 secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut :

*(dalam juta Rupiah)*

*Tabel 45 Target Kunci Perum LKBN Antara*

Aspek	2022 (prognosa)	Target 2023	%
Pendapatan usaha	400,57	435,539	9%
Beban pokok usaha	279,974	304,156	9%
Beban umum	100,529	95,769	-5%
Laba bersih	126,428	22,498	-82%
Arus kas operasi	4,522	27,593	510%
Arus kas	134,022	110,216	-18%
EBITDA	188,600	47,774	15%

Sementara itu program kerja perusahaan pada tahun 2023 bisa diringkas dalam enam strategi utama sebagaimana berikut;

- a. Revitalisasi aset pasca aksi korporasi
- b. Membangun literasi politik untuk membangun kesadaran politik jelang pemilu 2023
- c. Membentuk talenta digital dan inklusif untuk menciptakan ekosistem kerja yang dinamis dan *agile*
- d. Meningkatkan tata kelola perusahaan melalui pemutakhiran dan penguatan sistem
- e. Melakukan diversifikasi model bisnis melalui inovasi berkelanjutan
- f. Redefinisi masa depan Kantor Berita Antara

### 2. Hal-hal yang memerlukan persetujuan;

- a. Persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Pengawas 2023,
- b. Pengesahan RKA Program TJSL tahun 2023,
- c. Penetapan Key Performance Indicators (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2023 antara Direksi, Dewan Pengawas, dengan Pemilik Modal,
- d. Penetapan Key Performance Indicators (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2023 Dewan Pengawas dengan Pemilik Modal,
- e. Penugasan Pemerintah dhi. Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada Perum LKBN Antara berupa PSO dalam bentuk diseminasi informasi publik bidang pers dengan target realisasi anggaran sebesar Rp155,7 Miliar dan target produksi sebesar 173.000
- f. Persetujuan penggunaan aset untuk agunan kredit investasi pada 2023 sesuai pada hal. 19-20 RKAP ini.

**LAMPIRAN**

## PERNYATAAN SELERA RISIKO 2023

Untuk penyelarasan inisiatif strategis dengan prinsip penganggaran berbasis risiko, Perum LKBN Antara pada 2023 menetapkan selera risiko sebagaimana berikut:

**REPUTASI.** Tahun 2023 merupakan tahun yang kritikal bagi reputasi perusahaan karena harus turut mensukseskan agenda pesta demokrasi Indonesia dengan memproduksi berita-berita untuk meningkatkan literasi politik warga dan dengan berkolaborasi bersama lembaga-lembaga negara. Mengingat hal tersebut, perusahaan tidak akan menerima risiko-risiko yang berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan kunci dan hanya akan mentoleransi eksposur dalam *batas rendah*.

**STRATEGI.** Perusahaan pada tahun 2023 akan melakukan sejumlah langkah strategis penting di tengah ketidakpastian situasi politik (pemilihan umum) dan ekonomi (resesi) eksternal sehingga menetapkan selera *moderat* untuk kategori risiko ini.

**OPERASIONAL.** Mengingat situasi politik Indonesia menjelang pemilihan umum yang memberikan pengaruh besar bagi pemberitaan, maka perusahaan menetapkan *batas selera yang rendah* dengan menjaga akurasi dan keberimbangan berita, serta target-target operasional lain baik dari sisi bisnis maupun redaksi.

**KEUANGAN.** Perusahaan mentoleransi eksposur risiko keuangan *sampai level moderat* – karena perusahaan akan melakukan investasi yang cukup besar terkait aset-aset tetap baru diakuisisi di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat resesi.

**HUKUM DAN KEPATUHAN.** Perusahaan akan selalu patuh terhadap semua regulasi yang berlaku, baik untuk induk maupun untuk anak perusahaan, dan tidak akan mentoleransi pelanggaran-pelanggaran hukum yang mengakibatkan sengketa litigasi. Pada risiko ini, selera perusahaan adalah *rendah*.

**KESELAMATAN KERJA.** Untuk mendapatkan berita-berita eksklusif yang hanya bisa didapatkan dari Kantor Berita Antara dan meningkatkan reputasi perusahaan di bidang pers, perusahaan akan mengirim wartawan untuk melakukan peliputan ke daerah konflik, daerah rawan bencana, dan liputan berbahaya lainnya. Perusahaan siap menerima keterpaparan risiko dengan *batas tinggi* yang ditimbulkan dari sikap ini dan akan melakukan upaya mitigasi yang maksimal.



## MATRIKS SELERA RISIKO 2023

Dewan Pengawas dan jajaran Direksi Perum LKBN Antara mengesahkan Matriks Selera Risiko di bawah ini untuk membangun suatu landasan dalam pengambilan perlakuan risiko yang disiplin sehingga memungkinkan perusahaan menciptakan dan melindungi nilai baik jangka panjang maupun jangka pendek bagi para pemangku kepentingan.

KPI	Selera	KRI	Target	Batas Deviasi	Monitoring
EBITDA	<b>Moderat</b>	% capaian EBITDA	47,7	2%	Bulanan
ROIC $\geq$ WACC	<b>Rendah</b>	Rasio ROIC:WACC	1,60	2%	Bulanan
Interest Bearing Debt to EBITDA	<b>Rendah</b>	% Interest Bearing Debt to Ebitda	1,1	2%	Bulanan
Interest Bearing Debt to Invested Capital	<b>Moderat</b>	Interest Bearing Debt to Invested Capital	18,3	5%	Bulanan
Diseminasi berita Pemilu untuk meningkatkan kesadaran terhadap pendidikan pemilih di 38 Provinsi	<b>Rendah</b>	Jumlah media yang mengutip berita Antara tentang pemilu	64	2%	Bulanan
Peningkatan Kompetensi Wartawan Non Antara	<b>Rendah</b>	% realisasi program uji kompetensi	30	2%	Semester
Jumlah Inovasi penunjang Performa Perusahaan	<b>Rendah</b>	Jumlah digitalisasi proses kerja	2	0%	Semester
Pengembangan Platform Antara ETP untuk partisipan trading offshore melalui Conduit Model	<b>Moderat</b>	% realisasi pengembangan Conduit Model	100%	10%	Semester
Sinergi Bisnis Antar anggota klaster TMT	<b>Rendah</b>	% realisasi tahapan sinergi	1	5%	Triwulan
Peningkatan Skor INDI 4.0	<b>Moderat</b>	% pemenuhan gap	>2022	10%	Triwulan
Ketersediaan dukungan IT untuk operasional perusahaan	<b>Moderat</b>	% realisasi program kerja sesuai roadmap IT	5	10%	Triwulan
Ketepatan waktu pelaksanaan soft trial Bisnis ETP	<b>Moderat</b>	% realisasi tahapan menuju soft trial	TW I	10%	Bulanan
Ketersediaan Roadmap untuk Revitalisasi /Pengembangan Asset	<b>Moderat</b>	% realisasi tahapan penyusunan roadmap	100	10%	Semester
Rasio Top Talent Muda (< 42 tahun) dalam nominated talent	<b>Tinggi</b>	% penempatan perempuan dalam jabatan struktural (GM, manajer, asisten manajer)	19	5%	Triwulan

KPI	Selera	KRI	Target	Batas Deviasi	Monitoring
Rasio perempuan dalam nominated talent	<b>Moderat</b>	% millennial dalam pelatihan pengembangan kapastitas	20	5%	Triwulan
Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko (Rasio Kualifikasi)	<b>Moderat</b>	% pemenuhan kualifikasi dalam Organ Pengelola Risiko	70	15%	Triwulan
Pelatihan untuk Digital readiness	<b>Rendah</b>	Jenis pelatihan digital	6	2%	Triwulan
Ketersediaan roadmap Dana Pensiun menuju kualitas pendanaan tingkat 1	<b>Moderat</b>	% realisasi tahapan penyusunan roadmap	TW2	10%	Bulanan

Jakarta, 27 Desember 2022



**Widodo Muktiyo**  
Ketua Dewan Pengawas



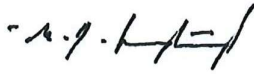
**Widiarsi Agustina**  
Anggota



**Mayong Suryo Laksono**  
Anggota



**Monang Sinaga**  
Anggota



**Meidyatama Suryodiningrat**  
Direktur Utama



**Akhmad Munir**  
Direktur Pemberitaan



**Hempi N. Prajudi**  
Direktur Komersil dan Pengembangan Bisnis



**Nina Kurnia Dewi**  
Direktur Keuangan MSDM dan MR

Nomor : 2181/KLA/DITUM/XI/2022  
 Lampiran : Situasi dan Klasifikasi Risiko Perum LKBN Antara Berdasarkan Permen-5  
 Perihal : Penyampaian Self Assesment Klasifikasi Risiko Perum LKBN Antara

Jakarta, 4 November 2022

Kepda Yth:  
 Deputi Bidang Keuangan & MR  
 Kementerian BUMN  
**Ibu Nawal Nely**  
 di  
 Jakarta

Sehubungan surat Deputi Bidang Keuangan & Manajemen Risiko Kementerian BUMN no. S-42/DKU.MBU/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Tindak Lanjut Sosialisasi Permen BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022, maka berikut disampaikan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) atas klasifikasi risiko Perum LKBN Antara tahun 2022 secara ringkas sebagai berikut:

Aspek	Hasil Penilaian
Kesesuaian dengan ketentuan Permen-5	Sebagian besar aturan internal perusahaan, struktur organisasi, dan praktik yang dijalankan perusahaan selama satu tahun terakhir telah sesuai dengan Permen-5 tentang Penerapan Manajeme Risiko pada BUMN. Lihat lampiran untuk detail kesesuaian.
Intensitas risiko:	
a. Intensitas pada induk	Dimensi Ukuran : KECIL Dimensi Kompleksitas: TINGGI Kuadran Klasifikasi: Sistemik B
b. Intensitas pada anak Perusahaan	Dimensi Ukuran : BESAR Dimensi Kompleksitas: TINGGI Kuadran Klasifikasi: Sistemik A

Penilaian mandiri yang dilakukan telah menggunakan skema penilaian sesuai Permen-5 tentang Manajemen Risiko. Namun demikian terlampir disampaikan beberapa catatan sehubungan kondisi Perum LKBN Antara, untuk dapat menjadi pertimbangan lebih lanjut guna penetapan intensitas risiko oleh Kementerian BUMN.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan perkenan Ibu disampaikan terima kasih.

Perum LKBN Antara  


**Nina Kurnia Dewi**  
 Direktur Keuangan & MR

Tembusan Yth:

1. Dewan Pengawas Perum LKBN Antara
2. Direksi Perum LKBN Antara
3. Direksi PT Antara-ETP
4. Kepala SPI
5. Sekretaris Perusahaan
6. Arsip

## LAMPIRAN

### Situasi dan Klasifikasi Risiko Perum LKBN Antara Berdasarkan Permen-5

#### 1. Matrix kesesuaian situasi Perum LKBN Antara dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022

Pasal Permen-5	Keterangan
Pasal 7 tentang Kategori BUMN (Konglomerasi atau Individu)	<b>INDIVIDU</b> . Kontribusi anak perusahaan yang dimiliki oleh Perum LKBN Antara masih di bawah dari 20 persen dari total pendapatan induk.
Pasal 8 tentang <i>three lines model</i>	Perusahaan sudah menerapkan model tiga lini sebagaimana disyaratkan oleh pasal ini – dengan ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah ditetapkan Perum LKBN Antara
Pasal 10 (3) tentang ukuran BUMN	Perum LKBN Antara merupakan BUMN berukuran <b>KECIL</b> dengan total aset kurang dari satu triliun rupiah
Pasal 10 (4) tentang kompleksitas BUMN	Perum LKBN Antara memiliki <b>kompleksitas tinggi</b> karena menjalankan kewajiban pelayanan umum (public service obligation) dan memiliki hubungan kelembagaan strategis dengan lebih dari satu kementerian teknis
Pasal 10 (6) tentang klasifikasi dalam posisi kuadran	Berada dalam kuadran <b>Sistemik B</b> , yaitu BUMN berukuran kecil dengan kompleksitas tinggi
Pasal 13 tentang organ pengelola manajemen risiko	Karena berada dalam klasifikasi Sistemik B dan berkategori Individu, maka Perum LKBN Antara wajib memiliki organ pengelola risiko sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Pengawas</li> <li>• Direksi</li> <li>• Komite Audit (<i>ket: sudah ada</i>)</li> <li>• Komite Pemantau Risiko yang dirangkap oleh Komite Tata Kelola Integrasi (<i>ket: sudah ada Komite Pemantau Risiko, namun jabatan tersebut belum dirangkap dengan Komite Tata Kelola Integrasi</i>)</li> <li>• Direktur yang membidangi pengelolaan risiko (<i>ket: dirangkap oleh Direktur Keuangan</i>)</li> <li>• Direktur yang membidangi keuangan (<i>ket: dirangkap oleh Direktur Manajemen Risiko</i>)</li> </ul>
Pasal 14 – 21 tentang fungsi organ pengelola risiko	Sudah sesuai dengan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang dimiliki perusahaan, dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas antar organ pengelola manajemen risiko yang dimiliki
Pasal 22 tentang Taksonomi Risiko	Perusahaan sudah memiliki taksonomi risiko – dan akan disesuaikan dengan taksonomi yang ditetapkan Kementerian BUMN
Pasal 23 tentang Kebijakan Manajemen Risiko	Sebagian besar sesuai dengan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang dimiliki perusahaan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan risiko sesuai dengan taksonomi</li> <li>• Penetapan penggunaan metode pengukuran</li> <li>• Penentuan limit dan toleransi risiko</li> <li>• Sistem informasi yang mencakup eksposur dan realisasi pelaksanaan</li> </ul> <p>Namun yang belum dimiliki oleh perusahaan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk</li> </ul>

Pasal 24-25 tentang Sistem Pengendalian Intern	Sudah sesuai dengan bab terkait “Perbaikan Berkelanjutan” dalam Pedoman Manajemen Terintegrasi Perum LKBN Antara
Pasal 26 tentang penyesuaian pedoman internal dengan Permen-5	<p>Beberapa pedoman internal yang telah sesuai dengan Permen-5 adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piagam Dewan Pengawas tentang komitmen pengelolaan risiko, dan organ-organnya</li> <li>• Piagam Direksi tentang komitmen pengelolaan risiko</li> <li>• Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi</li> </ul> <p>Sementara aturan internal yang masih harus disesuaikan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rangkap jabatan antara Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Integrasi</li> <li>• Pedoman Audit Internal</li> </ul>
Pasal 27 tentang penyusunan RKAP	<p>Perusahaan sudah menyusun perencanaan Manajemen Risiko dalam RKAP, sesuai dengan pasal ini, yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil risiko</li> <li>• Peta risiko</li> <li>• Target perhitungan risiko inheren dan residual</li> <li>• Rencana pelaksanaan mitigasi dan biayanya</li> </ul>
Pasal 30 tentang laporan Manajemen Risiko	<p>Perusahaan telah secara rutin menyerahkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan persyaratan Permen-5</li> <li>• Laporan audit internal</li> <li>• Laporan <i>Risk Maturity Index</i> dengan nilai 3,42 pada tahun 2022, naik dari 2,42 pada tahun sebelumnya.</li> </ul> <p>Namun demikian, perusahaan belum melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Tata Kelola Integrasi</li> </ul>

## 2. Pemetaan posisi Perum LKBN Antara berdasarkan tingkat intensitas risiko

### a. Posisi BUMN dalam klasifikasi risiko

#### *Dimensi Ukuran: KECIL*

Perum LKBN Antara adalah BUMN dengan ukuran kecil dengan aset kurang dari Rp100 trilyun. Berikut merupakan jumlah aset perusahaan dalam laporan audited selama tiga tahun terakhir:

	2021	2020	2019
Aset Lancar	Rp 194,120,766,571	Rp 184,163,071,680	Rp 164,386,732,821
Aset Tidak Lancar	Rp 82,020,953,987	Rp 85,628,328,401	Rp 78,758,310,117
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>Rp 276,141,720,558</b>	<b>Rp 269,791,400,081</b>	<b>Rp 243,145,042,938</b>

#### *Dimensi Kompleksitas: TINGGI*

Syarat	Antara
Menjalankan kewajiban PSO	<b>YA</b>
Memiliki hubungan kelembagaan strategis dengan kementerian teknis	<b>YA</b> dengan Kominfo dan KSP
Memiliki pangsa pasar atau barang/jasa yang sulit tergantikan oleh swasta (statusnya hampir monopoli)	<b>TIDAK</b> kompetitor banyak
Memiliki struktur korporasi kompleks: • Memiliki lebih dari lima anak perusahaan	<b>TIDAK</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki anak perusahaan di luar negeri</li> <li>Memiliki perusahaan JV untuk proyek dengan skema <i>project finance</i></li> </ul>	
Memiliki interkoneksi tinggi dengan BUMN lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah transaksi dengan sesama BUMN <math>\geq 20\%</math> dari total transaksi</li> <li>Memiliki interdependensi signifikan dengan BUMN lain</li> </ul>	<b>TIDAK</b> transaksi dengan BUMN lain 14.5%
<b>Kesimpulan</b>	<b>TINGGI</b>

Berdasarkan tabel pemenuhan syarat di atas, seharusnya masuk dalam kategori BUMN dengan dimensi kompleksitas yang tinggi karena memenuhi dua dari lima syarat yang ada – mengemban penugasan negara untuk PSO bidang Pers dan mempunyai lebih dari satu kementerian teknis. Namun demikian, kondisi yang ada di Perum LKBN Antara adalah nilai penugasan PSO sebesar Rp 160 Milyar atau 40% dari total penjualan (omset) perusahaan, dan bahwa seluruh tagihan Pemerintah dapat diselesaikan atau selalu dapat dibayar pada tahun yang bersangkutan. Berikut disampaikan perbandingan anggaran PSO Perum LKBN Antara dengan PSO pada BUMN lain, dimana dapat disampaikan bahwa penerimaan PSO perusahaan jauh lebih rendah dari PSO/Subsidi yang diterima oleh BUMN lain.



Berdasarkan perbandingan di atas, terlihat bahwa anggaran PSO untuk Antara jauh lebih kecil dari BUMN-BUMN serupa yang menerima penugasan negara. Kondisi ini dapat menjadi pertimbangan untuk penilaian lebih lanjut untuk penempatan Perum LKBN Antara sebagai BUMN dengan kompleksitas tinggi.

#### b. Posisi anak dan cucu perusahaan dalam klasifikasi risiko

##### *Dimensi Ukuran: BESAR*

Berdasarkan ketentuan dalam panduan pengisian self assesment dalam surat S-42/DKU.MBU/10/2022, anak perusahaan dikategorikan BESAR jika total modal anak perusahaan (didefinisikan sebagai semua item dalam ekuitas) lebih besar dari lima persen modal konsolidasi. Berikut adalah total modal konsolidasi dan anak perusahaan dalam laporan keuangan per 30 September 2022 (inhouse):

Total modal konsolidasi	Rp81,596
Total modal ETP	Rp30,000
Prosentase	36.8%

Dengan demikian, ukuran anak perusahaan adalah BESAR

##### *Dimensi Kompleksitas: TINGGI*

Syarat	Antara-ETP
Menjalankan kewajiban PSO	<b>TIDAK</b>
Memiliki hubungan kelembagaan strategis dengan	<b>YA</b>



Syarat	Antara-ETP
kementerian teknis	BI dan OJK
Memiliki pangsa pasar atau barang/jasa yang sulit tergantikan oleh swasta (statusnya hampir monopoli)	<b>YA</b> Penyedia ETP hanya dibatasi tiga perusahaan (relatif monopoli)
Memiliki struktur korporasi kompleks: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki lebih dari lima anak perusahaan</li> <li>• Memiliki anak perusahaan di luar negeri</li> <li>• Memiliki perusahaan JV untuk proyek dengan skema <i>project finance</i></li> </ul>	<b>TIDAK</b>
Memiliki interkoneksi tinggi dengan BUMN lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah transaksi dengan sesama BUMN <math>\geq 20\%</math> dari total transaksi</li> <li>• Memiliki interdependensi signifikan dengan BUMN lain</li> </ul>	<b>YA</b> transaksi dengan BUMN lain diperkirakan lebih dari 50%
<b>Kesimpulan</b>	<b>TINGGI</b>

PT Antara ETP, dengan bisnis utama yaitu sebagai penyedia *Electronic Trading Platform*, memiliki kompleksitas tinggi karena perusahaan menjalin hubungan dengan Lembaga-lembaga strategis yaitu Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), KPEI. Perusahaan PT Antara ETP juga memiliki pangsa pasar yang sulit tergantikan oleh swasta karena sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI), maka di Indonesia hanya diijinkan 3 (tiga) perusahaan penyedia ETP. PT Antara ETP juga memiliki interkoneksi yang tinggi terhadap BUMN lain yaitu BUMN yang tergabung dalam Himbara (Himpunan Bank Negara), dengan jumlah transaksi diperkirakan lebih dari 50%.

PT Antara ETP adalah anak perusahaan Perum LKBN Antara yang merupakan pengalihan bisnis sebelumnya yaitu Antara Digital Media (dahulu PT IMQ Multimedia Utama) yang menjalankan bisnis distribusi media melalui i-media dan videotron di seluruh Indonesia dan luar negeri. Perubahan nama anak perusahaan (dari PT IMQ menjadi PT Antara ETP) dilakukan pada Januari 2022 guna memenuhi ketentuan Bank Indonesia, di mana bisnis usaha PT Antara ETP hanya berfokus pada penyediaan *Electronic Trading Platform* dan akan beroperasi pada 2023.

Kondisi anak perusahaan sebagaimana disampaikan di atas dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan posisi intensitas risiko Perum LKBN Antara.